

AKUNTANSI KEUANGAN

Penulis :

- Dwi Ekasari Harmadji
- Amelia Rizky Alamanda
- Fice Handayani
- Neks Triani
- Parju
- Yenny Wati
- Sri Suyati
- Galih Wicaksono
- Nurchayati
- Aprih Santoso

ISBN 978-623-8004-64-5



9 786238 004645

AKUNTANSI KEUANGAN

**Dwi Ekasari Harmadji
Amelia Rizky Alamanda
Fice Handayani
Neks Triani
Parju
Yenny Wati
Sri Suyati
Galih Wicaksono
Nurchayati
Aprih Santoso**



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

AKUNTANSI KEUANGAN

Penulis :

Dwi Ekasari Harmadji
Amelia Rizky Alamanda
Fice Handayani
Neks Triani
Parju
Yenny Wati
Sri Suyati
Galih Wicaksono
Nurchayati
Aprih Santoso

ISBN : 978-623-8004-64-5

Editor : Mila Sari, M.Si

Penyunting : Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekufteknologi.co.id
Email : globaleksekufteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Keuangan.

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami teori Akuntansi Keuangan, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 JENIS-JENIS HUTANG JANGKA PENDEK SERTA MENERAPKAN PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN HUTANG JANGKA PENDEK DAN HUTANG BERSYARAT	1
1.1 Definisi Hutang Jangka Pendek.....	1
1.2 Ciri-Ciri Hutang Jangka Pendek	2
1.3 Jenis dan Pencatatan Hutang Jangka Pendek	3
1.3.1 Hutang Dagang (<i>Account Payable</i>)	3
1.3.2 Hutang Wesel (<i>Notes Payable</i>)	4
1.3.3 Hutang Dividen	6
1.3.4 Pendapatan Diterima di Muka	7
1.3.5 Hutang Biaya (Biaya Yang Masih Harus Dibayar) ..	7
1.3.6 Dana Pihak Ketiga (Hutang Pajak)	8
1.3.7 Hutang Jangka Pendek yang Jatuh Tempo Dalam Periode Tersebut.....	8
1.3.8 Hutang Bank Jangka Pendek.....	9
1.3.9 Liabilitas Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo periode berikutnya (<i>Current portion of longterm liability</i>).....	10
1.3.10 Hutang/ Liabilitas Jangka Pendek Dibiayai Kembali	10
1.4 Pelaporan dan Pengungkapan Hutang Jangka Pendek.	11
1.5 Pelaporan dan Pengungkapan Hutang Bersyarat (<i>Contingent Liability</i>).....	11
1.5.1 Memahami Utang Bersyarat	12
1.5.2 Contoh Hutang Bersyarat.....	12
1.5.3 Perhitungan Khusus	13
1.5.4 Tujuan & Ruang Lingkup PSAK 57	13
1.5.5 Restrukturisasi.....	17
1.5.6 Pengungkapan	18

BAB 2 PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENCATATAN, PELAPORAN

DAN PENGUNGKAPAN HUTANG OBLIGASI.....	23
2.1 Definisi Hutang Obligasi	23
2.2 Penerbitan Hutang Obligasi	24
2.3 Tipe Hutang Obligasi.....	24
2.4 Penilaian Hutang Obligasi.....	25
2.5 Penerbitan Obligasi menggunakan Nilai Par.....	26
2.6 Penerbitan Obligasi dengan Diskon atau Premium	27
2.7 Penerbitan Obligasi dengan Metode Bunga Efektif	28
2.8 Penerbitan Obligasi dengan Nilai Diskon	28
2.9 Penerbitan Obligasi dengan Nilai Premi	29

BAB 3 PERHITUNGAN SERTA PELAPORAN MODAL

PERUSAHAAN (<i>STOCKHOLDERS EQUITY</i>).....	32
3.1 Perseroan Terbatas (PT)	32
3.2 Modal Perusahaan	34
3.2.1 Modal Disetor	34
3.2.2 Saldo Laba (Laba Ditahan/ <i>Retained Earnings</i>).....	35
3.2.3 Tambahan Modal Disetor.....	35
3.3 Saham Biasa	37
3.3.1 Penerbitan Saham Biasa	38
3.3.2 Penerbitan Saham Biasa dengan Sekuritas Lain (Secara <i>Lump Sum</i>)	39
3.3.3 Penerbitan Secara Non Tunai.....	41
3.4 Saham Preferen.....	42
3.5 <i>Treasury Stock</i>	43
3.5.1 Pembelian <i>Treasury stock</i> dengan Metode Nilai Nominal (<i>Par Value Method</i>)	44
3.5.2 Pembelian <i>Treasury stock</i> dengan Metode Biaya....	45
3.6 Penyajian dan Pengungkapan	46

BAB 4 KEBIJAKAN DIVIDEN SERTA PERHITUNGAN LABA

PER LEMBAR SAHAM (<i>EARNING PER SHARE</i>).....	52
4.1 Pendahuluan	52
4.2 Bentuk-bentuk Dividen.....	53
4.3 Kebijakan Dividen.....	54
4.4 Teori Kebijakan Dividen.....	54
4.4.1 <i>The Dividend Irrelevance Theory</i>	54
4.4.2 Teori Sinyal.....	55

4.4.3 <i>Agency Cost Theory</i>	56
4.4.4 Teori Biaya Transaksi.....	58
4.4.5 <i>Tax Related Theories</i>	59
4.4.6 Teori Bird-in-the-Hand	60
4.4.7 <i>Pecking Order Theory</i>	61
4.4.8 <i>Residual Dividend Theory</i>	62
4.4.9 <i>Catering Theory of Dividends</i>	62
4.4.10 <i>Maturity Theory</i>	63
4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dividen	64
4.6 Laba Perlembar Saham (<i>earning per share</i>)	67
BAB 5 PERHITUNGAN TRANSAKSI INVESTASI SAHAM	
UNTUK TRADING, AVAILABLE FOR SALE, HELD TO	
MATURITY	72
5.1 Pendahuluan	72
5.2 Pengertian Investasi	72
5.3 Biaya Investasi	73
5.4 Nilai Tercatat Investasi	73
5.5 Pelepasan Investasi	74
5.6 Sekuritas Trading (Investasi Jangka Pendek)	74
5.6.1 Pencatatan Pembelian Saham	76
5.6.2 Pencatatan Pada Saat Penjualan dan Penilaian Akhir Tahun.....	77
5.7 <i>Available For Sale Securities</i> (Sekuritas Tersedia Untuk Dijual)	82
5.7 <i>Held To Maturity Securities</i> (Investasi Jangka Panjang)	83
5.7.1 Pencatatan Investasi Jangka Panjang Dalam Saham	84
5.7.2 Penilaian Investasi Jangka Panjang Atas Saham	86
5.7.3 Penerimaan Deviden.....	88
BAB 6 PERHITUNGAN PENGAKUAN PENDAPATAN	
UNTUK TRANSAKSI PENJUALAN POINT SALE DAN	
KONTRAK PANJANG	92
6.1 Definisi Pengakuan Pendapatan.....	92
6.2 Pengakuan Pendapatan pada saat Penjualan (<i>Point of Sale</i>)	93
6.3 Pengakuan Pendapatan untuk Kontrak Jangka Panjang	94

BAB 7 ISU-ISU DARI PENGAKUAN PENDAPATAN	102
7.1 Pendahuluan	102
7.2 Pengakuan dan Pengukuran Penghasilan	103
7.3 Pengakuan Pendapatan metode AkruaI dan Kas	103
7.4 Pendapatan sebagai obyek dan Bukan Obyek	105
7.5 Pendapatan yang bukan merupakan Objek Pajak.....	106
7.6 Pengakuan Penghasilan Untuk Beberapa Jenis Perusahaan.....	106
7.7 Transaksi Pendapatan.....	107
BAB 8 PERHITUNGAN DALAM PAJAK PENGHASILAN.....	117
8.1 Pendahuluan	117
8.2 Pajak Penghasilan	118
8.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	118
8.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	121
8.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	124
8.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) / PPh Final.....	127
BAB 9 PERHITUNGAN DALAM AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA UNTUK LESSOR	132
9.1 Akuntansi sewa guna usaha operasi.....	132
9.2 Akuntansi Sewa Guna Usaha Pembiayaan Langsung....	133
9.2.1 Akuntansi sewa guna usaha pembiayaan langsung dengan nilai residu.....	136
9.2.2 Biaya langsung awal berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan langsung.....	138
9.3 Akuntansi sewa guna usaha jenis penjualan	138
9.3.1 Akuntansi untuk sewa guna tipe penjualan dengan penawaran opsi pembelianatau jaminan nilai sisa	141
9.3.2 Akuntansi untuk sewa guna usaha tipe penjualan dengan nilai sisa yang tidak dijamin	142
9.4 Penjualan aset selama masa sewa guna usaha	143
9.5 Perlakuan sewa guna usaha pada laporan arus kas lessor	144
BAB 10 PERUBAHAN AKUNTANSI DALAM PERUSAHAAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU	148
10.1 Pendahuluan.....	148
10.2 Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku	148

10.3 Perubahan dalam Prinsip Akuntansi.....	151
10.4 Perubahan dalam Taksiran-taksiran Akuntansi	151
10.5 Perubahan Kesatuan Usaha	152
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hutang Wesel atau Wesel Bayar (<i>Promissory Note</i>)	5
Gambar 2. Perhitungan Beban Bunga Hutang Bank Jangka Pendek	9
Gambar 3. Ilustrasi Penyajian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan.....	47
Gambar 4. Ilustrasi Penyajian Ekuitas Pemegang Saham pada Laporan Perubahan Ekuitas.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skedul penerimaan sewa guna usaha dan pendapatan bunga (sewa guna usaha lima tahun, pembayaran tahunan Rp60.00.000 diluar biaya pelaksanaan), bunga 10%).....	136
Tabel 2. Skedul penerimaan sewa guna usaha dan pendapatan bunga (sewa guna usaha lima tahun, pembayaran tahunan Rp75.000.000 diluar biaya pelaksanaan), bunga 10%).....	138
Tabel 3. Ringkasan pengaruh sewa guna usaha pada laporan arus kas	146

BAB 1

JENIS-JENIS HUTANG JANGKA PENDEK SERTA MENERAPKAN PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN HUTANG JANGKA PENDEK DAN HUTANG BERSYARAT

Oleh Dwi Ekasari Harmadji

1.1 Definisi Hutang Jangka Pendek

Hutang atau Liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan berdampak pada pengeluaran sumber daya entitas (Utama, 2013). Klasifikasi liabilitas lancar, jika:

- ♦ Mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
- ♦ Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- ♦ Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- ♦ Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Siklus operasi adalah jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas (Martani, 2016).

Liabilitas jangka pendek termasuk kategori instrumen keuangan maka disebut liabilitas keuangan. Instrumen keuangan diatur dalam:

- ♦ PSAK 50 : Penyajian Instrumen Keuangan
- ♦ PSAK 55: Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan

◆ PSAK 60: Pengungkapan Instrumen Keuangan

Liabilitas diukur dengan nilai wajar, nilai amortisasi atau harga perolehan. Biaya transaksi untuk yang diukur dengan nilai wajar dibebankan sebagai biaya periode berjalan, sedangkan untuk yang diukur selain dengan nilai wajar dikapitalisasi. Pengaruh kapitalisasi biaya transaksi akan mempengaruhi effective interest rate dan beban bunga yang diakui.

Hutang jangka pendek merupakan pinjaman uang/dana, atau kewajiban yang wajib dibayar serta bersifat sebagai dana darurat. Hutang jangka pendek mempunyai jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Pada ilmu akuntansi, hutang jangka pendek lazim disebut sebagai liabilitas lancar. Pada dunia bisnis, tambahan dana dari hutang biasa dilaksanakan oleh pemilik bisnis perusahaan kecil, menengah maupun besar. Dalam rangka pelunasan kewajiban perusahaan, hal pertama yang mau diperbuat dengan melaksanakan perhitungan atas kepemilikan aktiva atau aset perusahaan. Pada waktu pemilik bisnis tidak bisa melakukan pelunasan hutangnya, maka perusahaan akan membuat kebijakan untuk memotong dividen atas keuntungan dari pemilik/investor.

1.2 Ciri-Ciri Hutang Jangka Pendek

Pinjaman/hutang jangka pendek (Harmadji, 2020) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban suatu hutang/pinjaman yang wajib cepat dibayar dan transaksi tersebut sudah mempunyai perjanjian di kedua belah pihak antara pemberi hutang (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).
2. Timbulnya nominal kewajiban hutang jangka pendek yang harus dibayar.

Setiap pengusaha/pebisnis penting untuk membuat perhitungan dana kepemilikan atau rincian modal usaha, dan juga menyusun kebijakan apa yang harus diambil, serta wajib menyertakan rincian keuangan dengan rapi. Bila sibuk mengurus sebuah bisnis dan tidak dapat melakukan

pembukuan, maka diperlukan seorang yang kompeten untuk melakukan pengendalian pengeluaran dan pemasukan uang usaha yang meliputi layanan jasa pembukuan yang professional untuk membereskan laporan keuangan dan mengontrol uang masuk serta keluar, pembukuan laba rugi, arus kas, serta membuat perhitungan atau pelaporan pajak dengan lebih mudah.

1.3 Jenis dan Pencatatan Hutang Jangka Pendek

Beberapa jenis hutang jangka pendek yang akan mendukung besarnya tambahan dana untuk kegiatan operasional perusahaan (Sinarwati *et al.*, 2013), seperti :

1.3.1 Hutang Dagang (*Account Payable*)

Secara spesifik hutang dagang adalah suatu jenis pinjaman yang wajib dilunasi dalam jangka waktu yang singkat, biasanya pinjaman ini muncul pada saat pebisnis melaksanakan kredit atas sebuah barang dan jasa yang bisa dijual kembali kepada konsumen (Fadzil *et al.*, 2005). Contohnya pencatatan hutang dagang atas barang yang dalam perjalanan harus memiliki syarat dalam pengiriman (Kieso *et al.*, 2017), yaitu seperti:

Pembelian (Dr)	xxx
Hutang dagang (Cr)	xxx

Jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier, maka pengakuannya pada tanggal penyerahan barang/ penyelesaian jasa. Dasar mencatat pengakuan tersebut adalah faktur pembelian dan Perjanjian pembelian. Misal 2/10, n/30 artinya pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari, jangka waktu kredit 30 hari.

Ilustrasi Hutang Dagang: PT. Badu tanggal 1 Nopember 2018 membeli peralatan secara kredit sebesar Rp 20.000.000. Syarat pembelian 2/10, n/30.

Jawaban:

Jurnalnya:

1 Nopember 2018

Persediaan (Dr)	Rp. 20.000.000
Hutang Dagang (Cr)	Rp. 20.000.000

Jika dilunasi 10 Nopember 2018

Hutang Dagang (Dr)	Rp. 20.000.000
Kas (Cr)	Rp. 19.600.000
Potongan pembelian (Cr)	Rp. 400.000

Jika dilunasi 15 Nopember 2018

Hutang Dagang (Dr)	Rp. 20.000.000
Kas (Cr)	Rp. 20.000.000

1.3.2 Hutang Wesel (*Notes Payable*)

Hutang wesel atau disebut juga wesel bayar merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Wesel bayar diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian. Wesel bayar bisa bersifat jangka pendek atau panjang serta seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga, maka diterbitkan dengan diskon.

Hutang wesel adalah surat pembayaran yang bisa dicairkan/diuangkan dan menjadi sebuah jaminan atas pinjaman. Cara tersebut biasanya dilakukan oleh pemilik usaha secara tertulis atas pembelian barang atau jasa, tetapi tidak dicantumkan sebagai syarat dalam pinjaman yang diberikan (Kieso et al., 2017). Sebagai contoh pencatatannya yaitu :

Pembelian (Dr)	xxx
Hutang wesel (Cr)	xxx

Contoh Hutang Wesel atau Wesel Bayar (*Promissory Note*)

Promissory note

For value received, the undersigned promises to pay to the order of BancZone, Inc.

the sum of: *****Ten-Thousand and no/100 Dollars*****

Along with annual interest of 8% on the unpaid balance. This note shall mature and be payable, along with accrued interest, on June 30, 20X8.

January 1, 20X8
Issue Date

Olivia Zavala
Maker signature

Gambar 1. Hutang Wesel atau Wesel Bayar (*Promissory Note*)
Sumber: (Martani, 2016)

Contoh soal Wesel Bayar (Hutang Wesel):

PT. Badu melunasi utang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2018 dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari, bunga 12%.

Jawaban:

Jurnalnya:

1 Desember 2018

Hutang Dagang (Dr)	Rp. 20.000.000
Wesel Bayar (Cr)	Rp. 20.000.000

31 Desember 2018 – perhitungan bunga ($30/360 \times 12\% \times \text{Rp. 20.000.000} = \text{Rp. 200.000}$)

Beban Bunga (Dr)	Rp. 200.000
Utang Bunga (Cr)	Rp. 200.000

Wesel dilunasi 1 Maret 2019 ($60/360 \times 12\% \times \text{Rp. 20.000.000} = \text{Rp. 400.000}$)

Wesel Bayar (Dr)	Rp. 10.000.000
Utang Bunga (Dr)	Rp. 400.000
Beban Bunga (Dr)	Rp. 200.000
Kas (Cr)	Rp. 10.600.000

Soal Wesel Bayar Tanpa Bunga:

PT. Badu melunasi hutang dagang sebesar Rp 20.000.000 pada 1 Desember 2018 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar Rp. 22.400.000, jangka waktu 360 hari, tanpa bunga. Hitung Effective interest rate adalah 12%.

Jawaban:

Jurnalnya:

Tanggal 1 Desember 2018 :

Utang Dagang (Dr)	Rp. 20.000.000
Wesel Bayar (Cr)	Rp. 20.000.000

Tanggal 31 Desember 2018 :

Bunga ($30/360 \times 12\% \times 20.000.000$)

Beban Bunga (Dr)	Rp. 200.000
Wesel Bayar (Cr)	Rp. 200.000

Wesel dilunasi 1 Desember 2019

Beban Bunga (Dr)	Rp. 2.200.000 *)
Wesel Bayar (Cr)	2.200.000
Wesel bayar (Dr)	Rp. 22.400.000
Kas (Cr)	22.400.000*)

Beban Bunga tgl 1 Jan sd 1 Des 2019 = 11 bulan X Rp. 200.000 = Rp. 2.200.000

1.3.3 Hutang Dividen

Dividen adalah keuntungan secara khusus yang diberikan oleh pebisnis/pengusaha kepada para investor ketika dana tersebut telah diinvestasikan ke dalam perusahaan. Dividen juga tidak selalu dibayar dengan uang maupun aset, tetapi juga dalam bentuk saham. Sifat dividen disebut sebagai hutang karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan sebagian keuntungan yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang saham. Hutang dividen ini juga muncul dan dihitung pada waktu pembagian dividen, sehingga disebut sebagai hutang jangka pendek karena pembayaran tersebut tidak lebih dari 1 (satu) tahun (Krismiaji & Surifah, 2018).

Hutang dividen diakui pada saat pengumuman dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham . Hutang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Dividen saham tidak dicatat oleh penerima dan tidak ada pengakuan utang. Dividen saham akan dicatat dengan mereklasifikasikan saldo laba ke modal /agio saham.

Contoh hutang jangka pendek dari segi pencatatan hutang dividen yang akan dibayarkan dalam bentuk uang atau aktiva dapat dilakukan jurnal berikut :

Laba tidak dibagi (Dr)	xxx
Hutang dividen (Cr)	xxx

1.3.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan keseluruhan nilai penjualan barang atau jasa yang diperoleh lebih dahulu oleh pemilik usaha, tapi belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen (Lim et al., 2016). Selain itu, pendapatan diterima di muka juga belum dikatakan sebagai pendapatan dari pembeli karena termasuk hutang jangka pendek. Seperti contoh hutang jangka pendek pada pendapatan diterima di muka yaitu pembayaran atas langganan majalah atau koran dalam periode tertentu oleh pelanggan (Martani, 2016). Jurnalnya berikut:

Kas (Dr)	xxx
Pendapatan diterima dimuka (Cr)	xxx

1.3.5 Hutang Biaya (Biaya Yang Masih Harus Dibayar)

Hutang biaya adalah sebuah pengeluaran yang sering dilaksanakan oleh pemilik bisnis dan telah tercatat sebagai beban (IAI, 2021). Tapi hutang tersebut biasanya akan dibayarkan sebagai alasan tanggal jatuh tempo yang masih jauh. Hutang biaya ini juga termasuk hutang jangka pendek karena pelunasannya kurang dari satu (1) tahun dan dapat diakui sebagai biaya perusahaan yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan (Accountants, 2019). Contoh hutang jangka pendek

atas hutang biaya seperti biaya gaji, listrik, telepon, komisi dan sebagainya. Jurnalnya sebagai berikut:

Biaya Gaji dan upah (Dr)	xxx
Hutang gaji dan upah (Cr)	xxx

1.3.6 Dana Pihak Ketiga (Hutang Pajak)

Pihak perusahaan atau pihak pemerintah melakukan penggalangan dana disebut sebagai dana pihak ketiga. Dana ini juga termasuk hutang jangka pendek seperti contohnya pemotongan gaji karyawan dalam keperluan kegiatan dan kepentingan sosial, hingga termasuk jaminan serta pajak yang disetorkan kepada otoritas pajak.

Dari segi pencatatan dana pihak ketiga yang akan dibayarkan dalam bentuk uang atau aktiva dapat dilakukan secara :

Kas (Dr)	xxx
Penjualan (Cr)	xxx
Hutang PPN (Cr)	xxx

1.3.7 Hutang Jangka Pendek yang Jatuh Tempo Dalam Periode Tersebut

Hutang jangka pendek yang jatuh tempo dalam periode 1 (satu) tahun biasanya adalah hutang obligasi dan hutang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo ketika pelunasannya dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Berbeda dengan bagian hutang lainnya yang belum jatuh tempo, tetap dilaporkan menjadi hutang jangka panjang. Jurnalnya sebagai berikut:

Biaya bunga obligasi (Dr)	xxx
Hutang obligasi (Cr)	xxx

1.3.8 Hutang Bank Jangka Pendek

Hutang bank jangka pendek digolongkan hutang/liabilitas jangka pendek, maka dilakukan pencatatan hampir sama dengan hutang wesel bayar serta memiliki bunga yang harus dibayar. Biaya transaksi menambah nilai hutang dan provisi akan mengurangi nilai hutang. Tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif dan tarif bunga efektif digunakan menghitung bunga. Hal ini akan mempengaruhi tarif bunga efektif. Beban bunga hutang ini bisa dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 2. Perhitungan Beban Bunga Hutang Bank Jangka Pendek

Sumber: (Martani, 2016)

Contoh soal: PT. Badu pada 1 Oktober 2018 menerima hutang dari Bank BRI sebesar Rp 100.000.000 dipotong provisi 4%. Tingkat suku bunga sebesar 15%. Bunga dan pokok dibayar saat jatuh tempo. Perhitungan bunga efektif (Effective Interest Rate) adalah 19,79%.

1 Oktober 2018

Kas (Dr)	Rp. 96.000.000
Hutang Bank (Cr)	Rp. 96.000.000

31 Desember 2018

Perhitungan bunga ($3/12 \times 19,79\% \times \text{Rp. } 96.000.000 = \text{Rp. } 4.750.000$)

Beban Bunga (Dr) 4.750.000

Utang Bunga (Cr) Rp. 4.750.000

Hutang Bank dilunasi 1 Oktober 2019

Beban Bunga (Dr) Rp. 14.250.000

Utang Bunga (Dr) Rp. 4.750.000

Utang Bank (Dr) Rp. 96.000.000

Kas (Cr) Rp. 115.000.000

1.3.9 Liabilitas Jangka Panjang yang akan Jatuh Tempo periode berikutnya (*Current portion of longterm liability*)

Hutang/Liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi periode berikutnya diklasifikasikan menjadi hutang/liabilitas jangka pendek kecuali:

- ◆ Dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar
- ◆ Dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru.
- ◆ Dikonversi menjadi saham

Liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Entitas harus menunjukkan kemampuan untuk melengkapi proses pembiayaan ulang, dengan ketentuan:

- ◆ Hutang tersebut dibiayai ulang sebelum laporan keuangan diluncurkan, atau
- ◆ Entitas menandatangani perjanjian pebiayaan ulang

1.3.10 Hutang/ Liabilitas Jangka Pendek Dibiayai Kembali

Memiliki persyaratan berikut:

- a. Hutang/Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai hutang/liabilitas

jangka pendek, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali.

- b. Pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek, meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan tetapi persetujuan tersebut diperoleh setelah tanggal pelaporan.

1.4 Pelaporan dan Pengungkapan Hutang Jangka Pendek

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, meliputi; neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (arus kas, atau arus dana, catatan, dan laporan lain) serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi. Tujuan dari laporan keuangan yaitu mengontribusi informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang disediakan untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Pelaporan dan Pengungkapan Hutang Bersyarat (*Contingent Liability*)

Contingent Liability atau Hutang Bersyarat merupakan hutang yang memiliki probabilitas tiba pada peristiwa dan waktu yang tidak menentu. Hutang bersyarat ini dilakukan pencatatan apabila jumlahnya bisa ditaksir dengan wajar. Hutang bersyarat ini bisa dicatat pada catatan kaki di laporan keuangan, kecuali terdapat kondisi yang tidak terpenuhi.

Hutang/Liabilitas kontijensi yang tidak memenuhi kriteria sebagai provisi diklasifikasikan sebagai hutang/liabilitas

kontijensi. Hutang/Liabilitas kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan dan hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Keberasaan liabilitas kontijensi harus dievaluasi apakah berubah : (a) menjadi provisi karena menjadi probable dan dapat diukur dengan andal; atau (b) Menjadi kemungkinan kecil sehingga tidak perlu diungkapkan.

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

1.5.1 Memahami Utang Bersyarat

Tuntutan hukum dan jaminan produk yang tertunda merupakan beberapa contoh hutang bersyarat yang umum. Hal ini disebabkan jumlah *monetary* (Rupiah atau Dollar atau mata uang lainnya) yang tidak pasti. Aturan-aturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 menyebutkan bahwa pelaporan hutang bersyarat ini berbeda, tergantung pada estimasi jumlah *monetary* kewajiban atau hutang dan kemungkinan yang terjadi. Aturan dalam SAK ini menjamin pembaca laporan keuangan memperoleh informasi yang lengkap.

1.5.2 Contoh Hutang Bersyarat

Misalkan suatu perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan pesaing karena pelanggaran hak cipta. Divisi hukum perusahaan beranggapan bahwa perusahaan saingan memiliki kasus yang kuat dan memperkirakan akan mengalami kerugian 2 juta dolar jika perusahaan kalah dalam kasus tersebut. Karena utang itu mudah diperkirakan, perusahaan mencatat pembukuan akuntansi di neraca pada bagian debit biaya hukum sebesar 2 juta dolar dan bagian kredit biaya yang harus dibayar sebesar 2 juta dolar.

Basis akrual memungkinkan perusahaan untuk langsung mencatat biaya pengeluaran tanpa perlu melakukan pembayaran tunai. Jika tuntutan hukum ini membuat kerugian, debit diterapkan sebagai hutang atau akun yang akan dibayar dan tunai yang dikredit sebesar 2 juta dolar.

Sekarang, asumsikan bahwa tuntutan utang ini tepat namun tidak memungkinkan dan jumlah dolar yang diperkirakan sekitar 2 juta dolar. Dalam keadaan ini, perusahaan memperlihatkan utang bersyaratnya pada catatan kaki laporan keuangan. Jika perusahaan memastikan bahwa kemungkinan munculnya utang itu kecil maka perusahaan tidak perlu memperlihatkan potensi utangnya.

1.5.3 Perhitungan Khusus

Garansi/jaminan atas produk perusahaan (produsen) adalah contoh hutang bersyarat umum lainnya karena jumlah produk yang dikembalikan berdasarkan garansi yang tidak bisa dipastikan. Contohnya produsen sepeda memberi garansi pada kursi sepeda 3 tahun, dengan biaya 50 dolar. Jika perusahaan memproduksi 1.000 kursi sepeda dalam setahun dan memberi garansi per kursi, perusahaan tersebut perlu memperkirakan jumlah kursi yang mungkin dikembalikan berdasarkan garansi setiap tahunnya.

Dimisalkan bila perusahaan memperkirakan 200 kursi sepeda diganti berdasarkan garansi sebesar 50 dolar, perusahaan mencatat debit ke beban jaminan sebesar 10.000 dolar dan kredit hutang bersyarat yang harus dibayar sebesar 10.000 dolar. Pada akhir tahun, laporan tersebut dilakukan penyesuaian dengan biaya jaminan yang sebenarnya.

1.5.4 Tujuan & Ruang Lingkup PSAK 57

PSAK 57 (IAS 37) ini bertujuan untuk mengatur:

- ◆ pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi
- ◆ untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CaLK

Hal-hal tersebut bertujuan supaya para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. PSAK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya, kecuali yang timbul dari: (a) kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan (onerous); (b) hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain. Contoh: PSAK

34; 46; 30; 24; 28; 36. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan (termasuk garansi) yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

- a. Definisi kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama.

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomis yang akan diterima dari kontrak tersebut.

Kontrak memberatkan jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. (PSAK 57 par 66).

- b. Definisi Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Provisi diakui jika:

- (i) Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu;
- (ii) Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas:
 - ◆ Setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia,
 - ◆ Terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa: kewajiban kini telah ada dan pada akhir periode pelaporan.

Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia:

- (a) Besar kemungkinannya bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengakui provisi (jika kriteria pengakuan terpenuhi);

- (b) Jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontinjensi.
- (c) Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban hukum pengakuan provisi timbul dari:

- (a) Suatu kontrak (secara eksplisit atau implisit);
- (b) Peraturan perundangundangan; atau
- (c) Pelaksanaan produk hukum lainnya

Kewajiban konstruktif pengakuan provisi adalah:

- (a) Berdasarkan praktik baku masa lalu, dan
- (b) Menimbulkan ekspektasi kuat bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang (yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang) yang biasa disebut "*Independent of future actions*"

Contoh:

- Denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang.
- Biaya kegiatan purna-operasi (decommissioning) instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan.
- Ketika terjadi kerusakan lingkungan, entitas tidak terikat untuk menanggulangnya. Akan tetapi, perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada saat terbit peraturan perundangundangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat entitas mengumumkan secara terbuka untuk menanggulangi

kerusakan tersebut sehingga menimbulkan kewajiban konstruktif.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa (misalnya garansi atau jaminan produk, atau kontrak-kontrak serupa), ♦ kemungkinan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban.

(a) Estimasi pengukuran provisi yang terbaik adalah:

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. (par 36).

(b) Risiko dan Ketidakpastian

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. (par 42).

(c) Nilai Kini

Jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. (par 45).

(d) Peristiwa Masa Depan

Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti obyektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. (PSAK 57 par 48).

(e) Rencana Pelepasan Aset

Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi (PSAK 57 par 51).

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka:

- ♦ Penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya.
- ♦ Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah.

- ◆ Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.
- ◆ Dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai pengantiannya.

Perubahan dan penggunaan provisi wajib ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dengan cara melakukan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. (PSAK 57 par 59).

Jika kewajiban diestimasi didiskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman (PSAK 57 par 60) atau unwinding of the discount.

Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. (PSAK 57 par 61)

- c. Definisi Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

1.5.5 Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah:

- (a) Lingkup kegiatan usaha suatu entitas; atau
- (b) Cara mengelola usaha tersebut.

Contoh restrukturisasi adalah:

- (a) Penjualan atau penghentian suatu lini usaha;
- (b) Penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan ke negara atau kawasan lain;

- (c) Perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen; dan
- (d) Reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas.

Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika entitas memiliki rencana formal yang rinci dan menciptakan ekspektasi yang valid pada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi (rinci, lihat PSAK 57 par 72).

Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu yang memenuhi kedua persyaratan berikut ini:

- (a) Benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi; dan
- (b) Tidak terkait dengan aktivitas yang masih berlangsung pada entitas

1.5.6 Pengungkapan

Untuk setiap jenis provisi, entitas harus mengungkapkan (Martani, 2016):

- (a) Nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
- (b) Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah pada provisi yang ada;
- (c) Jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan;
- (d) Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode bersangkutan;
- (e) Peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto.

Entitas juga harus mengungkapkan pula:

- (a) Uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi;
- (b) Indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, entitas harus mengungkapkan

asumsi utama yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan

- (c) Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut.

Contoh 1:

PT. Dewi menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu dua tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan.

Jawaban:

Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Penjualan produk dengan jaminan, yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan (paragraf 24). Simpulan. Entitas harus mengakui kewajiban provisi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan dan/atau penggantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan (par 14 dan 24).

Contoh 2:

PT. Semangat bergerak pada industri minyak melakukan pencemaran lingkungan, tetapi perusahaan melakukan pembersihan atas pencemaran tersebut hanya sebatas diwajibkan oleh peraturan. Salah satu negara tempat entitas tersebut beroperasi tidak memiliki peraturan yang mengatur tentang pembersihan atas pencemaran lingkungan, dan entitas tersebut telah melakukan pencemaran di negara tersebut selama beberapa tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020 dapat dipastikan bahwa RUU yang mewajibkan pembersihan tanah yang dicemarkan akan diberlakukan segera setelah akhir tahun.

Jawaban:

1. Peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah karena dapat dipastikan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan mengharuskan pembersihan atas pencemaran lingkungan.
2. Terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini (keluarnya sumber daya) akan terjadi.
3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan.

Contoh 3:

PT. Maju perusahaan ritel yang mempunyai kebijakan mengembalikan uang pembelian dari pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum yang mengharuskan entitas untuk mengembalikan uang konsumen.

Jawaban:

1. Peristiwa mengikat adalah peristiwa penjualan produk, yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan entitas telah menciptakan ekspektasi yang valid bagi pembeli bahwa entitas akan mengembalikan uang mereka.
2. Terdapat kemungkinan besar keluarnya sumber daya, yaitu sebagian barang akan dikembalikan dan perusahaan mengembalikan uang pelanggan (par 24)
3. Perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik dari biaya pengembalian (lihat paragraf 10 (definisi kewajiban konstruktif), 14, 17 dan 24.

Contoh 4:

Pemerintah mengumumkan perubahan dalam peraturan Pajak Penghasilan. Akibatnya, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan harus melakukan pelatihan ulang terhadap sejumlah besar pegawai penjualan dan administrasi agar dapat terus memenuhi peraturan yang berlaku di bidang jasa keuangan. Pada akhir periode pelaporan, pelatihan ulang terhadap karyawan belum dilakukan.

Jawaban:

1. Belum timbul kewajiban karena peristiwa yang mengikat (yaitu pelatihan ulang) belum terjadi.
2. Provisi tidak diakui (par 14 dan 17-19).

DAFTAR PUSTAKA

- Accountants, C. L. M. T. I. of C. 2019. *IFRS (International Financial Reporting Standards)*. England and Wales.
- Fadzil, F. H., Haron, H., & Jantan, M. 2005. Internal auditing practices and internal control system. In *Managerial Auditing Journal* (Vol. 20, Issue 8, pp. 844–866). <https://doi.org/10.1108/02686900510619683>
- Harmadji, D. E. 2020. *Latihan Soal dan Jawaban Akuntansi Keuangan Menengah* (1st ed.). Eduvation, Jombang.
- IAI, D. S. A. K. 2021. *Standar Akuntansi Keuangan*.
- Kieso, Weygandt, & Walfield. 2017. *Intermediate Accounting* (IFRS Editi). John Wiley & Sons, Inc.: New York.
- Krismiaji, & Surifah. 2018. *Akuntansi Keuangan Menengah* (1st ed.). Yogyakarta: UPP STIM AMP.
- Lim, H., Kang, S. K., & Kim, H. 2016. Auditor Quality, IFRS Adoption, and Stock Price Crash Risk: Korean Evidence. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(9), 2100–2114. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1184142>
- Martani, D. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sinarwati, N. K., Herwati, N. T., Darmawan, N. A. S., & Ekawati, L. P. (2013). *Akuntansi Keuangan 1* (1st ed.). Singaraja, Bali: Undiksha Press.
- Utama, C. A. 2013. Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence. *International Journal of Disclosure and Governance Advance Online Publication*, 11(4), 341–365. <https://doi.org/10.1057/jdg.2013.23>
- <https://www.harmony.co.id/blog/hutang-jangka-pendek-apa-saja-jenisnya-dan-bagaimana-mencatatnya-dalam-pembukuan> diunduh pada tanggal 25 April 2022 pukul 07.00 WIB
- https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/172/mod_resource/content/0/AK2%20Pertemuan%201%20Liabilitas%20jangka%20Pendek.pdf diunduh pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 08.05 WIB.

BAB 2

PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENCATATAN, PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN HUTANG OBLIGASI

Oleh Amelia Rizky Alamanda

2.1 Definisi Hutang Obligasi

Kewajiban tidak lancar (kadang-kadang disebut sebagai hutang jangka panjang) terdiri dari: arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak terutang dalam satu tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih panjang. Obligasi hutang jangka panjang, hutang wesel, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa adalah contoh tidak lancar kewajiban. Korporasi, menurut anggaran rumah tangganya, biasanya memerlukan persetujuan dewan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau wesel dapat diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk yang lain jenis pengaturan utang jangka panjang. Umumnya, utang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan yang melindungi keduanya pemberi pinjaman dan peminjam. *Indenture* atau perjanjian sering kali mencakup jumlah yang diotorisasi diterbitkan, bunga tarif, tanggal jatuh tempo, ketentuan panggilan, Properti berjanji sebagai secu, kebutuhan dana pelunasan, pembatasan modal kerja dan dividen, dan keterbatasan tentang asumsi tambahan utang. Perusahaan harus menggambarkan ini fitur dalam tubuh laporan keuangan atau catatan jika penting untuk melengkapi pemahaman posisi keuangan dan hasil operasi. Meskipun tampaknya perjanjian-perjanjian ini memberikan perlindungan yang memadai bagi pemegang utang jangka panjang, banyak pemegang obligasi menderita kerugian yang cukup besar ketika perusahaan menambahkan lebih banyak utang ke struktur modal. Pertimbangkan apa yang bisa terjadi pada pemegang

obligasi di *Leveraged Buyouts* (LBOs), yang biasanya dipimpin oleh manajemen. Dalam LBO dari RJR Nabisco (AS), misalnya, diberi peringkat 9/persen obligasi jatuh tempo pada tahun 2016 anjlok Nilai 20 persen ketika manajemen mengumumkan pembelian dengan leverage. Kerugian seperti itu di nilai terjadi karena hutang tambahan yang ditambahkan ke struktur modal meningkatkan kemungkinan default. Meskipun perjanjian melindungi pemegang obligasi, mereka masih bisa menderita kerugian ketika tingkat utang menjadi terlalu tinggi.

2.2 Penerbitan Hutang Obligasi

Indenture obligasi merupakan suatu jenis obligasi yang timbul karena adanya suatu kontrak, juga merupakan suatu janji untuk melakukan pembayaran: (a) sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan pada saat tanggal jatuh tempo obligasi, yang kemudian ditambah dengan (b) bunga periodik pada suatu besaran tertentu atas jumlah yang telah jatuh tempo atau yang biasa disebut sebagai nilai nominal. Obligasi yang beredar biasanya bernilai \$1,000, sedangkan untuk pembayaran bunga obligasi biasanya dilakukan secara *annually*, atau setengah tahunan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut, meski suku bunga yang ada biasanya dinyatakan secara tahunan. Tujuan utama dari penerbitan obligasi oleh perusahaan adalah sebagai wadah pinjaman jangka panjang bila ternyata modal yang diperlukan oleh perusahaan terlalu besar jika hanya ditopang oleh satu orang yang memberikan pinjaman saja.

2.3 Tipe Hutang Obligasi

Berikut merupakan jenis-jenis obligasi yang beredar, yaitu:

- Obligasi yang berjaminan dan obligasi yang tanpa jaminan
- Obligasi yang berjangka, obligasi yang berseri, serta obligasi yang dapat ditebus
- Obligasi yang terdaftar dan obligasi atas tunjuk atau biasa disebut kupon
- Obligasi konvertibel, obligasi yang didukung oleh komoditas, serta dengan diskonto yang besar

- Obligasi laba dan obligasi pendapatan

2.4 Penilaian Hutang Obligasi

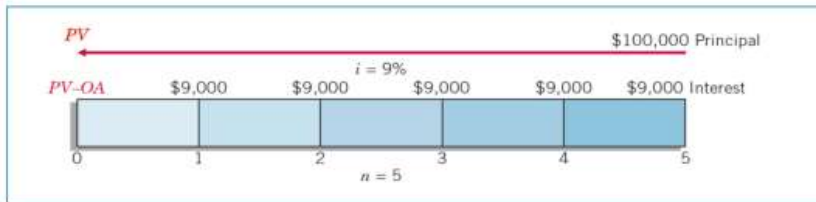
Penerbitan dan pemasaran obligasi sebuah perusahaan kepada publik memerlukan waktu lebih dari satu hari, biasanya butuh sekitar beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Awalnya, perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus mendapat beberapa orang yang akan menjadi penanggung atau underwriter yang tugasnya membantu pemasaran serta penjualan obligasi. Kemudian harus memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang, audit, serta penerbitan prospektus. Prospektus merupakan suatu dokumen yang isinya menjelaskan fitur dari obligasi serta informasi keuangan dari perusahaan yang telah diaudit. Terakhir, perusahaan juga harus mencetak sertifikat obligasi yang kemudian akan dipasarkan ke publik. Penetapan harga jual dari obligasi yang dipasarkan didasarkan atas beberapa faktor, seperti permintaan dan penawaran obligasi, kondisi dari pasar yang memperjual belikan obligasi, risiko relatif dari obligasi, juga kondisi perekonomian pada saat penjualan obligasi.

Publik melakukan penilaian terhadap obligasi yang dipasarkan pada nilai sekarang atau present value dari arus kas pada masa mendatang, yang terdiri atas bunga dan pokoknya. Suku bunga yang tertulis pada persyaratan indenture obligasi biasa disebut sebagai suku bunga yang ditetapkan, kupon, ataupun nominasi. Adanya penetapan suku bunga ini oleh penerbit, dinyatakan sebagai suatu presentase dari nilai nominal yang kemudian bisa disebut sebagai par value atau nilai par dari suatu obligasi, principal amount atau jumlah pokok dari obligasi, atau maturity value atau nilai jatuh tempo obligasi. (*Stated rate x Face Value of the bond*) merupakan rumus dalam menghitung jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik obligasi. Sedangkan (*Market rate x Carrying Value of the bond*) digunakan untuk menghitung jumlah bunga yang dicatat sebagai beban bunga bagi perusahaan yang mengeluarkan obligasi.

2.5 Penerbitan Obligasi menggunakan Nilai Par

Ilustrasi:

PT Wika Indonesia menerbitkan obligasi yang memiliki jangka waktu 5 tahun dengan nilai pari sebesar \$100,000, serta suku bunga tahunan sebesar 9%, tertanggal 1 Januari 2019. Pada saat penerbitan obligasi ini, tingkat bunga pasar untuk obligasi sebesar 9%.



Present value of the principal:	
$\$100,000 \times .64993$ (Table 6-2)	\$ 64,993
Present value of the interest payments:	
$\$9,000 \times 3.88965$ (Table 6-4)	<u>35,007</u>
Present value (selling price) of the bonds	<u><u>\$100,000</u></u>

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat penerbitan obligasi adalah sebagai berikut:

Kas	100,000
Hutang Obligasi	100,000

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui adanya hutang bunga adalah sebagai berikut:

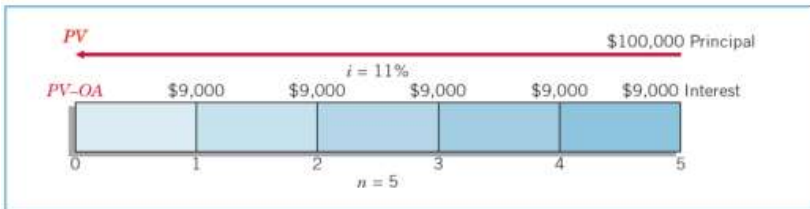
Beban Bunga Obligasi	9,000
Hutang Bunga Obligasi	9,000

Jurnal yang dibuat perusahaan untuk mencatat pembayaran yang pertama adalah sebagai berikut:

Hutang Bunga Obligasi Bond	9,000
Kas	9,000

2.6 Penerbitan Obligasi dengan Diskon atau Premium

Asumsikan sekarang PT Wika Indonesia menerbitkan obligasi dengan nilai pari sebesar \$100,000, berjangka waktu 5 tahun, dengan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Pada saat diterbitkan, tingkat bunga pasar untuk obligasi sebesar 11%.



Present value of the principal:	
\$100,000 × .59345 (Table 6-2)	\$59,345.00
Present value of the interest payments:	
\$9,000 × 3.69590 (Table 6-4)	<u>33,263.10</u>
Present value (selling price) of the bonds	<u><u>\$92,608.10</u></u>

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat penerbitan obligasi adalah sebagai berikut:

Kas	92,608
Hutang Obligasi	92,608

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui adanya hutang bunga adalah sebagai berikut:

Beban Bunga Obligasi	10,187
Hutang Bunga Obligasi	9,000
Hutang Obligasi	1,187

Jurnal yang dibuat perusahaan untuk mencatat pembayaran yang pertama adalah sebagai berikut:

Hutang Bunga Obligasi	9,000
Kas	9,000

2.7 Penerbitan Obligasi dengan Metode Bunga Efektif

Metode ini menghasilkan beban bunga periodik yang nilainya sama dengan presentase konstan dari nilai yang tercantum dalam obligasi yang diterbitkan.

2.8 Penerbitan Obligasi dengan Nilai Diskon

PT Wika Indonesia menerbitkan obligasi dengan nilai pari sebesar \$100,000, tingkat bunga sebesar 8% pada 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2020, dengan utang bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Investor memerlukan tingkat bunga efektif sebesar 10%. Hitunglah proses obligasi.

Maturity value of bonds payable	€100,000
Present value of €100,000 due in 5 years at 10%, interest payable semiannually (Table 6-2); $FV(PVF_{10,5\%})$; $(€100,000 \times .61391)$	€61,391
Present value of €4,000 interest payable semiannually for 5 years at 10% annually (Table 6-4); $R(PVF-OA_{10,5\%})$; $(€4,000 \times 7.72173)$	30,887
Proceeds from sale of bonds	(92,278)
Discount on bonds payable	€ 7,722

SCHEDULE OF BOND DISCOUNT AMORTIZATION				
EFFECTIVE-INTEREST METHOD — SEMIANNUAL INTEREST PAYMENTS				
5-YEAR, 8% BONDS SOLD TO YIELD 10%				
Date	Cash Paid	Interest Expense	Discount Amortized	Carrying Amount of Bonds
1/1/15				€ 92,278
7/1/15	€ 4,000 ^a	€ 4,614 ^b	€ 614 ^c	92,892 ^d
1/1/16	4,000	4,645	645	93,537
7/1/16	4,000	4,677	677	94,214
1/1/17	4,000	4,711	711	94,925
7/1/17	4,000	4,746	746	95,671
1/1/18	4,000	4,783	783	96,454
7/1/18	4,000	4,823	823	97,277
1/1/19	4,000	4,864	864	98,141
7/1/19	4,000	4,907	907	99,048
1/1/20	4,000	4,952	952	100,000
	€40,000	€47,722	€7,722	
^a €4,000 = €100,000 × .08 × 6/12 ^b €4,614 = €92,278 × .10 × 6/12 ^c €614 = €4,614 – €4,000 ^d €92,892 = €92,278 + €614				

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat penerbitan tanggal 1 Januari 2015

obligasi adalah sebagai berikut:

Kas 92,278

Hutang Obligasi 92,278

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui pembayaran pertama dan amortisasi dari diskon pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Beban Bunga Obligasi	4,614
Hutang Obligasi	614
Kas	4,000

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui adanya bunga dan amortisasi dari diskon adalah sebagai berikut:

Beban Bunga Obligasi	4,645
Hutang Bunga Obligasi	4,000
Hutang Obligasi	645

2.9 Penerbitan Obligasi dengan Nilai Premi

PT Wika Indonesia menerbitkan obligasi dengan nilai pari sebesar \$100,000, tingkat bunga sebesar 8% pada 1 Januari 2015 sampai 1 Januari 2020, dengan utang bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli. Investor memerlukan tingkat bunga efektif sebesar 6%. Hitunglah proses obligasi.

Maturity value of bonds payable		€100,000
Present value of €100,000 due in 5 years at 6%, interest payable semiannually (Table 6-2); $FV(PVF_{10,3\%})$; $(€100,000 \times .74409)$	€74,409	
Present value of €4,000 interest payable semiannually for 5 years at 6% annually (Table 6-4); $R(PVF-OA_{10,3\%})$; $(€4,000 \times 8.53020)$	34,121	
Proceeds from sale of bonds		(108,530)
Premium on bonds payable		€ 8,530

SCHEDULE OF BOND PREMIUM AMORTIZATION EFFECTIVE-INTEREST METHOD—SEMIANNUAL INTEREST PAYMENTS 5-YEAR, 8% BONDS SOLD TO YIELD 6%				
Date	Cash Paid	Interest Expense	Premium Amortized	Carrying Amount of Bonds
1/1/15				€108,530
7/1/15	€ 4,000 ^a	€ 3,256 ^b	€ 744 ^c	107,786 ^d
1/1/16	4,000	3,234	766	107,020
7/1/16	4,000	3,211	789	106,231
1/1/17	4,000	3,187	813	105,418
7/1/17	4,000	3,162	838	104,580
1/1/18	4,000	3,137	863	103,717
7/1/18	4,000	3,112	888	102,829
1/1/19	4,000	3,085	915	101,914
7/1/19	4,000	3,057	943	100,971
1/1/20	4,000	3,029	971	100,000
	€40,000	€31,470	€8,530	
^a €4,000 = €100,000 × .08 × 6/12 ^b €3,256 = €108,530 × .06 × 6/12 ^c €744 = €4,000 – €3,256 ^d €107,786 = €108,530 – €744				

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan pada saat penerbitan tanggal 1 Januari 2015 obligasi adalah sebagai berikut:

Kas	108,530
Hutang Obligasi	108,530

Jurnal yang dibuat oleh perusahaan dalam mengakui pembayaran pertama dan amortisasi dari premi pada tanggal 1 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Beban Bunga Obligasi	3,256
Hutang Obligasi	744
Kas	4,000

DAFTAR PUSTAKA

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2020. Intermediate Accounting 4 th Edition: IFRS Edition.

BAB 3

PERHITUNGAN SERTA PELAPORAN MODAL PERUSAHAAN (*STOCKHOLDERS EQUITY*)

Oleh Fice Handayani

3.1 Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan dalam pelaksanaannya (Republik Indonesia, 2007). Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak kepemilikan PT ini terdiri dari saham-saham, di mana adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pemilik dengan harta kekayaan dari PT itu sendiri sehingga hak dan kewajiban pemilik terhadap perusahaan terbatas sampai dengan jumlah modal yang di setorkannya. Karena kepemilikan PT ini terdiri dari saham-saham maka PT memungkinkan untuk mendapatkan modal dari banyak orang dengan menjual saham-saham kepada publik.

Secara karakteristik PT ini dapat dibedakan atas dua macam, yaitu PT Tertutup dan PT Terbuka. Perseroan Terbatas (PT) tertutup yang selanjutnya dikenal dengan PT saja, adalah perseroan yang tidak menjual sahamnya kepada publik, biasanya pemilik saham dari PT ini dari pihak keluarga atau kerabat dekat saja. Untuk PT jenis ini memakai ajuan untuk menyusun laporan keuangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. (PSAK ETAP). Untuk PT yang terbuka, dikenal sebagai PT, Tbk, adalah perseroan yang menerbitkan atau menjual sahamnya di pasar modal sehingga publik. Dapat membelinya dan dalam menyusun laporan keuangannya PT, Tbk, ini memakai PSAK-

IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan *International Financial Report Standard*).

Syarat-syarat formal pembentukan PT yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut (Republik Indonesia, 2007 :

1. Pendiri minimal terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Akta Notaris berbahasa Indonesia.
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.
4. Akta Pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
5. Modal dasar minimum Rp 50.000.000 dan disetor minimal 25% dari modal dasar.
6. Minimal harus memiliki 1 (satu) orang direktur dan 1 (satu) orang komisaris.
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali merupakan Penanaman Modal Asing.

Adapun tahapan-tahapan yang di lakukan untuk memenuhi persyaratan ketentuan diatas adalah sebagai berikut (Republik Indonesia, 2007):

1. Pengajuan nama PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Kementrian Hukum dan HAM.
2. Pembuatan Akta Pendirian yang disahkan di depan notaris.
3. Pengajuan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (PSKPD) di kantor kelurahan setempat.
4. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (PNPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
5. Pengajuan pengesahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM.
6. Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
7. Pengajuan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

3.2 Modal Perusahaan

Pengertian dari ekuitas atau modal perusahaan jika dilihat dari persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang didapat dari pengurangan total aset dengan total kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas adalah adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan tersebut.

Dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) komponen utama dari ekuitas tersebut. terdiri dari :

1. Modal disetor.
2. Saldo laba (laba ditahan).
3. Tambahan modal disetor .

3.2.1 Modal Disetor

Modal disetor merupakan modal saham yang di tempatkan atau disetorkan ke dalam Perseroan Terbatas (PT) atau dengan kata lain modal saham yang telah beredar beredar yakni jumlah saham yang sudah dijual ke masyarakat atau publik. Jumlah modal yang disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan atau disetorkan ke perusahaan (Republik Indonesia, 2007). Jadi pada saat pendirian PT tersebut. kebanyakan pemilik tidak langsung menyetorkan modalnya dalam PT secara keseluruhan. Biasanya menyetorkan secara bertahap dalam PT sampai dengan batas jumlah modal dasar dari PT tersebut. Modal saham yang belum disetorkan dalam PT atau yang belum dijual ke publik biasanya disebut dengan modal saham belum beredar.

Modal saham statuter atau modal dasar perseroan adalah jumlah saham yang dapat di dikeluarkan sesuai dengan akta pendirian perusahaan (Baridwan, 2020). Untuk mendirikan suatu PT maka minimal modal dasar yang harus ada minimal adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Republik Indonesia, 2007).

Modal saham yang beredar atau saham yang dijual ke publik. ini dibagi atas dua jenis, yakni saham biasa (*pccommon stock*) dan saham preferen (*preferen stock*). Untuk pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak istimewa apapun dan pada

waktu pembagian dividen dibagikan setelah pembagian dividen pemegang saham preferen. Dan untuk pemegang saham preferen dalam hal pembagian dividen mereka mendapatkan prioritas dari pada pemegang saham biasa.

3.2.2 Saldo Laba (Laba Ditahan/*Retained Earnings*)

Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010). Laba bersih suatu PT yang diperoleh dalam satu periode akuntansi adalah hak pemegang saham. Apabila dibagikan kepada pemegang saham, disebut dengan dividen, yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap lembar saham mendapatkan pembagian yang sama, misalnya Rp 500/lembar, sehingga semakin banyak lembar saham yang dimiliki maka semakin besar dividen yang diterima.

Saldo laba ini dapat digunakan untuk beberapa tujuan tertentu (Baridwan, 2020):

1. Pembagian dividen.
2. Pembelian *treasury stock*.
3. Pembatasan laba ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu (*pappropriations*).
4. Rekapitalisasi.
5. Penyerapan kerugian.

3.2.3 Tambahan Modal Disetor

Akun Tambahan Modal Disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor dan lain sebagainya (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010 :

- (a) Jumlah uang yang diterima.
- (b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi yang nyata. Untuk jenis saham yang diatur dalam bentuk rupiah dalam akta pendirian setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs berlaku tanggal setoran. Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta pendiriannya, setoran tunai baik rupiah atau mata uang asing lain harus di konversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs resmi yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan merupakan unsur laba rugi.
- (c) Besarnya tagihan yang timbul atau utang yang di konversi menjadi modal.
- (d) Setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
- (e) Nilai wajar aset bukan kas yang diterima.
- (f) Setoran saham dalam bentuk barang (pinbreng), menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui dewan komisaris atau nilai kesepakatan dewan komisaris dan penyeter bentuk barang. Agio saham terjadi jika harga pasar saham di bursa efek lebih tinggi dari pada nilai nominalnya. Dan kelebihan nilai atau nominal tersebut. disebut dengan agio saham (tambahan modal disetor).

Contoh Soal 3.1 Agio Saham

Misal PT Berani Maju menjual saham biasa sebanyak 1000 lembar dengan nilai Rp 1.000,00 per lembarnya dan harga pasar dari saham tersebut. adalah Rp 1.500,00/ lembarnya. Saham ini dijual secara tunai dan terjual semuanya. Maka jurnal dari transaksi tersebut. adalah :

Kas	Rp 1.500.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 1.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 500.000,00

Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas ataupun aset non kas. Dalam penyajiannya tambahan modal disetor ini disajikan dalam bentuk kelompok pos ekuitas.

3.3 Saham Biasa

Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Saham dalam Perseroan Terbatas tersebut di kelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama, yang disebut klasifikasi saham. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Anggaran Dasar Perseroan menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UU No 40 PT, (2007) setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham maka Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa.

Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (pRUPS) mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi (Republik Indonesia, 2007). Jika saham perusahaan yang dikeluarkan cuma satu macam saja maka saham itu selalu saham biasa.

Dikarenakan saham biasa ini mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS maka banyak investor yang menjadikan investasi terhadap saham biasa ini sebagai investasi yang strategis. Apalagi tujuan dari investasinya tersebut adalah jangka panjang dan sebagai pengendali terhadap perusahaan lain.

Apabila suatu perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan maka pemegang saham biasa ini merupakan yang terakhir di dalam mendapatkan pembagian modal. Saham biasa (*common stock*), disebut juga merupakan kepemilikan perusahaan residual (Martani *et al.*, 2016), karena menanggung seluruh resiko kerugian, menerima manfaat terbesar atas sukses perusahaan dan tidak adanya jaminan untuk memperoleh dividen atau pada saat likuidasi hasil penjualan asset.

3.3.1 Penerbitan Saham Biasa

Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah dan saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan atau diterbitkan (Republik Indonesia, 2007). Penentuan besar kecilnya nilai nominal ini bergantung pada masing-masing perusahaan. Umum nya nilai nominal ini lebih rendah daripada harga saham perdana atau harga penerbitan saham. Nilai nominal yang lebih rendah ini menghindari perusahaan untuk menghadapi liabilitas kontinjensi lebih lanjut. Apabila harga saham perdana atau harga penerbitan saham lebih tinggi dari pada nilai nominalnya maka perusahaan akan mencatat timbulnya agio saham.

Contoh Soal 3.2 Penerbitan Saham Biasa

PT Kencana menerbitkan 500.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 400,00 dengan harga Rp 500,00 per lembarnya dan dibayar tunai oleh sejumlah investor. Maka PT Kencana mencatat penerbitan atau penjualan saham tersebut. dengan jurnal sebagai berikut:

Kas	Rp 250.000.000,00
Nominal Saham Biasa	Rp 200.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 50.000.000,00

3.3.2 Penerbitan Saham Biasa dengan Sekuritas Lain (Secara *Lump Sum*)

Terkadang perusahaan menerbitkan saham biasa bersama dengan surat berharga lainnya atau sekuritas lainnya, seperti menerbitkan secara paket (*lump sum*) dimana dalam satu paket terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Penerbitan seperti ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik saham perusahaan, sehingga semakin banyak investor yang bersedia untuk menanamkan dana di perusahaan atau dengan harga yang relatif tinggi.

Dari segi pencatatan akuntansi, terdapat dua cara untuk mengakui dana yang diterima, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Proporsional ; metode ini digunakan bila harga pasar kedua jenis saham diketahui.
2. Metode Inkremental; metode ini digunakan apabila yang diketahui hanya harga pasar salah satu jenis saham saja yang diketahui.

Contoh Soal 3.3 Penerbitan Saham Biasa dengan Sekuritas Lain

PT Jasmin menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp 3.000,00 per lembarnya dan 2.000 lembar saham preferen dengan nominal Rp 5.000,00 per lembarnya. Pada saat penerbitan harga pasar saham biasa adalah Rp 4.000,00 per lembarnya dan harga pasar saham prioritas adalah Rp 6.000,00 per lembarnya. Adapun total dana yang diperoleh atas penerbitan kedua jenis saham ini sebesar Rp 31.000.000,00 . Karena kedua harga pasar saham ini diketahui maka untuk pengalokasian harga terhadap kedua saham ini menggunakan metode proporsional.

Total nominal atas dasar harga pasar kedua jenis saham :

Saham biasa = 5.000 lembar x Rp 4.000,00 = Rp 20.000.000,00

Saham preferen = 2.000 lembar x Rp 6.000,00 =

Rp.12.000.000,00

Rp 32.000.000,00

Karena ada perbedaan antara total uang yang diterima dengan total nilai pasar maka diperlukan alokasi harga yang baru untuk masing-masing kedua saham tersebut. dan karena

harga pasar dari kedua saham tersebut. diketahui maka memakai metode proporsional, dengan perhitungan dan jurnalnya sebagai berikut :

Alokasi dengan metode proporsional :

$$\text{Harga saham biasa} = \frac{4.000}{10.000} \times \text{Rp } 31.000.000,00 = \text{Rp } 12.400.000,00$$

$$\text{Harga saham preferen} = \frac{6.000}{10.000} \times \text{Rp } 31.000.000,00 = \text{Rp } 18.600.000,00$$

Dan jurnalnya adalah sebagai berikut :

Kas	Rp 31.000.000,00
Dis Agio Saham Biasa	Rp 2.600.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 15.000.000,00
Modal Saham preferen	Rp 10.000.000,00
Agio Saham preferen	Rp 8.600.000,00

Karena harga saham biasa di bawah nilai nominalnya yakni Rp 15.000.000,00 (5.000 lembar x Rp 3.000,00) sehingga timbul dis agio saham biasa sebesar Rp 2.600.000,00 (Rp 15.000.000,00 – Rp 12.400.000,00). Dan untuk saham preferen, karena harga saham preferen ini diatas nominalnya yakni Rp 10.000.000,00 (2.000 lembar x Rp 5.000,00) maka timbul agio saham preferen sebesar Rp 8.600.000,00 (Rp 18.600.000,00 – Rp 10.000.000,00).

Jika pada contoh soal diatas yang diketahui cuma harga pasar saham biasa yakni Rp 4.000,00 dan harga pasar untuk saham preferen tidak diketahui, maka penghitungan menggunakan metode inkremental yakni sebagai berikut :

$$\text{Total uang yang diterima} = \text{Rp } 31.000.000,00$$

$$\text{Total harga pasar saham biasa (5.000 lembar x Rp 4.000,00) = Rp } 20.000.000,00 -$$

$$\text{Total harga pasar saham preferen} \quad \text{Rp } 11.000.000,00$$

Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

Kas	Rp 31.000.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 15.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 5.000.000,00

Modal Saham Preferen	Rp 10.000.000,00
Agio Saham Preferen	Rp 1.000.000,00

3.3.3 Penerbitan Secara Non Tunai

Terkadang modal saham yang dikeluarkan tidak selalu dibayar dengan uang tunai, tapi adakalanya dengan menerima pembayaran berupa asset non kas, seperti bangunan, kendaraan, mesin ada juga yang berupa asset tidak berwujud misal nya merek dagang.

Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam bentuk penyerahan asset bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010):

1. Nilai wajar asset/ jasa tersebut. Atau
2. Nilai wajar saham yang bersangkutan, tergantung mana yang lebih jelas.

Contoh Soal 3.4 Saham Biasa yang Diterbitkan dengan Transaksi Aset Selain Kas (Non Tunai)

PT Mawar menerbitkan 50.000 lembar saham dengan nominal Rp 1.000 per lembar dan ditukar dengan mobil pikap.

1. Apabila harga pasar saham tidak diketahui, tetapi harga pasar mobil pikap diketahui sebesar Rp 65.000.000,00, maka jurnalnya adalah :

Mobil pikap	Rp 65.000.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 50.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 15.000.000,00

2. Apabila harga pasar mobil tidak diketahui tapi harga pasar saham diketahui sebesar Rp 1.250,00 per lembarnya, maka jurnalnya adalah :

Mobil pikap	Rp 62.500.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 50.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 12.500.000,00

3. Apabila harga pasar mobil dan saham biasa tidak diketahui dan pimpinan perusahaan menetapkan harga

perolehan mobil pikap sebesar Rp 60.000.000, maka jurnalnya adalah :

Mobil pikap	Rp 60.000.000,00
Modal Saham Biasa	Rp 50.000.000,00
Agio Saham Biasa	Rp 10.000.000,00

3.4 Saham Preferen

Saham preferen (*Preferred stock*) adalah merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik atau fitur tertentu (Martani *et al.*, 2016) seperti :

1. Preferen atau keutamaan dalam pembagian dividen;
2. Preferen atau keutamaan saat pembagian asset;
3. Dapat dikonversikan (*convertible*) menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya;
4. Dapat ditarik Kembali (*callable*), sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan;
5. Tidak memiliki hak suara;
6. Sifat dividen dapat kumulatif, artinya dividen yang tidak dibagikan dapat diakumulasikan ke periode berikutnya;
7. Partisipatif, yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa;
8. Dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham (*redeemable*).

Perusahaan dapat menentukan salah satu dari keistimewaan yang dimiliki oleh saham preferen yang disebutkan diatas, bahkan perusahaan dapat memuat seluruh preferen yang tersbut diatas pada saham preferen yang diterbitkannya, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Karena saham preferen ini tidak memiliki hak suara, yakni hak untuk menentukan kebijakan perusahaan yang disampaikan dalam rapat RUPS, maka banyak calon investor yang memandang saham preferen sebagai instrument yang kurang strategis, apalagi jika tujuan investasinya adalah jangka panjang dan tujuan sebagai pengendali pada perusahaan lain.

Contoh Soal 3.5 Penerbitan Saham Preferen

PT Andalas Makmur menerbitkan 2.500 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp 7.000,00 per lembarnya. Saham ini dibeli tunai oleh para investor dengan harga pasar Rp 8.500,00 per lembarnya. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Andalas Makmur adalah sebagai berikut:

Kas	Rp 1.250.000,00
Modal Saham Preferen	Rp 17.500.000,00
Agio Saham Preferen	Rp 3.750.000,00

3.5 Treasury Stock

Yang dimaksud dengan *treasury stock* adalah saham perusahaan yang dibeli Kembali dari peredaran untuk sementara waktu (Baridwan, 2020). Perbedaan antara saham yang belum beredar dengan *treasury stock* adalah saham yang belum beredar itu merupakan modal saham yang belum dijual (diedarkan) sedangkan *treasury stock* merupakan modal saham yang sudah beredar dan dibeli Kembali.

Pembelian kembali saham yang beredar sebagai *treasury stock* bisa terjadi karena berbagai alasan sebagai berikut (Baridwan, 2020) :

- a) Untuk menaikkan harga pasar saham.
- b) Akan dijual kembali pada karyawan perusahaan.
- c) Akan dibagikan sebagai dividen.
- d) Untuk menukar surat-surat berharga perusahaan lain, dan sebagainya

Pembelian Kembali saham yang beredar (*treasury stock*) kemudian dijual Kembali akan dikelompokkan Kembali dalam modal saham yang beredar. Kadang-kadang *treasury stock* diperoleh dari hadiah (sumbangan) atau dari pelunasan hutang. Dalam pencatatan *treasury stock* ada dua metode yang dapat dipilih penggunaannya:

1. Pembelian *Treasury stock* dengan Metode Nilai Nominal (*Ar Value Method*).
2. Pembelian *Treasury stock* dengan Metode Biaya.

3.5.1 Pembelian *Treasury stock* dengan Metode Nilai Nominal (*Par Value Method*)

Metode nilai nominal lazimnya digunakan dalam hal saham yang diperoleh kembali tersebut. akan di dikeluarkan lagi di kemudian hari. Dengan metode nilai nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun Modal Saham. Apabila saham yang diperoleh kembali tersebut. semula dikeluarkan dengan harga di atas nilai nominal, akun agio saham akan di debit dengan agio saham yang bersangkutan. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut. dibukukan dengan mendebitkan akun Saldo Laba. Sebaliknya bila jumlah yang dibayarkan lebih kecil, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun Tambahan Modal dari Perolehan Kembali Saham. Metode ini lazimnya digunakan bila perolehan kembali dilakukan dalam rangka penarikan saham (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh soal berikut ini:

Contoh Soal 3.6 Pembelian *Treasury Stock* dengan *Par Value Method*

Transaksi	Jurnal
2020 Penjualan 10.000 lembarsahambiasa, nominal @ Rp 1.000,00 dengan harga Rp 1.200,00 per lembar	Kas Rp 12.000.000,00 Modal Saham Biasa Rp 10.000.000,00 Agio Saham Biasa 2.000.000,00
Laba tahun 2020 sebesar Rp 1.500.000,00	Laba rugi Rp 1.500.000,00 Saldo Laba Rp 1.500.000,00
2021 Pembelian Kembali 1.000 lembarsahambiasa (<i>treasury stock</i>) dengan harga @ Rp 1.300,00	Modal Saham Biasa Rp 1.000.000,00 Agio Saham Biasa Rp 200.000,00 Saldo Laba Rp 100.000,00 Kas Rp 1.300.000,00
2021 Penjualan kembali 1.000 lembar yang dibeli (<i>treasury stock</i>) dengan harga jual @ Rp 1.500,00	Kas Rp 1.500.000,00 Modal Saham Biasa Rp 1.000.000,00 Agio Saham Biasa Rp 500.000,00
Sesudah penjual <i>treasury stock</i> ,	Ekuitas

saldo modal saham biasa dalam Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:	Modal Saham Biasa	Rp 10.000.000,00
	Agio Saham Biasa	Rp 2.300.000,00
	Saldo Laba	<u>Rp 1.400.000,00</u>
		Rp 13.700.000,00

3.5.2 Pembelian *Treasury stock* dengan Metode Biaya

Jika entitas memperoleh kembali saham yang telah dikeluarkan, selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas. Perolehan kembali saham yang telah dikeluarkan dapat dicatat dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Dengan metode biaya, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang atas jumlah modal.

Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham, untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham dan Rupiah, dengan judul Tambahan (Pengurang) Agio Modal dari perolehan kembali saham. Jika agio saham menjadi defisit (disagio) karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh soal berikut ini:

Contoh Soal 3.7 Pembelian *Treasury Stock* dengan Metode Biaya

Transaksi	Jurnal
2020 Penjualan 10.000 lembar saham biasa, nominal @ Rp 1.000,00 dengan harga Rp 1.200,00 per lembar	Kas Rp 12.000.000,00 Modal Saham Biasa Rp 10.000.000,00 Agio Saham Biasa 2.000.000,00
Labatahun 2020 sebesar Rp 1.500.000,00	Laba rugi Rp 1.500.000,00 Saldo Laba Rp 1.500.000,00
2021 Pembelian Kembali 1.000 lembar saham biasa (<i>treasury stock</i>) dengan harga @ Rp 1.300,00	Modal Saham Biasa Rp 1.300.000,00 Kas Rp 1.300.000,00
2021 Penjualan kembali 1.000 lembar yang dibeli (<i>treasury stock</i>) dengan harga jual @ Rp 1.500,00	Kas Rp 1.500.000,00 Modal Saham Biasa Rp 1.300.000,00 Agio Saham Biasa Rp 200.000,00
Sesudah penjual <i>treasury stock</i> , saldo modal saham biasa dalam Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:	Ekuitas Modal Saham Biasa Rp 10.000.000,00 Agio Saham Biasa Rp 2.200.000,00 Saldo Laba <u>Rp 1.500.000,00</u> Rp 13.700.000,00

3.6 Penyajian dan Pengungkapan

Berikut ini adalah contoh penyajian ekuitas pemegang saham yang dikutip dari laporan posisi keuangan suatu perusahaan di Indonesia.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 September 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) (Tidak diaudit)		PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As of September 30, 2020 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated) (Unaudited)	
	Catatan/ Notes	30 September 2020/ September 30, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
EKUITAS			EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham			Capital stock - Rp100 (full amount) per value per share
Modal dasar - 30.000.000.000 saham			Authorized - 30,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.780.426.500 saham	22	878.043	Issued and fully paid - 8,780,426,500 shares
Tambahan modal disetor	2,23	283.732	Additional paid-in capital
Laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	2	2.142.382	Unrealized gains on available-for-sale financial assets
Selisih atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	1,23	7.244.722	Difference from changes in equity of Subsidiaries and effects of transactions with non-controlling interests
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	2	1.040.347	Exchange differences on translation of financial statements
Saldo laba	24	120.000	Retained earnings
Cadangan umum Belum ditentukan penggunaannya		27.957.040	Appropriated for general reserve
Ekuitas yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		39.672.266	Unappropriated Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	2,25	35.601.865	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		75.274.131	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		161.531.863	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Gambar 3. Ilustrasi Penyajian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan

Sumber : Laporan Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, tahun 2020 (<https://www.idx.co.id>)

Selain pada laporan posisi keuangan, informasi mengenai ekuitas dapat dilihat juga pada laporan perubahan ekuitas perusahaan tersebut, seperti berikut ini:

Soal

Soal 3.1

PT Pantang Mundur menerbitkan 3.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp 1.000,00 per lembarnya dan 4.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp 2.000,00 secara *lump sum* dengan total nilai sebesar Rp 17.000.000,00 yang dibayarkan oleh investor secara tunai.

Diminta :

1. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan kedua jenis saham tersebut. dengan kondisi diketahui harga pasar untuk saham biasa sebesar Rp 2.000,00 per lembarnya dan saham preferen Rp 3.000,00 per lembarnya!
2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk penerbitan saham tersebut. jika yang diketahui harga pasarnya hanya saham biasa saja yakni Rp 2.000,00 per lembar!

Soal 3.2

Pada Anggaran Dasar PT Kendi Nusantara menunjukan modal dasar yang dapat diterbitkan perusahaan adalah hingga 25.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar nya Rp 500,00. Selama tahun 2021, tahun pertama beroperasinya perusahaan, terdapat dua transaksi yang berkaitan dengan ekuitas :

1. Menerbitkan 1.000.000 lembar saham biasa dengan nilai Rp 700,00 per lembar nya.
2. Menerbitkan 1.500.000 lembar saham biasa sebagai ganti gedung milik salah satu investor yang diserahkan kepada perusahaan. Harga gedung tersebut. di estimasi senilai Rp 1.050.000.000,00

Diminta :

1. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat kedua transaksi tersebut diatas !
2. Hitung berapa nilai modal disetor perusahaan pada akhir tahun 2021!

Soal 3.3

Berikut ini adalah transaksi yang berhubungan dengan ekuitas pada PT Luar Biasa selama tahun 2021:

1. Pada tanggal 1 Januari 2021 PT Luar Biasa menerbitkan 50.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp 5.000,00 per lembarnya. Saham ini dibeli tunai oleh para investor dengan harga Rp 7.500,00 per lembarnya.
2. Pada tanggal 2 April 2021 perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp 3.000,00 per lembarnya yang ditukarkan dengan merk dagang yang nilainya Rp 625.000.000,00.

Diminta : Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk masing-masing transaksi tersebut. diatas!

Soal 3.4

PT Anak Bangsa mengeluarkan obligasi bunga 15%, nominal Rp 70.000.000,00 dan 300 lembar saham biasa nominal Rp 12.000,00 per lembarnya, dalam penjualan secara paket (*lump sum*) dengan harga sebesar Rp 70.000.000,00.

Diminta : Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. jika harga pasar saham biasa diketahui sebesar Rp 15.000,00 dan harga pasar obligasi tidak diketahui!

Soal 3.5

PT Ayo Maju membeli kembali 1.000 lembar sahamnya yang sudah beredar dengan harga Rp 8.000,00 per lembarnya. Nilai nominal saham sebesar Rp 1.000,00. Saham PT Ayo Maju dulu dijual (emisi) dengan harga Rp 10.000,00 per lembar.

Diminta : Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. dengan menggunakan metode nilai nominal (*Par value method*) dan metode biaya!

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. 2020. *Intermediate Accounting*. 9th edn. UPP STIM YKPN.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. IAI.
- Martani, D.et al. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK,Berbasis SAK Edisi 2 (Buku 2)*. Salemba Empat.
- Republik Indonesia, P. 2007. *Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)*, Republik Indonesia.

BAB 4

KEBIJAKAN DIVIDEN SERTA PERHITUNGAN LABA PER LEMBAR SAHAM (EARNING PER SHARE)

Oleh Neks Triani

4.1 Pendahuluan

Apa Itu dividen?

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh dari operasi perusahaan atau kegiatan investasi yang dibayarkan kepada pemegang saham. Dewan direksi perusahaan mengumumkan dividen tunai secara berkala (triwulan, semester, atau tahunan), dan dividen dapat dibayarkan kepada pemegang saham sebagai uang tunai atau sebagai tambahan saham. Sedangkan laba ditahan dan biasanya diumumkan ketika direktur perusahaan ingin menginvestasikan kembali uang tunai yang dihasilkan dari operasi perusahaan untuk mengembangkan perusahaan.

Ketika investor membeli saham di suatu perusahaan, mereka menerima sertifikat saham yang menunjukkan jumlah saham yang mereka peroleh. Jika perusahaan itu membayar dividen, setiap saham yang mereka miliki memberi mereka hak atas bagian proporsional dari total dividen relatif terhadap jumlah total saham yang beredar.

Banyak perusahaan publik yang mapan membayar dividen tunai dan memiliki kebijakan dividen yang sudah dikenal baik oleh investor mereka. Beberapa dari perusahaan ini telah membayar dividen tunai untuk waktu yang sangat lama.

4.2 Bentuk-bentuk Dividen

Menurut (Baridwan, 2004) dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan mempunyai beberapa bentuk, yaitu:

- a. Dividen Kas, merupakan dividen yang paling sering/umum dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk kas. Sebelum perusahaan mengumumkan pembagian dividen ini, perusahaan harus memperhatikan apakah jumlah uang kas mencukupi untuk pembagian dividen.
- b. Dividen Aktiva Selain Kas (*Property Dividends*), selain pembagian dividen menggunakan kas, terkadang pihak perusahaan juga membagikan dividen dalam bentuk aktiva selain kas, seperti barang dagang, surat-surat berharga, atau pun aktiva lainnya. Dividen aktiva yang diterima oleh pemegang saham, akan dicatat sebesar harga pasar aktiva. Namun, perusahaan yang membagi dividen ini akan mencatat sebesar nilai buku aktiva yang telah di bagikan.
- c. Dividen Utang (*Scrip Dividends*), pembagian dividen ini dilakukan apabila terjadi pembagian dividen namun kas yang ada tidak mencukupi untuk dibagikan. Oleh karena itu pihak direksi perusahaan akan mengeluarkan dividen utang yang merupakan janji tertulis untuk membayar jumlah dividen yang harus dibayarkan di waktu yang akan datang.
- d. Dividen likuidasi, merupakan dividen yang sebagian adalah pengembalian modal pemegang saham. Pencatatan dividen likuidasi dilakukan dengan mendebid rekening pengembalian modal pada neraca yang dilaporkan sebagai pengurang modal saham
- e. Dividen saham, merupakan pembagian tambahan saham, tanpa memungut pembayaran kepada para pemegang saham, sesuai dengan saham yang dimilikinya. Dividen saham yang dapat dibagikan terdiri atas:
 - ✓ Saham yang jenisnya sama, seperti dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa ataupun saham prioritas untuk pemegang saham prioritas.
 - ✓ Saham yang jenisnya berbeda, seperti dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa, ataupun saham biasa yang di pegang oleh pemilik prioritas.

4.3 Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen merupakan salah satu topik yang paling kontroversial dalam literatur keuangan perusahaan. Dimana kebijakan dividen merupakan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal pembelanjaan terkait dengan internal perusahaan, dikatakan demikian karena besar atau kecilnya dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan akan menentukan besar kecilnya laba di tahan. Sebab, Salah satu sumber dana internal perusahaan adalah laba di tahan (Sudana, 2009:219). Yang mana Laba ditahan merupakan akumulasi dari laba operasi perusahaan dalam beberapa periode, yang belum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Kebijakan dividen adalah keputusan terpenting dalam sebuah perusahaan, kebijakan ini, melibatkan dua pihak yang berbeda kepentingan, Yaitu pemegang saham atau investor dengan tujuan utama untuk memperoleh pembagian dividen. sedangkan pihak manajemen perusahaan itu sendiri, berusaha untuk tidak membagikan dividen agar perusahaan yang dikelola semakin berkembang.

4.4 Teori Kebijakan Dividen

Teori kebijakan dividen utama yang akan di bahas pada bab ini, yaitu *The Dividend Irrelevance Theory*, teori sinyal, *Agency cost Theory*, teori biaya transaksi, *tax related theories*, hipotesis *bird-in-the-hand*, *pecking order theory*, *residual dividen theory*, *catering theory of dividendts*, *maturity theory*.

4.4.1 *The Dividend Irrelevance Theory*

Pada tahun 1961, Merton Miller dan Franco Modigliani menegaskan bahwa di keadaan pasar modal yang sempurna dengan investor yang rasional dan kepastian yang sempurna, kebijakan dividen yang dikelola tidak relevan. Penilaian hanya bergantung pada produktivitas aset perusahaan dan bukan pada jenis pembayaran dividen. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar kehati-hatian manajer dalam memilih kebijakan dividen untuk perusahaan mereka, tidak ada kebijakan dividen tertentu yang dapat meningkatkan atau menurunkan kekayaan

pemegang saham daripada kebijakan dividen alternatif. Alasan ketidakpedulian mereka ialah karena kekayaan pemegang saham ditentukan oleh pendapatan yang dihasilkan oleh keputusan investasi yang dibuat manajer, bukan oleh bagaimana mereka mendistribusikan pendapatan itu. Oleh karena itu, semua kebijakan dividen tidak relevan.

Selanjutnya, menurut The Dividend Irrelevance Theory Miler & Modigliani (1961), di bawah pasar modal yang sempurna, investor dapat membatalkan keputusan dividen yang dibuat oleh manajer perusahaan. Investor dapat memperoleh tingkat arus kas yang diinginkan dengan menjual saham untuk membuat dividen buatan sendiri atau menggunakan dividen yang tidak diinginkan untuk membeli saham perusahaan. Akibatnya, dalam kondisi ini, satu kebijakan dividen tidak berbeda dengan kebijakan dividen lainnya. Dalam situasi PCM dengan investor rasional dan kepastian yang sempurna, Miler & Modigliani (1961).

Meskipun teori ketidakrelevanan dividen Miler & Modigliani (1961) logis dan konsisten dalam pasar yang sempurna, kenyataannya, berbagai ketidaksempurnaan pasar diamati seperti tarif pajak diferensial, asimetri informasi, biaya transaksi, dan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dalam hal ini, *The Dividend Irrelevance Theory* menjadi hal yang sangat diperdebatkan dan ketidaksempurnaan pasar ini mungkin berarti bahwa kebijakan dividen memang penting. Memang, banyak literatur dividen telah menanggapi The Dividend Irrelevance Theory Miler & Modigliani (1961) dengan berfokus pada ketidaksempurnaan pasar dan menawarkan banyak teori yang bersaing tentang mengapa perusahaan membayar, atau tidak membayar dividen.

4.4.2 Teori Sinyal

Teori sinyal adalah salah satu penjelasan yang paling banyak dipelajari, menunjukkan bahwa ada asimetri informasi dan oleh karena itu manajemen perusahaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai sebenarnya perusahaan daripada orang luar yang hanya memiliki akses ke

informasi publik. Oleh karena itu, manajer menggunakan dividen untuk menyampaikan informasi yang berguna tentang situasi saat ini dan prospek masa depan perusahaan.

Gagasan tentang dividen yang memberi sinyal informasi ke pasar adalah gagasan lama. Studi klasik terkenal Lintner (1956) mengungkapkan bahwa manajer prihatin terhadap sinyal dividen dari waktu ke waktu. Lintner berpendapat bahwa manajer percaya bahwa pemegang saham berhak mendapatkan bagian yang adil dari pendapatan perusahaan melalui dividen. Meskipun beberapa manajer mendukung rasio pembayaran jangka panjang, mereka berasumsi bahwa pemegang saham lebih menyukai peningkatan dividen yang stabil. Oleh karena itu, manajer bermaksud untuk menghindari membuat perubahan dalam tingkat dividen mereka, yang mungkin harus dibalik di masa depan. Meskipun demikian, manajer cenderung membuat penyesuaian parsial terhadap rasio pembayaran target untuk memperlancar aliran pembayaran dividen dalam jangka pendek dan menghindari perubahan yang spektakuler dan sering. Mengadopsi kebijakan dividen yang dihaluskan dapat mencegah volatilitas dividen, yang mungkin menandakan volatilitas arus kas yang akan meningkatkan beta perusahaan dan pengembalian yang dibutuhkan investor, sehingga menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, Lintner menyarankan agar para manajer tidak memotong dividen kecuali perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat, namun kemungkinan besar akan tetap ada karena mereka menganggap pemotongan dividen adalah sinyal yang buruk bagi pasar. Akibatnya, manajer lebih memperhatikan perubahan dividen dari satu periode ke periode berikutnya, daripada tingkat dividen absolut.

4.4.3 Agency Cost Theory

Jensen dan Meckling (1976) dan Easterbrook (1984) mengembangkan penelitian terkait biaya agensi yaitu mengapa perusahaan harus membayar dividen. Teori ini berawal dari masalah pemisahan manajemen dan kepemilikannya, serta perbedaan prioritas manajerial dan pemegang saham. Teori

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dividen yang efektif mengendalikan biaya agensi dengan mengurangi dana yang tersedia untuk investasi yang tidak perlu dan tidak menguntungkan, mengharuskan manajer untuk mencari pembiayaan di pasar modal. Dalam makalah seminal mereka, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa mengingat biaya bagi manajer dari kemungkinan konflik keagenan, menjadi penting bagi mereka bahwa perusahaan terlihat bebas dari konflik semacam itu. Oleh karena itu, manajer akan mengambil langkah-langkah, selain yang diambil oleh pemegang saham, untuk mengurangi potensi konflik keagenan. Selanjutnya, biaya keagenan didefinisikan sebagai kerugian bagi pemegang saham dari perilaku keagenan yang mengendalikan, melalui tindakan yang diambil oleh mereka sendiri dan oleh manajer, serta biaya dari setiap perilaku keagenan yang belum dikendalikan. Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasi tiga komponen biaya agensi: pengeluaran pemantauan, pengeluaran ikatan dan kerugian residual, masing-masing.

Easterbrook (1984) berpendapat bahwa pembayaran dividen digunakan untuk mengambil uang tunai secara Cuma-Cuma dari kendali manajer dan membayarnya kepada pemegang saham. Membayar dividen yang lebih besar menurunkan arus kas. Pihak internal tunduk pada kebijaksanaan manajemen dan memaksa perusahaan untuk mendekati pasar modal untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk proyek-proyek baru. Peningkatan modal luar yang mahal membuat perusahaan menjadi sasaran pengawasan pasar modal untuk dana baru dan mengurangi peluang investasi yang tidak optimal. Pengawasan pasar modal yang efisien juga membantu untuk memastikan bahwa manajer melakukan yang terbaik untuk kepentingan pemegang saham (Easterbrook, 1984). Dengan demikian, pembayaran dividen dapat berfungsi sebagai sarana pemantauan dan kinerja manajemen.

4.4.4 Teori Biaya Transaksi

Beban keuangan dari biaya transaksi karena pembayaran dividen dapat mempengaruhi investor saat mereka mengumpulkan atau menginvestasikan kembali pembayaran ini. Lebih tepatnya, beberapa investor (seperti pensiunan atau investor berorientasi pendapatan), yang mengandalkan pendapatan dividen untuk kebutuhan konsumsi mereka, mungkin lebih memilih saham dengan pembayaran dividen yang tinggi dan stabil; karena menjual sebagian dari kepemilikan mereka dapat melibatkan biaya transaksi yang signifikan kepada investor tersebut. Sebaliknya, orang lain (seperti investor kaya), yang tidak memerlukan pendapatan dividen untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka, mungkin lebih memilih tidak ada atau pembayaran rendah untuk mencegah biaya transaksi yang terkait dengan menginvestasikan kembali dividen yang tidak diinginkan ini untuk membeli saham tambahan (Bishop et al., 2000). Karena biaya transaksi yang harus dikeluarkan untuk kedua kelompok investor saat mentransfer satu aset keuangan ke aset keuangan lainnya, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan dividen mereka sesuai dengan kepuasan pemegang saham untuk menghindari biaya transaksi yang diperlukan (Scholz, 1992).

Pendapat lain dari biaya transaksi mempengaruhi kebijakan dividen terkait dengan keputusan investasi perusahaan, yang telah ditekankan dan diuji, yang lebih penting, dalam literatur, dengan alasan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang terkait dengan pembiayaan eksternal. Karena pembiayaan eksternal mungkin mahal, perusahaan mungkin menghadapi beban biaya transaksi yang berat. Setelah membayar dividen, perusahaan mungkin harus meningkatkan keuangan eksternal untuk memenuhi kebutuhan investasi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan biaya tambahan. Perusahaan lebih memilih pembiayaan internal yang murah dan mudah diakses untuk membayar dividen daripada pengeluaran untuk proyek-proyek investasi. Misalnya, manajemen perusahaan mungkin mengabaikan investasi *Net Present Value* (NPV) positif karena distribusi dividen tunai menghabiskan

dana internal dan meningkatkan dana eksternal yang dapat menimbulkan biaya transaksi.

Rozeff (1982), menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi, yang memiliki ketergantungan lebih besar pada pembiayaan eksternal, harus mengadopsi kebijakan pembayaran yang lebih rendah karena pembayaran dividen yang lebih tinggi meningkatkan biaya transaksi pembiayaan eksternal. Rozeff menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan dan volatilitas perusahaan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan ketergantungan pada sumber eksternal yang mahal. Peluang pertumbuhan menyiratkan bahwa perusahaan dihadapkan pada proyek investasi yang baik dan membutuhkan dana, sedangkan volatilitas perusahaan berarti ketergantungan pada pembiayaan eksternal terlalu berisiko karena ada sedikit kepastian dalam hal estimasi pendapatan yang akan diperoleh. Secara keseluruhan, perusahaan dengan leverage tinggi, berisiko, atau berkembang seharusnya tidak membayar dividen atau tingkat dividen yang rendah untuk mencegah biaya transaksi dividen.

4.4.5 Tax Related Theories

Salah satu pendapat yang paling mendasar seputar pembayaran dividen adalah bahwa perlakuan pajak yang tidak merata atas dividen dan keuntungan modal dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dividen perusahaan yang ingin memaksimalkan nilai pasarnya, sehingga mempengaruhi pengiriman dividen tunai. Dengan demikian, para peneliti keuangan pendapat bahwa pajak mungkin memiliki efek penting pada investor dan perusahaan mengenai dividen. Teori preferensi pajak, yang dikembangkan oleh Brennan (1970), dan Litzenberger dan Ramaswamy (1979), menyatakan bahwa investor yang menerima perlakuan pajak yang menguntungkan atas keuntungan modal (pajak yang lebih rendah atas keuntungan modal daripada dividen) mungkin lebih memilih saham dengan pembayaran dividen rendah. Alasannya adalah jika pajak penghasilan lebih besar dari tarif pajak *capital gain*, pembayaran dividen yang tinggi akan meningkatkan beban

pajak pemegang saham. Oleh karena itu, hal lain dianggap sama, perusahaan harus menghindari atau melakukan pembayaran dividen minimal jika mereka ingin memaksimalkan harga saham mereka.

Namun, Miller dan Scholes (1978), berpendapat bahwa setiap investor memiliki perhitungan tersirat mereka masing-masing untuk memilih antara dividen tunai yang tinggi atau rendah dan memilih kebijakan dividen sesuai dengan keadaan kategori pajak mereka. Logikanya adalah bahwa ada klien untuk hasil dividen tinggi dan rendah tergantung pada posisi pajak. Beberapa investor institusional yang seringkali bebas pajak dan individu dengan golongan pajak rendah mungkin lebih menyukai dividen tunai yang tinggi, sedangkan yang lain dengan golongan pajak tinggi lebih menyukai perusahaan dengan dividen tunai yang rendah. Dengan kata lain, karena ada cukup banyak perusahaan untuk memberikan kebijakan dividen yang berbeda ini, investor akan berinvestasi hanya pada perusahaan dengan kebijakan yang paling sesuai dengan posisi pajak mereka.

4.4.6 Teori *Bird-in-the-Hand*

Sebuah pendapat yang sering terdengar mendukung pembagian dividen adalah bahwa lebih banyak kepastian yang melekat pada pembayaran dividen yang diterima, terhadap retensi dividen untuk reinvestasi dalam proyek-proyek dimana pendapatan masa depannya tidak pasti. hal ini merupakan pendapat yang populer di tahun 1950-an bahwa pemegang saham lebih memilih pembayaran dividen untuk keuntungan modal dan perusahaan dengan rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi terhadap dinilai lebih tinggi (Gordon dan Shapiro, 1956). gagasan ini dikenal dengan pengurangan risiko atau lebih umum disebut teori *bird-in-the-hand*.

Logika teori ini menyiratkan bahwa ada hubungan antara nilai perusahaan dan pembayaran dividen, artinya bahwa dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dividen kurang berisiko daripada *capital gain*. Perusahaan membawa arus kas masuk ke pemegang saham dan mengurangi

ketidakpastian yang terkait dengan arus kas masa depan dengan membayar dividen. Oleh karena itu, saham perusahaan yang membayar dividen lebih aman daripada saham perusahaan yang tidak membayar dividen.

4.4.7 Pecking Order Theory

Pecking order theory of capital structure yang diajukan oleh Myers (1984) dan Myers dan Majluf (1984) merupakan argumen alternatif yang mungkin untuk menjelaskan perilaku kebijakan dividen perusahaan. Klaimnya adalah bahwa perusahaan yang ingin mendanai investasi baru lebih suka menggunakan dana menurut hierarki; dana internal, penerbitan utang dan penerbitan ekuitas. "*pecking order*" menunjukkan bahwa perusahaan mendukung untuk membiayai kegiatan mereka dengan pendapatan yang dihasilkan secara internal untuk mencegah masalah underinvestment yang melibatkan leverage yang berisiko dan asimetri informasi antara manajer dan investor. Jika perusahaan tidak memiliki cukup keuangan internal untuk mendanai operasi mereka, maka mereka harus menerbitkan utang untuk menutupi defisit keuangan mereka. Namun, hanya dalam kasus ekstrim, mereka harus meningkatkan modal ekuitas eksternal.

Menurut (Myers dan Majluf, 1984), perusahaan yang baik harus memiliki leverage yang lebih rendah dan pembayaran jangka pendek yang lebih rendah untuk mengendalikan peluang investasi. Juga, perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi cenderung memiliki leverage yang tinggi (mengingat bahwa investasi membutuhkan lebih dari dana yang dihasilkan secara internal) dan perusahaan-perusahaan ini harus membayar dividen yang rendah. Selanjutnya, *pecking order theory* memprediksi hubungan negatif antara pembayaran dividen dan peluang investasi. Jadi, untuk mencegah pendanaan eksternal dan memanfaatkan lebih banyak dana internal untuk investasi, salah satu cara yang jelas untuk mencapai hal ini adalah dengan mengurangi jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Prediksi hubungan negatif antara investasi dan dividen tunai

tidak khusus untuk teori pecking order, karena teori biaya transaksi membuat prediksi serupa. Namun, ini berbeda dengan teori biaya agensi dari arus kas bebas, yang menyarankan membayar dividen yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah arus kas bebas yang dihasilkan secara internal yang mungkin disalahgunakan oleh manajer dengan melakukan investasi NPV negatif.

4.4.8 *Residual Dividend Theory*

Residual Dividend Theory menunjukkan bahwa perusahaan harus membayar dividen hanya ketika pendapatan yang dihasilkan secara internal tidak sepenuhnya habis untuk proyek investasi. Menurut teori ini, pembayaran dividen idealnya merupakan sisa dari kas yang dihasilkan oleh operasi perusahaan, hanya setelah semua investasi NPV positif telah dilakukan (Saxena, 1999). Mengikuti kebijakan dividen residual, jumlah dividen residual cenderung sangat fluktuatif dan seringkali nol. Ini karena, arus kas yang dihasilkan secara internal memiliki variabilitas yang melekat dan peluang investasi yang diinginkan dengan NPV positif yang tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktu (Lease et al., 2000). Dengan demikian, kebijakan seperti itu akan membuat prediksi pembayaran dividen masa depan menjadi rumit dan akan sesuai hanya jika pemegang saham tidak keberatan dengan fluktuasi dividen (Baker dan Smith, 2006).

4.4.9 *Catering Theory of Dividends*

Baker dan Wurgler (2004a;2004b) mengajukan penjelasan baru, yang disebut teori catering dividen. Literatur kebijakan dividen telah menanggapi teori ketidakrelevanan Miller dan Modigliani dengan melonggarkan asumsi pasar modal yang sempurna dan berfokus pada ketidaksempurnaan pasar. Baker dan Wurgler (2004a; 2004b) menunjukkan bahwa satu-satunya asumsi yang belum dibebaskan adalah efisiensi pasar dan mereka mengusulkan pandangan dividen, yang didasarkan pada asumsi efisiensi pasar yang santai merupakan bukti ketidakrelevanan dividen.

Menurut teori katering dividen, preferensi investor untuk dividen dapat berubah dari waktu ke waktu dan keputusan oleh perusahaan untuk membayar dividen didorong oleh preferensi investor untuk dividen. Oleh karena itu, manajer melayani investor dengan membagikan dividen ketika investor memberikan premi pada saham tersebut. Sejalan dengan itu, manajer akan menghilangkan dividen ketika investor menilai perusahaan yang tidak membayar dividen tinggi. Lebih lanjut, teori tersebut menyatakan bahwa dividen sangat relevan dengan nilai saham tetapi dalam arah yang berbeda pada waktu yang berbeda. Akibatnya, manajer mengenali dan melayani pergeseran permintaan investor untuk preferensi dividen (Baker dan Wurgler, 2004a; 2004b). Ferris dkk. (2006) memberikan dukungan untuk teori katering dividen dan menyimpulkan bahwa permintaan investor pada akhirnya mendorong keputusan dividen perusahaan di Inggris.

4.4.10 *Maturity Theory*

Grullon dkk. (2002) berusaha untuk menghubungkan usia perusahaan dengan kebijakan dividen. Secara khusus, mereka mengusulkan penjelasan alternatif untuk hipotesis arus kas bebas Jensen (1986), yang dikenal sebagai hipotesis jatuh tempo, yang menunjukkan bahwa kenaikan dividen yang lebih tinggi adalah tanda perubahan dalam siklus hidup perusahaan, terutama sebagai transisi perusahaan dari fase pertumbuhan ke fase yang lebih fase dewasa.

Menurut penjelasan ini, dalam tahap pertumbuhan, sebuah perusahaan biasanya memiliki banyak proyek NPV positif dan mungkin memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dengan tingkat belanja modal yang tinggi. Perusahaan seperti itu cenderung dibiarkan dengan arus kas bebas yang rendah dan mengalami pertumbuhan pendapatan yang cepat. Ketika perusahaan terus tumbuh, pesaing memasuki industri dan mencopot pangsa pasar perusahaan, dan pada akhirnya mengurangi keuntungan ekonomi perusahaan. Dalam fase transisi ini, peluang investasi perusahaan mulai menyusut, pertumbuhannya menjadi lambat, pengeluaran modal menurun,

dan perusahaan mulai menghasilkan arus kas bebas dalam jumlah yang lebih besar. Pada akhirnya, perusahaan memasuki fase jatuh tempo di mana pengembalian investasi mendekati biaya modal dan arus kas bebas tinggi. Akibatnya, perusahaan dewasa ini sekarang dapat membayar dividen yang lebih tinggi. Karena perusahaan semakin tua dalam hal usia, peluang investasinya menurun, yang mengarah pada tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dan karenanya mengurangi kebutuhan dana untuk belanja modal. Di sisi lain, perusahaan yang matang cenderung memiliki pendapatan yang stabil dengan akses yang tinggi ke pasar modal eksternal dan mereka dapat mempertahankan tingkat dana yang baik, yang memungkinkan mereka untuk membayar dividen yang lebih tinggi (Grullon et al., 2002).

4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Dividen

Apa yang menentukan Kebijakan Dividen?

Manajemen menentukan apakah akan membagikan pendapatan dalam bentuk dividen atau menginvestasikan kembali semua pendapatan untuk memajukan rencana bisnis perusahaan. Rasio dividen yang dibayarkan kepada investor dengan jumlah laba ditahan disebut rasio pembayaran. Perubahan undang-undang perpajakan dan preferensi investor dapat mempengaruhi keputusan di ruang rapat perusahaan mengenai berapa banyak keuntungan yang harus dipertahankan atau dibayarkan kepada investor dalam bentuk dividen. Namun, peningkatan dividen sering kali tertinggal dari peningkatan pendapatan karena manajemen ingin memastikan bahwa pembayaran dividen baru yang lebih tinggi akan berkelanjutan di masa mendatang.

Terkadang, beberapa perusahaan mengalami masalah, kemudian memotong atau tidak melakukan pembayaran dividen mereka, namun ini adalah pengecualian pada aturan. Perusahaan yang membayar dividen biasanya tidak hanya mempertahankan pembayaran dividen yang ditetapkan, tetapi juga mengikuti kebijakan untuk terus meningkatkan

dividennya seiring dengan peningkatan pendapatan. Beberapa perusahaan meningkatkan pembayaran dividen mereka setiap kuartal, beberapa setahun sekali, dan yang lain hanya jika keuntungan memungkinkan. Beberapa perusahaan bahkan akan membayar dividen ekstra atau khusus jika pendapatannya cukup baik selama beberapa tahun.

Menurut (Sudana 2011) Dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

1. Likuidasi

Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayarkan dividen tunai jika tingkat likuiditas perusahaan (*cash ratio*) mencukupi. Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin tinggi pula dividen tunai yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham, begitu pula sebaliknya.

2. Nilai informasi dividen

Berdasarkan hasil beberapa penelitian, ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, maka harga pasar saham juga meningkat, begitupun sebaliknya. Dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar, hal ini didasarkan atas informasi pengumuman dividen, lagi pula, dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan baik, demikian juga sebaliknya jika dividen yang dibagikan menurun, maka hal ini memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan juga tidak dalam kondisi baik

3. Kemampuan perusahaan untuk menjamin

Pinjaman merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan. Karena perusahaan masih memiliki kemampuan untuk memperoleh pinjaman untuk kebutuhan pendanaannya, maka perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar. Hal ini dimungkinkan karena leverage keuangan perusahaan masih rendah serta perusahaan masih dipercaya oleh pihak kreditur. Sehingga, semakin besar dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, maka semakin

besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman.

4. Pengendalian perusahaan

Perusahaan mempunyai kemungkinan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan jika perusahaan tersebut membayar dividen dalam jumlah yang besar. Pada kondisi yang demikian, kendali pemilik saham lama pada perusahaan kemungkinan akan berkurang, jika para pemilik saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang di terbitkan perusahaan.

5. Dana yang dibutuhkan perusahaan

Apa bila dimasa depan, perusahaan merencanakan melakukan investasi dengan dana dalam jumlah yang besar, maka perusahaan dapat memperoleh melalui penyisihan laba ditahan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, maka semakin besar pula bagian laba ditahan pada perusahaan artinya semakin kecil pula deviden yang akan dibagikan kepada pemegang saham

6. Inflasi

Jika daya beli mata uang menurun, maka inflasi juga akan semakin meningkat. Artinya perusahaan harus mampu menyiapkan dana yang lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusaah pada masa depan. Jika perusahaan kurang memperoleh dana dari pihak luar perusahaan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan dana internal perusahaan, yaitu dengan menahan laba. Akibatnya inflasi meningkat, dividen yang di bayarkan juga akan berkurang, demikian sebaliknya.

7. Batasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman (kreditur)

Saat perusahaan memperoleh pinjaman, maka pihak kreditur akan membuat persyaratan-persyaratan tertentu, salah satu di antaranya dalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak melampaui jumlah tertentu yang telah disepakati. Tujuannya iaah untuk melindungi kepentingan

pihak kreditur, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan bunga.

4.6 Laba Perlembar Saham (*earning per share*)

Laba perlembar saham merupakan jumlah pendapatan dalam satu periode untuk setiap saham yang beredar. Informasi mengenai *earning per share* dapat digunakan sebagai sinyal dalam menentukan deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. *Earning per share* adalah rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (*return*) yang diperoleh pemegang saham dalam per lembar saham. Salah satu keberhasilan sebuah perusahaan adalah jika *Earning Per share* perusahaan besar. Sehingga semakin tinggi *earning per share* maka semakin lama juga para pemegang saham memegang saham pada suatu perusahaan.

Kasmir, 2018 merumuskan *earning per share* untuk saham biasa yaitu sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share (EPS)} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

Berikut adalah contoh :

Komponen Laporan Keuangan	2017	2018
Laba	1.356.000	1.230.000
Jumlah saham yang beredar	1.500	1.500

Untuk tahun 2017:

$$\text{Earning Per Share (EPS)} = \frac{1.356.000}{1.500} = \text{Rp}904,00$$

Untuk tahun 2018:

$$\text{Earning Per Share (EPS)} = \frac{1.230.000}{1.500} = \text{Rp } 820,00$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Dapat dilihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun, disebabkan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan oleh perusahaan. Penurunan ini sebesar Rp 84,00 perlembar saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, H. K. and Smith, D. H 2006, "In Search of a Residual Dividend Policy", *Review of Financial Economics* 15, pp. 1-18.
- Baker, H. K 2009, *Dividends and Dividend policy*, John Wiley & Sons, Inc, Canda.
- Baker, M. and Wurgler, J. 2004a. "A Catering Theory of Dividends", *Journal of Finance* 59 (3), pp. 1125-1165.
- Baker, M. and Wurgler, J 2004b, "Appearing and Disappearing Dividends: The Link to Catering Incentives", *Journal of Financial Economics* 73, pp. 271-288.
- Baridwan, Z 2004, *Intermediate Accounting*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bishop, S. R., Harvey, R. C., Robert, W. F. and Garry, J. T 2000, *Corporate Finance*, Sydney, Prentice Hall Inc.
- Brennan, M 1970, "Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy", *National Tax Journal* 23, pp. 417-427.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. F 2001, *Pasar modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Easterbrook, F. H 1984, "Two Agency-Cost Explanations of Dividends", *American Economic Review* 74 (4), pp. 650-659.
- Ferris, S. P., Sen, N. and Yui, H. P 2006, "God Save the Queen and Her Dividends: Corporate Payouts in the United Kingdom", *Journal of Business* 79 (3), pp. 1149-1173.
- Gordon, M. J. and Shapiro, E 1956, "Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit", *Management Science* 3 (1), pp. 102-110.
- Grullon, G., Michaely, R. and Swaminathan, B 2002, "Are Dividend Changes A Sign of Firm Maturity", *Journal of Business* 75 (3), pp. 387-424.
- Hery 2020, *Akuntansi Keuangan Mengah (sesuai PSAK dan IFRS)*, PT Grasindo, Jakarta.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership

- Structure", *Journal of Financial Economics* 3 (4), pp. 305-360.
- Jensen, M. C 1986, "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers", *American Economic Review* 76 (2), pp. 323-329.
- Kasmir, 2018, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Press, Depok.
- Kilincarslan, E 2015, "Dividend policy: evidence from Turkey", Thesis, *Birkbeck University of London*.
- Lease, R. C., John, K., Kalay, A., Loewenstein, U. and Sarig, O. H 2000, *Dividend Policy: Its Impact on Firm Value*, Boston, Harvard Business School Press.
- Lintner, J 1956, "Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes", *American Economic Review* 46 (2), pp. 97-113.
- Litzenberger, R. H. and Ramaswamy, K 1979, "The Effects of Personal Taxes and Dividends on Capital Asset Prices: Theory and Empirical Evidence", *Journal of Financial Economics* 7, pp. 163-195.
- Miller, M. H. and Modigliani, F 1961, "Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares", *Journal of Business* 34 (4), pp. 411-433.
- Miller, M. H. and Scholes, M. S 1978, "Dividends and Taxes", *Journal of Financial Economics* 6, pp. 333-364.
- Myers, S. C 1984, "The Capital Structure Puzzle", *Journal of Finance* 39 (3), pp. 575-592
- Myers, S. C. and Majluf, N. S 1984, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have", *Journal of Financial Economics* 13 (2), pp. 187-221.
- Rozeff, M. S 1982, "Growth, Beta and Agency Costs as Determinants of Dividend Payout Ratios", *Journal of Financial Research* 5 (3), pp. 249-259.
- Saxena, A. K 1999, "Determinants of Dividend Payout Policy: Regulated Versus Unregulated Firms", Working Paper, *The University of West Georgia*.

- Scholz, J. K 1992, "A Direct Examination of the Dividend Clientele Hypothesis", *Journal of Public Economics* 49 (3), pp. 261-285.
- Sudana, I. M 2009, *Manajemen keuangan teori dan praktek*, Airlangga University press, Surabaya.

BAB 5

PERHITUNGAN TRANSAKSI INVESTASI SAHAM UNTUK TRADING, AVAILABLE FOR SALE, HELD TO MATURITY

Oleh Parju

5.1 Pendahuluan

Trading securities atau sekuritas perdagangan merupakan sekuritas yang dibeli dan dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek atau sewaktu waktu dapat dijual kembali. Tujuan ini adalah untuk mendapatkan capital gain. Sedangkan *Available for sale securities* atau sekuritas yang tersedia untuk dijual merupakan investasi yang tidak akan dimiliki sampai jatuh tempo, tetapi juga tidak akan dijual kembali dalam jangka pendek dan penilaiannya menggunakan harga wajar. Dan *Held to maturity securities* merupakan investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo. Investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, karena perusahaan memiliki tujuan secara sungguh sungguh untuk memiliki sekuritas sampai jatuh tempo, yaitu investasi jangka panjang dan tidak direncanakan untuk dijual kembali.

5.2 Pengertian Investasi

Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi kelompok investasi lancar, yaitu investasi pembelian surat berharga saham yang dikeluarkan perusahaan lain untuk dijual kembali dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 tahun. Tujuan investasi jangka pendek adalah keuntungan dari kenaikan harga jual dikemudian hari, diperoleh keuntungan jika harga jual dikemudian hari lebih

tinggi dari harga perolehannya. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar, bertujuan untuk memperoleh deviden dari saham tersebut.

5.3 Biaya Investasi

Biaya perolehan suatu investasi mencakup biaya perolehan disamping harga beli adalah biaya komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa efek. Jika suatu investasi diperoleh dengan penerbitan saham, maka biaya perolehannya adalah nilai wajar saham yang diterbitkan dan bukan nilai nominal. Jika suatu investasi diperoleh dengan pertukaran aktiva lain, biaya perolehan investasi ditentukan dengan mengacu nilai wajar aktiva yang diserahkan atau menggunakan nilai wajar dari aktiva yang diperoleh apabila dianggap lebih andal berdasarkan data yang tersedia.

Biaya dalam jual atau beli surat berharga berupa : biaya provisi yang merupakan upah perantara yang melakukan transaksi jual atau beli surat berharga. Karena tidak semua orang yang berkepentingan bisa masuk ke dalam bursa efek, sehingga harus menyuruh perantara seperti komisioner dan makelar. Dan biaya materai yang akan dibubuhkan pada akte surat berharga. Kedua biaya ini menjadi tanggungan pembeli sehingga menjadi unsur harga pokok.

5.4 Nilai Tercatat Investasi

Terdapat pendapat berbeda mengenai nilai tercatat yang tepat untuk investasi lancar. Pendapat pertama menekankan bahwa untuk laporan keuangan yang dipersiapkan menurut biaya perolehan dan nilai bersih yang direalisasikan, mana yang lebih rendah dapat diterapkan pada investasi. Kebanyakan investasi lancar dapat dipasarkan, maka nilai tercatatnya adalah biaya atau nilai mana yang lebih rendah. Dengan kata lain metode ini memberikan nilai neraca yang wajar dan tidak menyebabkan pengakuan keuntungan yang tidak direalisasikan dalam penghasilan.

Pendapat lain investasi lancar merupakan substitusi kas adalah dinilai dengan nilai wajar, yakni dengan nilai pasar. Perusahaan tidak memperhatikan unsur harga perolehan melainkan kas yang didapat diperoleh dengan menjualnya kembali. Investasi lancar dapat dengan mudah dijual, namun laba tidak dapat diakui sebelum penjualan dipastikan.

Perhatian perusahaan biasanya langsung pada nilai keseluruhan dari portofolio investasi lancar dan bukan pada investasi individual, karena investasi tersebut dimiliki secara kolektif sebagai tempat penyimpanan kekayaan. Sejalan dengan pandangan ini investasi dicatat pada nilai pasar yang mana lebih rendah dinilai pada suatu portofolio agregat, dan tidak pada basis investasi individual. Namun juga ada pendapat bahwa penggunaan dasar portofolio menghasilkan kerugian yang dikompensasikan dengan keuntungan yang tidak direalisasikan.

5.5 Pelepasan Investasi

Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan, kerusakan bencana, peraturan pemerintah dan sebagainya sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh perusahaan. Pada penjualan investasi selisih antara nilai tercatat dan hasil neto, diakui pada laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penjualan.

Setiap penurunan nilai pasar investasi lancar, dicatat yang rendah diantara biaya perolehan dan nilai pasar, pada dasarnya portofolio dilakukan terhadap biaya perolehan secara agregat, investasi individual tetap dicatat pada biaya perolehan. Dengan demikian laba atau rugi penjualan suatu investasi individual didasarkan pada biaya perolehan, namun penurunan agregat pada nilai pasar dari portofolio tersebut ditentukan.

5.6 Sekuritas Trading (Investasi Jangka Pendek)

Sekuritas trading merupakan investasi jangka pendek pada surat berharga yang sengaja dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Sebagai misal sekuritas trading

berupa saham untuk keperluan jangka pendek, dikarenakan jangka pendek, sekuritas trading dicatat sebagai aset lancar.

Sekuritas trading biasanya dipegang oleh lembaga keuangan seperti bank, reksadana, hingga perusahaan asuransi. Pencatatan akuntansi untuk sekuritas trading dilakukan secara berkelompok atau disebut dengan *fortofolio*.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang bersifat semetara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang. Kelebihan uang kas dalam suatu perusahaan tidak akan menimbulkan pendapatan karena itu kelebihan kas sebaiknya diinvestasikan selama tidak terpakainya kas tersebut. Karena jangka waktu kas tersebut tidak digunakan relatif pendek, maka investasi juga dilakukan dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek bisa berupa surat berharga saham.

Saham adalah surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang saham ikut serta memodali suatu Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian dapat dikatakan ikut memiliki suatu Perseroan Terbatas. Saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekwensi pembelian dan penjualannya sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Pada Efek ekuitas ini pemiliknya adalah pemegang saham. Pemegang saham berhak atas keuntungan perusahaan dan kenaikan harga saham. Apabila terjadi kepailitan maka nilai sahamnya merupakan sisa harta perseroan setelah dikurangi pembayaran utang kepada seluruh kreditor perusahaan.

5.6.1 Pencatatan Pembelian Saham

Pembelian saham akan dicatat sebelah debit akun surat-surat berharga menurut harga perolehannya. Harga perolehan merupakan harga kurs ditambah dengan semua biaya yang terjadi pada saat pembelian.

Istilah dalam jual beli surat berharga yaitu :

- a. Harga Nominal adalah nilai surat berharga yang tertera diatas surat berharga
- b. Harga kurs adalah persen kurs dikalikan dengan harga nominal. Persen kurs adalah harga jual atau beli surat berharga yang berlaku dibursa efek. Persen kurs ada 3 tingkat yaitu :
 - 1) Kurs @ pari artinya kurs 100% dimana harga beli surat berharga dibursa efek sama dengan nilai nominal surat berharga
 - 2) Kurs diatas pari artinya kurs diatas 100% dimana harga saham jual atau beli surat berharga di bursa efek selalu lebih tinggi dari harga nominalnya.
 - 3) Kurs dibawah pari artinya kurs dibawah 100% dimana harga jual atau beli surat berharga di bursa efek selalu lebih rendah dari harga nominalnya

Jurnal yang dibuat pada saat pembelian saham adalah

Investasi Sementara Saham	Rp xx
Kas	Rp xx

Contoh 1

Pada Juni 2021, Tuan A membeli 10 lot saham PT B di harga Rp 4.360/saham, dengan fee transaksi beli sebesar 0,15% maka perhitungannya sebagai berikut :

Keterangan	Perhitungan	Nilai Uang (Rp)
Transaksi beli	10 lotx100lembar x Rp 4.360	Rp 4.360.000
Broker fee	0,08 x Rp 4.360.000	Rp 3.488
Levy(biaya transaksi)	0,04 x Rp 4.360.000	Rp 1.744
PPN	0,03 x Rp 4.360.000	Rp 1.308
Total		Rp 4.366.540

Pencatan yang dibuat adalah :

Investasi Sementara Saham Rp 4.366.540

Kas Rp 4.366.540

Contoh 2

Harga nominal 50 lembar saham PT N nominal per lembar @ Rp 100,0 dengan kurs 90% dan biaya dikeluarkan provisi dan meterai Rp 750.000

Keterangan	Perhitungan	Nilai Uang (Rp)
Transaksi beli	$90\% \times 500 \text{ lbr} \times \text{Rp}100.00$	Rp 45.000.000
Provisi dan materai		Rp 750.000
Total		Rp 45.750.00

Investasi Sementara Saham Rp 45.750.000

Kas Rp 45.750.000

5.6.2 Pencatatan Pada Saat Penjualan dan Penilaian Akhir Tahun

Pada waktu penjualan saham akun surat berharga akan dikredit dengan harga jual. Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga kurs jual dikurangi dengan semua biaya yang terjadi pada saat penjualan berupa provisi, materai dan lain lain. Dalam penjualan saham yang perlu diperhatikan adalah laba atau rugi. Jika harga jualnya lebih tinggi dari harga perolehannya maka dalam penjualan ini adalah memperoleh laba yang akan dicatat dalam akun laba penjualan surat berharga sebelah kredit, sebaliknya harga jual lebih rendah dari harga perolehannya, dalam penjualan ini terjadi rugi dan akan dicatat dalam akun penjualan saham sebelah debit.

Jurnal penjualan saham memperoleh keuntungan :

Kas	Rp xx
Investasi Sementara Saham	Rp xx
Kuntungan	Rp xx

Jurnal Penjualan Saham terjadi kerugian :

Kas	Rp xx
Rugi Penjualan Saham	Rp xx
Investasi sementara Saham	Rp xx

Rugi Belum Direalisasikan atas Nilai Saham	Rp xx
Penyisihan Kelebihan Harga Pokok Diatas Harga Pasar	Rp xx

Pada bulan Juli 2022 Tuan A menjual saham PT X pada harga Rp 4.750/saham lebih tinggi dari harga perolehan sebesar Rp 4.410.100. Perjualan tersebut dikenakan fee jual sebesar 0,25%, PPh final 0,1%

a. Perhitungan total Kas diterima

Keterangan	Perhitungan	Niai Uang (Rp)
Transaksi Jual	10 lot x 100.000 lbr x Rp 4.750	Rp4.750.000
Broker fee	0,08 % x Rp 4.750.000	Rp 3.800
Levy	0,04 % x Rp 4.750.000	Rp 1.900
PPN	0,03% x Rp 4.750.000	Rp1.425
PPh Final	0,1 % x 4.750.000	Rp 4.750
Total Kas Diterima		Rp 4.738.125

$$\text{Laba} = \text{Rp } 4.738.125 - \text{Rp } 4.410.100 = \text{Rp } 328.025$$

Kas	Rp 4.738.125
Investasi Sementara Saham	Rp 4.410.100
Keuntungan Penjualan Saham	Rp 328.025

Dijual Saham PT X sebanyak 300 lembar dengan nilai nominal @ Rp 100.000 dengan kurs 100%. Biaya provisi dan materai Rp 600.000. Saham tersebut harga perolehannya Rp 105.000 per lembar.

Parju 78

a. Perhitungan Total Kas Diterima

Harga Nominal 300 lembar @ Rp 100.000 = Rp 30.000.000

Harga Kurs 100% x Rp 30.000.000 = Rp 30.000.000

Biaya provisi dan Materai = (Rp 600.000)

Total Kas Diterima = Rp 29.400.000

b. Perhitungan Kerugian Penjualan Saham

Harga Perolehan Saham 300lbr x Rp 105.000 =Rp 31.500.000

Total Kas diterima dari penjualan Saham =Rp 29.400.000

Rugi penjualan saham =Rp 2.100.000

c. Jurnal Penjualan Saham

Kas Rp 29.400.000

Rugi Penjualan Saham Rp 2.100.000

Investasi Sementara Saham Rp 31.500.000

Contoh 3 :

Pemilikan saham oleh PT X sebagai berikut :

Perusahaan	Harga Perlehan	Harga Pasar	Selisih
A	Rp 1000	Rp 1.500	Rp 500
B	RP 1500	Rp 1.000	(Rp 500)
C	Rp 1700	Rp 1.000	(Rp 700)
Total	Rp 4200	Rp 3.500	(Rp700)

Di neraca pada akhir tahun akan dicatat Rp 3.500

Jurnal dibuat pada penilaian akhir tahun adalah sebagai berikut:

Rugi Belum Direalisasikan atas Nilai Saham Rp 700

Penyisihan Kelebihan Harga Pokok Diatas Harga Pasar Rp 700

Contoh 4

PT X pada tahun 2021 membeli surat berharga saham sebagai berikut :

1 Maret 2021 dari PT A dibeli 1000 lembar saham @ Rp 1.000
Biaya komisi Rp 200.000, 1 April 2021 dari PT B dibeli 1500 lembar @ Rp 2000 biaya komisi Rp 400.000 dan 1 Mei 2021 dari PT C dibeli 1000 lembar Rp 3000 biaya komisi Rp 400.000. Kemudian pada akhir tahun 2021, dilakukan penilaian terhadap ketiga investasi tersebut PT A diketahui harga pasarnya Rp

1.500.000, PT B diketahui harga pasarnya Rp 3.200.000 dan PT C diketahui harga pasarnya Rp 3.100.000

Diminta :

a. Perhitungan Harga perolehan

Tgl	PT	Pembelian	Komisi	Total Harga Perolehan
1 Maret 2021	A	1000 lbr x Rp1000 = Rp1.000.000	Rp200.000	Rp 1.200.000
1 april 2021	B	1500 lbr x Rp2000 = Rp3.000.000	Rp400.000	Rp 3.400.000
1 Mei 2021	C	1000lbr x Rp3000 = Rp3.000.000	Rp400.000	Rp 3.400.000
Total		Rp7.000.000	Rp1.000.000	Rp 8.000.000

b. Jurnal Pencatatan Pembelian saham

Pembelian saham PT A

Investasi Sementara Saham	Rp 1.200.000
Kas	Rp 1.200.000

Pembelian saham PT B

Investasi Sementara Saham	Rp 3.400.000
Kas	Rp 3.400.000

Pembelian Saham PT C

Investasi Sementara Saham	Rp 3.400.000
Kas	Rp 3.400.000

Atau

Investasi sementara Saham	Rp 8.000.000
Kas	Rp 8.000.000

c. Pencatatan penilaian akhir Tahun 2021

Kerugian penurunan nilai Saham Rp 200.000

Penyisihan penurunan nilai Saham Rp 200.000

Keterangan :

Rugi = perolehan - harga pasar

= Rp 8,000.000 – Rp 7.800.000

= Rp 200.000

Contoh 5

Selama Tahun 2022 dilakukan pembelian dan penjualan investasi sebagai berikut :

Pada tanggal 5 Januari 2022 dilakukan penjualan investasi atas saham PT A sebesar Rp 1.100.000 dengan mengeluarkan biaya komisi sebesar Rp 100.000

Pada tanggal 12 Maret 2022 dilakukan pembelian investasi atas saham dari PT D sebanyak 2000 lembar @ Rp 2000 dengan mengeluarkan biaya komisi sebesar Rp 500.000

Harga pasar pada akhir tahun 2022 adalah PT B sebesar Rp 4000.000, PT C Rp 3.000.000 dan PT D Rp 4.800.000.

Diminta

a. Penjualan Saham PT A

Harga Perolehan Investasi atas Saham di PT A Rp
1.200.000

Harga Jual Investasi Rp 1.100.000

Biaya Komisi Penjualan Rp (100.000)

Total Kas Diterima Rp 1.000.000

Kerugian Penjualan Investasi atas Saham Rp 200.000

Jurnal Penjualan saham PT A

Kas Rp 1.000.000

Kerugian Penjualan Investasi Saham Rp 200.000

Investasi Sementara Saham PT A Rp 1.200.000

b. Pembelian Saham PT D

Harga Beli Rp 4.000.000

Biaya Komisi Pembelian Rp 500.000

Total Harga Beli Rp 4.500.000

Jurnal Pembelian Saham PT D

Investasi Sementara Saham PT D Rp 4.500.000

Kas Rp 4.500.000

c. Penilaian Akhir Tahun

Waktu	Nama PT	Harga Perolehan	Harga Pasar	Seleisih
1 April 2021	PT B	Rp 3.400.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
1 Mei 2021	PT C	Rp 3.400.000	Rp 3.000.000	(Rp 400.000)
23 Maret 2022	PT D	Rp 4.500.000	Rp 4.800.000	Rp 300.000
		Rp11.300.000	Rp11.800.000	Rp 500.000
Keuntungan atas penilaian akhir Tahun 2022				Rp 500.000

Karena selisih positif (untung) maka kerugian yang telah dicatat sebelumnya tahun 2021 harus ditutup dari keuntungan yang diperoleh tahun 2022

Jurnal Penilaian Akhir Tahun 2022

Penyisihan Penurunan Nilai Saham Rp 200.000

Kerugian Penurunan Nilai Rp 200.000

5.7 Available For Sale Securities (Sekuritas Tersedia Untuk Dijual)

Sekuritas yang tersedia untuk dijual (*securities available to sale*) yang juga dikenal sebagai investasi tersedia dijual merupakan sekuritas investasi mirif jangka pendek atau juga disebut sekuritas trading, hanya sekuritas tersedia dijual, akan dijual tidak sampai waktu jatuh tempo tapi juga tidak akan dijual dalam waktu kurang dari satu tahun.

Sekuritas yang tersedia untuk dijual merupakan salah satu unsur dari *other Comprehensive Income* (OCI) yang merupakan bagian dari ekuitas, tetapi dalam pos ini akan direklasifikasi ke dalam laporan rugi laba pada saat aset keuangan tersebut dilepas. Terkait dengan ini diatur dalam PSAK nomor 1 revisi tahun 2013. Sekuritas tersedia dijual dapat berupa saham maupun obligasi dan wesel yang secara langsung mempengaruhi akun ekuitas pemilik.

Contoh;

PT X membeli 2 sekuritas saham dalam kurun waktu tahun 2021 yang dicatat sebagai sekuritas tersedia untuk dijual. Pada Tanggal 31 Desember 2021, biaya perolehan dan nilai wajar sekuritas tersebut adalah sebagai berikut :

Portofolio sekuritas

Keterangan	Total biaya	Nilai Wajar	Nilai Pasar
Saham PT A	Rp 1.200	Rp 57.200.000	Rp 59.000.000
Saham PT B	Rp2000	Rp 84.000.000	Rp 88.500.000
Total		Rp 141.200.000	Rp 147.500.000

Diminta :

- a. Perhitungan keuntungan

Berdasar tabel diatas terdapat selisih antara nilai pasa dan nilai wajar.

$$\begin{aligned}
 \text{Kentungan} &= \text{Nilai Pasar} - \text{Nilai Wajar} \\
 &= \text{Rp } 147.500.000 - \text{Rp } 141.200.000 \\
 &= \text{Rp } 6.300.000
 \end{aligned}$$

- b. Jurnal diperlukan mencatat laba belum direalisasi

Penyisihan Investasi Tersedia dijual Rp 6.300.000

Laba Blm Direalisasi Investasi tersedia dijual Rp 6.300.000

5.7 Held To Maturity Securities (Investasi jangka Panjang)

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan tidak bermaksud untuk memutar kebihan uang kas. Investasi jangka panjang bermaksud untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Investasi jangka panjang dalam saham perusahaan lain sering disebut penyertaan. Investasi jangka panjang juga dimaksudkan untuk mengontrol kegiatan perusahaan lain.

Investasi dalam akuntansi meliputi semua penanaman dana perusahaan atau penyertaan perusahaan pada perusahaan lain, yang tidak ada hubungan langsung dengan operasi utama perusahaan. Investasi jangka panjang dapat dilakukan dalam bentuk saham. Adapun tujuan investasi jangka panjang dalam saham adalah :

- a. Untuk mendapat pendapatan yang tetap setiap periode berupa deviden

- b. Unt membentuk dana khusus untuk kepentingan ekspansi maupun kepentingan sosial
- c. Untuk mengendalikan perusahaan lain
- d. Untuk menjamin tersediannya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- e. Untuk mengurangi persaingan diantara perusahaan perusahaan yang sejenis.
- f. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan

Pada dasarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh investasi jangka panjang dalam saham : 1) Deviden yang merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, dan deviden dibagikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. 2) Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual lebih tinggi dari harga beli dan capital gain terbentuk dengan adanya perdagangan dipasar sekunder. Disamping kedua keuntungan diatas pemegang saham juga di mungkinkan untuk mendapat saham bonus, yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham merupakan selisih antara harga jual dengan harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum dipasar perdana.

5.7.1 Pencatatan Investasi Jangka Panjang Dalam Saham

a. Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Metode ekuiats adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang dimana investasi mula mula dicatat pada harga pokoknya, kemudian berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagiannya. Bagian kekayaan laba (rugi) dihasilkan (diderita) oleh perusahaan anak dicatat sebagai penambahan (pengurangan) terhadap saldo akun investasi. Deviden yang diterima sebagai pengurang akun investasi.

b. Metode Biaya (*Cost Method*)

Metode biaya merupakan metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang dimana investasi dicatat

pada harga perolehannya, tanpa ada penyesuaian terhadap laba atau rugi yang diperoleh anak perusahaan. Pendapatan investasi diakui pada saat deviden telah dikeluarkan.

Metode biaya investasi dalam saham biasa di catat pada biayanya dan deviden dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan deviden. Jika deviden yang diterima melebihi bagian laba setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian Modal dan dicatat sebagai pengurang akun investasi.

Contoh 1;

PT X memiliki 100.000 lembar saham dengan harga Rp 10.000 perlembar. Pada tanggal 1 Januari 2021 PT A membeli 50.000 saham PT X dan PT C membeli sebanyak 10.000 lembar saham dari PT X. Kemudian selama tahun 2021 PT X mengumumkan laba sebesar Rp 250.000.000 dan pada tanggal 1 Februari 2022 PT X membagi deviden sebesar Rp Rp 150.000.000. Kemudian pada Tahun 2022 PT X mengumumkan kerugian sebesar Rp 100.000.000;

Diminta jurnal yang diperlukan dengan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Jurnal Saat Pembelian Saham 1 Januari 2021

Hak Mayoritas (Metode Ekuitas)	Hak Minoritas (metode Biaya)
Investasi jk Panjang Saham Rp 500 juta	Investasi jk Panjang Saham Rp 100 juta
Kas Rp 500 juta	Kas Rp 100juta

b. Jurnal Saat Pengumuman

Hak Mayoritas (Metode Ekuitas)	Hak Minoritas (Metode Biaya)
Investasi jk Panjang Saham Rp 125 juta	Tidak ada jurnal
Pendapatan Dari PT X Rp 125juta	

c. Jurnal Pada Saat Pembayaran Deviden

Hak Mayoritas (Matode Ekuitas)	Hak Minoritas (metode Biaya)
Kas Rp 75 juta	Kas Rp 15 juta
Investasi JK Panjang Saham Rp 75juta	Pendapatan Deviden Rp 15juta

d. Jurnal Saat Kerugian Tahun 2022

Hak Mayoritas (Metode Ekuitas)	Hak Minoritas (Metode Biaya)
Kerugian Investasi di PT X Rp50 juta Investasi JP Saham Rp 50 juta	Tidak ada jurnal

Contoh 2;

PT X pada tanggal 1 Juni 2021 membeli saham PT S untuk investasi jangka panjang sebanyak 2000 lembar saham preferen nilai nominal Rp 120.000 dengan kurs 105%. Biaya provisi dan meterai senilai Rp 420.000. Presentase deviden preferen yang akan didapatkan per tahunnya adalah 12% yang akan dibayarkan setiap tanggal 30 Desember.

Diminta :

a. Hitung biaya perolehannya

Nilai saham 2000 lembar x Rp 120.000 = Rp 240.000.000

Nilai saham dikali kurs $Rp\ 240.000.000 \times 105/100 = Rp\ 252.000.000$

Biaya administrasi = Rp 420.000

Total biaya perolehan saham = Rp 252.420.000

Deviden akan diterima $Rp\ 240.000.000 \times 12\% = 28.800.000$

b. Jurnal mencatat pembelian saham

Investasi JK Panjang saham PT C Rp252.420.000

Kas Rp 252.420.000

c. Jurnal mencatat penerimaan deviden

Kas Rp 28.800.000

Pendapatan Deviden Rp 28.800.000

5.7.2 Penilaian Investasi Jangka Panjang Atas Saham

Penilaian akhir tahun bisa menggunakan Metode harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar (*Lower Of Cost Or Market*), jika pemilikan saham $\geq 20\%$ metode ekuitas tidak tepat digunakan, maka investor diharuskan menggunakan metode *Lower Of Cost Or Market*. Hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Hak untuk memperoleh dan melepaskan bagian kepemilikan dalam satu perusahaan dengan harga tetap.
- b. Harga jual dan harga beli dan permintaan untuk surat berharga tersebut pada saat ini tersedia dipasar surat berharga.

Contoh 1 ;

PT X melakukan transaksi investasi jangka panjang dalam Saham sebagai berikut :

- Tanggal 15 Januari 2021 membeli 20.000 lembar saham PT A, seharga Rp 1.446.000 sudah termasuk komisi pialang
- Tanggal 22 Juli 2021 membeli 52.000 lembar saham PT B seharga Rp 2.340.000 sudah termasuk komisi pialang

Pada akhir tahun 2021 PT X menetapkan harga pasar surat berharga ekuitasnya sebagai berikut : harga pasar saham PT A Rp 1.478.000 dan harga pasar saham PT B Rp 1.900.000.

Diminta :

- a. Jurnal Perolehan investasi saham jangka panjang

Investasi JP Saham PT A	Rp 1.446.000
Kas	Rp 1.446.000
Investasi JP Saham PT B	Rp 2.340.000
Kas	Rp 2.340.000

- b. Perhitungan penilaian akhir tahun dan jurnal

-Perhitungan penilaian akhir tahun

Keterangan	Harga Pokok	Harga Pasar	Selisih
PT A	Rp 1.446.000	Rp 1.478.000	Rp 32.000
PT B	Rp 2.340.000	Rp 1.900.000	(Rp 440.000)
Selisih Penilaian			(Rp 408.000)

Jurnal kerugian penurunan investasi :

Kerugian penurunan nilai Investasi JP Saham	Rp 408.000
Penyisihan penurunan nilai investasi JP Saham	Rp 408.000

5.7.3 Penerimaan Deviden

a. Deviden Saham

Deviden saham merupakan yang dibagi dalam bentuk saham, tidak perlu diadakan catatan pada saat penambahan saham karena deviden dibagi dalam bentuk saham.

Contoh

Tanggal 1 Januari 2021 PT X memiliki 1000 lembar saham PT A dengan harga beli Rp 9.600.000. Dua tahun kemudian akibat laba yang diperoleh PT A, maka menerbitkan bagi para pemegang saham satu lembar untuk setiap 2 lembar saham yang dimiliki. Kemudian 600 lembar saham dijual dengan harga Rp 4.300.000

Diminta :

1) Perhitungan jumlah saham yang dimiliki PT X

Jumlah saham sebelum bagi deviden 1.000 lembar

Tambahan saham karena deviden saham 500* lembar

Jumlah saham setelah bagi deviden

$= 1000 + 500 = 1.500$ lembar

*Setiap 2 lembar saham yang dimiliki akan mendapat 1 lembar saham, maka tambahan saham $1000 \text{ lbr} / 2 = 500$ lembar

2) Jurnal Penjualan 600 lembar saham

Harga pokok 1000 lembar saham Rp 9.600.000

Harga pokok 500 lembar saham Rp _____ 0+

Harga pokok 1500 lembar saham Rp 9.600.000

Nilai buku per lembar saham Rp $9.600.000 / 1500$ lembar = Rp 6.400 lembar saham

Nilai buku 600 lembar saham $= 600 \text{ lbr} \times \text{Rp } 6.400 = \text{Rp } 3.840.000$

Keuntungan penjualan saham = Harga jual - harga perolehan = Rp 4.300.000 - Rp 3.840.000 = Rp 460.000

Jurnal penjualan saham

Kas	Rp 4.300.000
Dalam Saham	Rp 3.840.000
Keuntungan Penjualan Saham	Rp 460.000

b. Deviden Kas

Contoh:

PT C memiliki 250 lembar saham PT A pada Tanggal 15 Desember 2021, PT A mengumumkan deviden pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 2000 per lembar saham dan pembayaran deviden dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022.

Diminta :

1) Jurnal saat diumumkan

Piutang Deviden	Rp 500.000
Pendapatan Deviden	Rp 500.000

2) Jurnal saat penerimaan deviden kas

Kas	Rp 500.000
Piutang Deviden	Rp 500.000

c. Deviden Likuidasi

Deviden likuidasi adalah pembayaran kembali modal yang disetor kepada pemegang saham. Jadi tidak semua deviden merupakan pendapatan melainkan sebagian pengembalian investasi yang ditanamkan, sehingga investasi saham berkurang.

Contoh

PT Z memiliki 250 lembar saham PT A pada Tanggal 1 Juni 2021. Laba yang peroleh PT A pada Tahun 2021 Rp 3.700.000, sedang PT A akan membagi deviden sebesar Rp 4.000.000 dan Rp 2000 per lembar saham. Deviden akan dibagikan Tanggal 10 Januari 2022.

Diminta :

1) Hitung besarnya Deviden likuidasi

Deviden Likuidasi = Total Deviden – Laba yang diperoleh = Rp 4.000.000 – Rp 3.700.000 = Rp 300.000

Jumlah lembar Saham PT A = Total Deviden : Deviden per lembar = Rp 4.000.000 : Rp 2000 = 2000 lembar
Besarnya Deviden Likuidasi = Deviden Likuidasi : Jumlah Lembar Saham = Rp 300.000 : 2000 = Rp 150

2) Jurnal Akhir Tahun 2021

Investasi saham PT A, akan berkurang = $250 \text{ lbr} \times \text{Rp}150 = \text{Rp} 37.500$

Piutang deviden = $250 \text{ lbr} \times \text{Rp} 2000 = \text{Rp} 500.000$

Pendapatan Deviden = { (Harga saham keseluruhan deviden yang akan dibagikan-harga deviden likuidasi)x Lembar Saham PT O}

Pendapatan Deviden = $(\text{Rp} 2000 - \text{Rp} 150) \times 250 \text{ lbr} = \text{Rp} 462.500$

Jurnal yang dibuat adalah :

Piutang Deviden	Rp 500.000
Investasi atas Saham PT A	Rp 37.500
Pendapatan Deviden	Rp 462.500

3) Jurnal pada Saat Pembagian Deviden 10 Januari 2022

Kas	Rp 500.000
Piutang deviden	Rp 500.000

d. Deviden Nonkas

Contoh

PT A Memiliki saham 2500 lembar saham biasa yang beredar, diantara saham beredar tersebut PT Y memiliki Rp 250 Lembar. PT A membagi deviden berupa saham biasa kepada pemegang saham sebanyak 100 lembar selama tahun 2021. Pembagian deviden terjadi pada kurs saham biasa dibursa dengan harga Rp 125, nilai nominal saham biasa Rp 10.000 perlembar.

Diminta : Buat jurnal mengakui investasi bertambah

Penyelesaian :

Kepemilikan PT Y pada PT A = $250 \text{ lbr} / 2500 \text{ lbr} \times 100\% = 10\%$

PT Y memperoleh $10\% \times 100 \text{ lembar} = 10 \text{ lembar}$

Harga saham biasa saat pembagian = $100 \text{ lbr} \times \text{Rp} 125 = \text{Rp} 12.500$

Saham Biasa yang akan diterima PT Y = $10 \text{ Rp} 12.500 = \text{Rp} 125.000$

Jurnal yang diperlukan :

Investasi Saham Biasa	Rp 125.000
Pendapatan Deviden	Rp 125.000

DAFTAR PUSTAKA

- Dy Ilham Satria, 2016, Modul Akuntansi keuangan 2, Universitas Malikussaleh, Aceh
- Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini, 2009, Akuntansi Keuangan, Graha Ilmu, Bandung
- Maryati Rahayu, 2019, Buku Ajar Akuntansi Keuangan 2, Universitas Persada Indonesia, Jakarta
- Mas'ud Machfud, 1999, Akuntansi Intermediate, BPFE, Yogyakarta
- Ni Kadek Sinarwati, 2014, Akuntansi Keuangan 2, Uinversitas Pendidikan Ganesha, Bali
- Zaki Baridwan, 2004, Intermediate Accounting Edisi 8, BPFE, Yoyakarta

BAB 6

PERHITUNGAN PENGAKUAN PENDAPATAN UNTUK TRANSAKSI PENJUALAN POINT SALE DAN KONTRAK PANJANG

Oleh Yenny Wati

6.1 Definisi Pengakuan Pendapatan

Pengakuan merupakan proses pencatatan dalam satuan mata uang secara formal suatu pos ke dalam akun dan laporan keuangan perusahaan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari kegiatan-kegiatannya yang menghasilkan laba seperti kegiatan operasi utama perusahaan selama suatu periode. Pengakuan pendapatan meliputi beberapa hal yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan barang atau pemberian jasa yang ditukar dengan kas atau piutang, perusahaan mengakui pendapatan apabila aset dalam pertukaran dapat segera dikonversi menjadi kas atau piutang, perusahaan mengakui pendapatan apabila perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya atau pekerjaannya.

Prinsip atas pengakuan pendapatan yaitu pendapatan dari penjualan barang atau jasa diakui pada tanggal penjualan atau saat jasa telah diberikan, pendapatan dari bunga dan sewa saat aset digunakan atau disewakan ke pihak lain sesuai dengan waktu berjalan, dan pendapatan dari penjualan aset yang diakui pada tanggal penjualan. Beberapa alasan untuk menyimpang dari dasar penjualan adalah mengakui lebih awal atau menangguhkan pengakuan atas pendapatan yang dihasilkan berdasarkan tingkat kepastiannya.

6.2 Pengakuan Pendapatan pada saat Penjualan (*Point of Sale*)

Pendapatan pada saat penjualan umumnya diakui saat penjualan (*point of sale*), namun permasalahan dapat timbul dari beberapa situasi seperti penjualan dengan perjanjian beli kembali, penjualan dengan hak retur, serta trade loading dan channel stuffing. Penjualan dengan perjanjian beli kembali dapat diartikan sebagai perjanjian utang piutang yaitu pemberian pinjaman dengan jaminan. Tiga metode pengakuan pendapatan alternatif atas penjualan dengan hak retur, jika penjual menanggung risiko kepemilikan jangka panjang dari pengembalian produk adalah penjualan tidak dicatat sampai masa berlaku atas hak retur habis, penjualan dicatat dan dikurangi dengan taksiran retur di masa mendatang, penjualan dicatat dengan retur penjualan yang akan terjadi.

Pendapatan atas penjualan dengan hak retur dapat diakui pada saat penjualan jika memenuhi enam kondisi yaitu harga penjualan pada dasarnya tetap, pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual, tidak ada perubahan kewajiban pembeli kepada penjual kecuali adanya kerusakan fisik atau pencurian barang, pembeli memiliki substansi ekonomi yang berbeda dari yang disediakan oleh penjual atas produk untuk dijual kembali, penjual tidak memiliki kewajiban secara langsung yang mengakibatkan penjualan kembali produk tersebut oleh pembeli di masa mendatang, dan banyaknya retur dapat diperkirakan secara wajar di masa mendatang. Trade loading merupakan praktik yang berusaha menggambarkan penjualan, keuntungan, dan pangsa pasar yang aktualnya tidak dimiliki. Perusahaan membujuk pelanggan mereka yang merupakan pedagang besar untuk membeli lebih banyak produk dari pada yang dengan cepat dapat mereka jual kembali. Channel stuffing merupakan praktik yang dilakukan oleh industri perangkat lunak komputer yang ingin hasil keuangannya terlihat bagus dengan cara yang curang.

Ilustrasi untuk pengakuan pendapatan pada saat penjualan (penyerahan), PT. ABC membuat kesepakatan dengan

pelanggannya berupa pemberian diskon 4% jika pelanggannya membeli produknya dalam 1 tahun lebih kurang Rp350.000.000. Pada 31 Maret 2021, PT. ABC telah melakukan penjualan sebanyak Rp150.000.000 ke PT. X. Pada dua tahun sebelumnya, PT. ABC menjual sebanyak Rp200.000.000 ke PT. X di bulan April sampai bulan Desember. Pendapatan yang diakui PT. ABC untuk 3 bulan pertama di tahun 2021 adalah sebesar Rp144.000.000 ($\text{Rp150.000.000} - (\text{Rp150.000.000} \times 4\%)$).

- Jurnal yang dibuat PT. ABC pada tanggal 31 Maret 2021.

Dr. Piutang usaha	Rp144.000.000	
Cr. Penjualan		Rp144.000.000
- Jurnal yang dibuat PT. ABC, dengan asumsi pelanggan memenuhi kesepakatan pemberian diskon 4%.

Dr. Kas	Rp144.000.000	
Cr. Piutang usaha		Rp144.000.000
- Jurnal yang dibuat PT. ABC, dengan asumsi pelanggan tidak memenuhi kesepakatan pemberian diskon 4%.

Dr. Kas	Rp150.000.000	
Cr. Piutang usaha		Rp144.000.000
Cr. Diskon penjualan yang hilang		Rp6.000.000

6.3 Pengakuan Pendapatan untuk Kontrak Jangka Panjang

Kontrak jangka panjang diartikan bahwa penjual (kontraktor) dapat menagih pembeli pada jangka waktu tertentu karena tahap-tahap proyek selesai sesuai target, contohnya kontrak konstruksi. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika memenuhi semua kondisi-kondisi berikut yaitu jumlah pendapatan kontrak dapat ditentukan dengan andal, kontrak yang memiliki manfaat ekonomis mungkin masuk ke perusahaan, tingkat penyelesaian dan biaya kontrak dapat ditentukan dengan andal pada akhir periode pelaporan, dan

biaya aktual kontrak dapat dibandingkan dengan biaya kontrak yang ditentukan dengan andal. Metode kontrak selesai artinya pengakuan pendapatan atas pelaksanaan kontrak yang telah selesai dilakukan.

Perhitungan pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian sebagai berikut:

1. Menghitung persentase biaya dengan membandingkan biaya aktual sampai tanggal tertentu dengan perkiraan total biaya untuk menyelesaikan kontrak tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut:

$$\frac{\text{Costs incurred to date}}{\text{Most recent estimate of total costs}} = \text{Percent complete}$$

2. Menghitung jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui pada tanggal tertentu yaitu persentase biaya dikali dengan perkiraan total pendapatan atau perkiraan laba kotor atas kontrak tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut:

$$\text{Percent complete} \times \text{Estimated total revenue (or gross profit)} = \text{Revenue (or gross profit) to be recognized to date}$$

3. Menghitung jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui setiap periode yaitu jumlah pendapatan atau laba kotor yang akan diakui pada tanggal tertentu dikali dengan jumlah pendapatan atau laba kotor yang diakui pada periode-periode sebelumnya, seperti yang ditunjukkan dalam rumus berikut:

$$\text{Revenue (or gross profit) to be recognized to date} - \text{Revenue (or gross profit) recognized in prior periods} = \text{Current-period revenue (or gross profit)}$$

Ilustrasi untuk pengakuan pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode persentase penyelesaian, PT. ABC memiliki kontrak untuk membangun apartemen senilai Rp950.000.000 dan total biaya diperkirakan sebesar Rp800.000.000. Kontrak dimulai dari Mei 2020 dan selesai pada bulan Juni 2022.

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Biaya yang dikeluarkan	365	618	810
Perkiraan biaya sampai selesai	435	192	-
Kemajuan tagihan	350	350	250
Kas terkoleksi	250	300	400

Perhitungan persentase penyelesaian sebagai berikut:

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Harga kontrak	950	950	950
Biaya dikeluarkan (dikurangi)	365	618	810
Perkiraan biaya sampai selesai (dikurangi)	435	192	0
Perkiraan total laba kotor	150	140	140
Persentase penyelesaian	46%	76%	100%
	Rp365jt Rp800jt	Rp618jt Rp810jt	Rp810jt Rp810jt

Penjurnalan yang dicatat oleh PT. ABC sebagai berikut:

- Jurnal mencatat biaya konstruksi.

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Dr. Konstruksi dalam proses	365	253	192
Cr. Kas (Utang)	365	253	192

- Jurnal mencatat termin (kemajuan penagihan).

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Dr. Piutang usaha	350	350	250
Cr. Penagihan konstruksi dalam proses	350	350	250

- Jurnal mencatat penagihan.

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Dr. Kas	250	300	400
Cr. Piutang usaha	250	300	400

- Jurnal mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor dengan metode persentase penyelesaian.

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Dr. Konstruksi dalam proses (laba kotor)	72	32	36
Dr. Beban konstruksi	365	253	192
Cr. Pendapatan	437	285	228

- Jurnal mencatat penyelesaian kontrak dengan metode persentase penyelesaian.

	2022 (juta)
Dr. Penagihan atas konstruksi dalam proses	950
Cr. Konstruksi dalam proses	950

- Jurnal mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor dengan metode pemulihan biaya.

	2020 (juta)	2021 (juta)	2022 (juta)
Dr. Beban konstruksi	365	253	
Cr. Pendapatan	365	253	
Dr. Konstruksi dalam proses (laba kotor)			140
Dr. Beban konstruksi			192
Cr. Pendapatan			332

- Jurnal mencatat penyelesaian kontrak dengan metode pemulihan biaya.

	2022 (juta)
Dr. Penagihan atas konstruksi dalam proses	950
Cr. Konstruksi dalam proses	950

Perbandingan laba kotor antara metode persentase penyelesaian dan metode pemulihan biaya.

Tahun	Persentase penyelesaian	Pemulihan biaya
2020	Rp72.000.000	0
2021	Rp32.000.000	0
2022	Rp36.000.000	Rp140.000.000

PT. ABC menghitung pendapatan dan laba kotor per tahun dengan metode persentase penyelesaian:

	Sampai periode (juta)	Diakui periode sebelumnya (juta)	Diakui periode sekarang (juta)
Tahun 2020:			
Pendapatan (950juta x 46%)	437	0	437
Biaya	<u>365</u>	0	<u>365</u>
Laba kotor	72	0	72
Tahun 2021:			
Pendapatan (950juta x 76%)	722	437	285
Biaya	<u>618</u>	<u>365</u>	<u>253</u>
Laba kotor	104	72	32
Tahun 2022:			
Pendapatan (950juta x 100%)	950	722	228
Biaya	<u>810</u>	<u>618</u>	<u>192</u>
Laba kotor	140	104	36

PT. ABC menghitung pendapatan dan laba kotor per tahun dengan metode pemulihan biaya:

	Sampai periode (juta)	Diakui periode sebelumnya (juta)	Diakui periode sekarang (juta)
Tahun 2020:			
Pendapatan	365	0	365
Biaya	<u>365</u>	0	<u>365</u>
Laba kotor	0	0	0

PT. ABC menghitung pendapatan dan laba kotor per tahun dengan metode pemulihan biaya (lanjutan):

	Sampai periode (juta)	Diakui periode sebelumnya (juta)	Diakui periode sekarang (juta)
Tahun 2021:			
Pendapatan	618	365	253
Biaya	<u>618</u>	<u>365</u>	<u>253</u>
Laba kotor	0	0	0
Tahun 2022:			
Pendapatan	950	618	332
Biaya	<u>810</u>	<u>618</u>	<u>192</u>
Laba kotor	140	0	140

Ilustrasi untuk kerugian kontrak jangka panjang di suatu periode. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, asumsikan PT. ABC memperkirakan biaya untuk menyelesaikan apartemen adalah Rp274.000.000 (ilustrasi sebelumnya Rp192.000.000) pada tanggal 31 Desember 2021. Kerugian yang diakui PT. ABC sebagai berikut:

Biaya yang telah dikeluarkan (31/12/2021)	Rp618.000.000
Perkiraan biaya penyelesaian	<u>Rp274.000.000</u>
Perkiraan total biaya	Rp892.000.000
Persentase penyelesaian (Rp618 juta / Rp892 juta)	69%
Penerimaan diakui tahun 2021 (Rp950 juta x 69%) – Rp437 juta	Rp218.500.000
Biaya diakui tahun 2021	<u>Rp253.000.000</u>
Kerugian diakui tahun 2021	Rp34.500.000

Jurnal yang dibuat PT. ABC untuk mencatat kerugian pada periode 2021 sebagai berikut:

Dr. Beban konstruksi	Rp253.000.000
Cr. Konstruksi dalam proses	Rp 34.500.000
Cr. Pendapatan	Rp218.500.000

Ilustrasi untuk kerugian di kontrak jangka panjang yang merugikan menggunakan metode persentase penyelesaian. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, asumsikan PT. ABC memperkirakan biaya untuk menyelesaikan apartemen adalah Rp378.000.000 (ilustrasi sebelumnya Rp192.000.000) pada tanggal 31 Desember 2021. Kerugian yang diakui PT. ABC sebagai berikut:

Biaya yang telah dikeluarkan (31/12/2021)	Rp618.000.000
Perkiraan biaya penyelesaian	<u>Rp378.000.000</u>
Perkiraan total biaya	Rp996.000.000
Perkiraan total kerugian	Rp46.000.000
(Rp996 juta – Rp950 juta)	
Persentase penyelesaian	62%
(Rp618 juta / Rp996 juta)	
 Penerimaan diakui tahun 2021 (Rp950 juta x 62%) – Rp437 juta	 Rp152.000.000
Kerugian diakui tahun 2021:	
Pembalikan laba kotor 2020	Rp72.000.000
Perkiraan total kerugian kontrak	<u>Rp46.000.000</u>
Beban kerugian tahun 2021	Rp270.000.000

Jurnal yang dibuat PT. ABC untuk mencatat pendapatan, beban, dan kerugian pada periode 2021 menggunakan metode persentase penyelesaian, sebagai berikut:

Dr. Beban konstruksi	Rp270.000.000
Cr. Konstruksi dalam proses	Rp118.000.000
Cr. Pendapatan	Rp152.000.000

Jurnal yang dibuat PT. ABC untuk mencatat pendapatan, beban, dan kerugian pada periode 2021 menggunakan metode pemulihan biaya, sebagai berikut:

Dr. Beban konstruksi	Rp253.000.000
Cr. Pendapatan	Rp253.000.000
Dr. Kerugian dari kontrak jangka panjang	Rp46.000.000
Cr. Konstruksi dalam proses	Rp46.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2013. *'Intermediate Accounting: IFRS Edition, John Wiley & Sons Inc, New York.*
- Martani, Dwi, Sylvia V. S., Ratna W., Aria F., Edward T. dan Taufik H. 2014. *'Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Salemba Empat, Jakarta.*
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D. and Kieso, D.E. 2013. *'Financial Accounting: IFRS Edition, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.*

BAB 7

ISU-ISU DARI PENGAKUAN PENDAPATAN

Oleh Sri Suyati

7.1 Pendahuluan

Menurut IAI (2007) dalam PSAK 23, pendapatan (*income*) berarti suatu penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Sementara itu, menurut UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian pendapatan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nilai yang dipakai untuk mengukur pendapatan berkaitan dengan nilai atau harga yang disepakati dalam transaksi. Kalau terdapat pengurangan seperti pemotongan perdagangan, potongan tunai atau retur, pengurangan itu langsung dibebankan kepada pendapatan dan bukan merupakan biaya. Selama ini sering ditemui beberapa pendapat yang mengasumsikan bahwa akuntansi berbasis akrual berhubungan dengan pencatatan pendapatan saja, sehingga apabila kita belum mengakui adanya piutang maka akuntansi kita belum akrual. Namun sebenarnya akuntansi berbasis akrual tidak hanya berfokus pada pencatatan pendapatan saja namun juga atas semua transaksi lain yang dilakukan oleh suatu entitas, misalnya pencatatan transaksi beban. Terkait dengan pencatatan pendapatan, beberapa pendapat menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebenarnya belum benar-benar menggunakan basis akrual. Karena itu dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) dan pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

7.2 Pengakuan dan Pengukuran Penghasilan

1. Prinsip Umum

Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi yaitu,

- a. Penghasilan dari transaksi pemualan produk diakui pada tanggal, penjualan (tanggal penyerahan produk kepada pembeli)
- b. Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya.
- c. Imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (*accrual*) atau pada saat penggunaan aktiva.

2. Pengecualian Terhadap Prinsip Umum

Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dari prinsip umum seperti berikut:

- a. Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi.
- b. Penghasilan diakui secara proporsional selama tahap produksi.
- c. Penghasilan diakui pada saat pembayaran di terima.
- d. Penghasilan dari penjualan konsinyasi
- e. Pengukuran Penghasilan menggunakan :
Exchange Value, yaitu pengukuran penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa Nilai tukar berupa kas (*Cash Ekuivalent*), yang diterima dari transaksi penghasilan dibedakan menjadi transaksi kapital (*Capital Transaction*) dan transaksi penghasilan (*Revenue Transaction*).

7.3 Pengakuan Pendapatan metode AkruaI dan Kas

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, UU Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan (yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak

berdasarkan akrual dan kas basis. Pendekatan Akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh.

Pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Menurut Metode Akrual, hak untuk menerima sejumlah imbalan (uang) dari pemberian jasa (atau dari penjualan barang) sudah diakui sebagai penghasilan, karena terjadi realisasi transaksi. Menurut Metode Kas, hak untuk menerima sejumlah imbalan (uang) dari pemberian jasa (penjualan barang) belum diakui sebagai penghasilan karena belum terjadi realisasi (pembayaran) dari hak tersebut.

Sehubungan dengan penghitungan penghasilan Kena Pajak, metode kas dapat dipakai untuk menggeser penghasilan dari satu ke lain tahun untuk memperoleh penghematan pajak.. Untuk menetralisasi hal itu, ketentuan pajak menyatakan untuk keperluan perpajakan metode kas harus dimodifikasi sebagai berikut :

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun tidak.
2. Pengeluaran untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak – hak yang dapat diamortisasi Harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui depresiasi dan amortisasi.

Beberapa katagori penghasilan atau sektor usaha tampak diaplikasikan metode kas basis dalam pengakuan penghasilan, yaitu :

1. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh perusahaan real estate yang dikenakan pajak penghasilan final 5 % (rumah pada umumnya) atau rumah 2 % (rumah sederhana dan sangat sederhana yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.04/1996 dibebaskan dari penerimaan bruto.
2. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, partemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan industri yang dikenakan pajak

- final 6% (untuk WP badan) atau 10 % (WP Orang Pribadi) dari penerimaan bruto.
3. Penghasilan dari bunga deposito/tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima.
 4. Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek
 5. Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% (WPDN) atau 2,64% (WPLN)
 6. Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1 % dari transaksi pembelian bruto
 7. Penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerja sama dengan PT Telkom yang dikenakan pajak final 5 %

7.4 Pendapatan sebagai obyek dan Bukan Obyek

Pendapatan yang termasuk Objek Pajak:

1. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang lain.
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan,
3. Laba Usaha
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk pengalihan harta perseroan kepada persero dan sebaliknya, dari likuidasi, penggabungan, peleburan, penukaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, dan dari hibah, bantuan atau sumbangan selain kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, dan koperasi
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya
6. Bunga, deviden, royalti, dan sewa dari harta
7. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
8. Keuntungan dari pembebasan utang
9. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

10. Iuran berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggota yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
11. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

7.5 Pendapatan yang bukan merupakan Objek Pajak

1. Warisan, hibah (yang diterima oleh badan keagamaan, pendidikan, dan sosial atau pengusaha kecil tertentu termasuk koperasi) atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan pekerjaan pihak yang bersangkutan.
2. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima perseroan, persekutuan, atau badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
3. Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, koperasi, yayasan, BUMN dan BUMD
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana
5. Pembagian keuntungan (setelah pajak) dari perseroan komanditer, firma, kongsi, dan persekutuan
6. Bagian laba dari perusahaan tertentu yang diperoleh dari perusahaan modal ventura

7.6 Pengakuan Penghasilan Untuk Beberapa Jenis Perusahaan

1. Perusahaan Kontraktor

Penghasilan diakui berdasarkan pendekatan kemajuan pekerjaan (*Percentage of completion contract method*) tanpa memperhatikan jangka waktu penyelesaian kontrak. Persentase penyelesaian itu dapat diukur berdasarkan pendekatan biaya atau penyelesaian fisik.

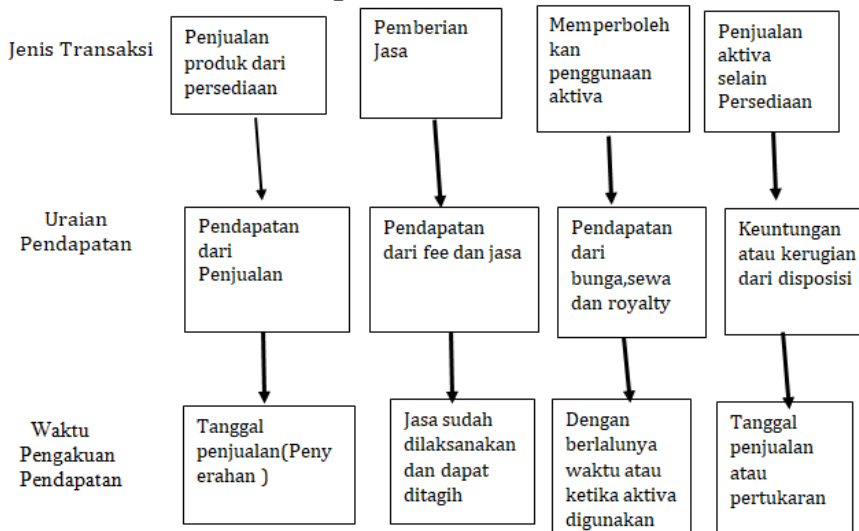
2. Perusahaan Leasing

Penghasilan Lessor yang dikenakan pajak penghasilan merupakan sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha

3. Perusahaan Real Estate

Penghasilan dari kontrak sewa dengan sistem *build – operate and reansfer* atau *build and tranfer* dengan berbagai variasinya.

7.7 Transaksi Pendapatan



Pendapatan – Konstruksi

Contoh: PT A memiliki kontrak membangun gedung senilai Rp 800 juta dan perkiraan biaya Rp 700 juta. Kontrak dimulai Juli 2018 dan selesai Agustus 2020.

Keterangan	2018	2019	2020
Biaya yang dikeluarkan	315jt	568jt	710jt
Perkiraan biaya sampai selesai	385jt	142jt	-
Kemajuan tagihan	300jt	350jt	150jt
Kas terkoleksi	200jt	300jt	300jt

Perhitungan prosentase penyelesaian

	2018	2019	2020
Hargakontrak	Rp 800jt	Rp 800jt	Rp 800jt
(-) biaya dikeluarkan	315jt	568jt	710jt
(-)perkiraan biaya sampai selesai	385jt	142jt	0
Perkiraan total laba kotor	Rp 100jt	Rp 90jt	Rp 90jt
Prosentase penyelesaian	45%	80%	100%

$$\frac{\text{Rp}315\text{jt}}{\text{Rp } 710 \text{ jt}}$$

$$\frac{\text{Rp } 568 \text{ jt}}{\text{Rp } 710 \text{ jt}}$$

$$\frac{\text{Rp } 710 \text{ jt}}{\text{Rp } 700 \text{ jt}}$$

PT A melakukan penjurnalan atas (1) biaya konstruksi, (2) kemajuan penagihan (termin), (3) penagihan.

	2018(juta)	2019 (juta)	2020(juta)
Untuk mencatat biaya konstruksi:			
Konstruksi dalam proses	315	253	142
Kas, utang, dsb	315	253	142
Untuk mencatat termin:			
Piutang usaha	300	350	150
Penagihan konstruksi dalam proses	300	350	150
Untuk mencatat penagihan:			
Kas	200	300	300
Piutang usaha	200	300	300

Prosentase penyelesaian, Pendapatan dan Laba Kotor, Per Tahun

	Sampai periode (juta)	Diakui periode sebelumnya (juta)	Diakui periode sekarang (juta)
2018			
Pendapatan (800jt x 45%)	360	0	360
Biaya	315	0	315
Laba kotor	45	0	45
2019			
Pendapatan (800jt x 80%)	640	360	280
Biaya	568	315	253
Laba kotor	72	45	27
2020			
Pendapatan (800jt x 100%)	800	640	160
Biaya	710	568	142
Laba kotor	90	72	18

PT A mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak.

	2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)
Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor			
Konstruksi dalam Proses (laba kotor)	45	27	18
Beban konstruksi	315	253	142
Pendapatan	360	280	160
Untuk mencatat penyelesaian kontrak			
Penagihan atas Konstruksi dalam proses			800
Konstruksi dalam proses			800

Isi akun konstruksi dalam proses-metode prosentase penyelesaian.

Konstruksi dalam proses

2018 biaya konstruksi	315	31/12/20	Untuk menutup proyek selesai	800
2018 laba kotor diakui	45			
2019 biaya konstruksi	253			
2019 laba kotor diakui	27			
2020 biaya konstruksi	142			
2020 laba kotor diakui	18			
Total	800	Total		800

Penyajian Laporan Keuangan – Prosentase Penyelesaian

Untuk menghindari *double-counting* akun persediaan, selama kontrak PT A melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan posisi keuangan. Jika selisih tersebut di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. PT A melaporkan aset lancar dari selisih tersebut sebagai kelebihan biaya dan laba diakui dari tagihan di laporan posisi keuangan. Berikut contoh penghitungan pada tahun 2018

Pendapatan kontrak diakui tahun 2018	Rp 360 juta
Penagihan tahun 2018	Rp 300 juta
Pendapatan belum tertagih	Rp 60 juta

Laporan Keuangan - Prosentase Penyelesaian

PT A				
Laporan Laba-rugi (dalam juta)		2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak jangka panjang		360	280	160
Biaya konstruksi		315	253	142
Laba kotor		45	27	18
Laporan Posisi Keuangan (dalam juta)		2018	2019	2020
Aset lancar				
Persediaan				
Konstruksi dalam proses	360			
Dikurangi: Penagihan	300			
Kelebihan biaya dan laba diakui dari penagihan		60		0
Piutang		100*	150*	0
Kewajiban lancar				
Penagihan	650			
Dikurangi:Konstruksi dalam proses	640			
Kelebihan penagihan dari biaya dan laba diakui			10*	0

Pemulihan Biaya, Pendapatan dan Laba Kotor, Per Tahun

	Sampai periode (juta)	Diakui periode sebelumnya (juta)	Diakui periode sekarang (juta)
2018			
Pendapatan	315	0	315
Biaya	315	0	315
Laba kotor	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2019			
Pendapatan	568	315	253
Biaya	568	315	253
Laba kotor	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2020			
Pendapatan	800	568	232
Biaya	710	568	142
Laba kotor	<u>90</u>	<u>0</u>	<u>90</u>

PT A mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak.

	2018 (juta)	2019 (juta)	2020 (juta)
Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor			
Beban konstruksi	315	253	
Pendapatan		253	
Konstruksi dalam Proses (laba kotor)			90
Beban konstruksi			142
Pendapatan			232
Untuk mencatat penyelesaian kontrak			
Penagihan atas Konstruksi dalam proses			800
Konstruksi dalam proses			800

Perbandingan laba kotor antara metode prosentase penyelesaian dengan metode pemulihan biaya

Tahun	Prosentase penyelesaian	Pemulihan biaya
2018	Rp 45 juta	Rp 0
2019	Rp 27 juta	Rp 0
2020	Rp 18 juta	Rp 90 juta

Laporan Keuangan - Pemulihan Biaya

PT A				
Laporan Laba-rugi (dalam juta)		2018	2019	2020
Pendapatan dari kontrak jangka panjang		315	253	232
Biaya konstruksi		315	253	142
Laba kotor		0	0	90
Laporan Posisi Keuangan (dalam juta)		2018	2019	2020
Aset lancar				
Persediaan				
Konstruksi dalam proses	315			
Dikurangi: Penagihan	300			
Kelebihan biaya dan laba diakui dari penagihan		15		0
Piutang		100*	150*	0
Kewajiban lancar				
Penagihan	650			
Dikurangi: Konstruksi dalam proses	568			
Kelebihan penagihan dari biaya dan laba diakui			82	0

Kerugian di suatu periode

Pada contoh soal sebelumnya, asumsikan PT A memperkirakan biaya untuk menyelesaikan gedung pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 221 juta *instead of* Rp 142 juta. PT A akan mengakui kerugian sebagai berikut :

Biaya yang telah dikeluarkan (31/12/18)	Rp 568 juta
Perkiraan biaya penyelesaian (revisi)	<u>Rp 221 juta</u>
Perkiraan total biaya	<u>Rp 789 juta</u>
Prosentase penyelesaian (568jt/789jt)	72%
Penerimaan diakui tahun 2018 (800jt x 72%) – 360 juta	Rp 216 juta
Biaya diakui tahun 2018	<u>Rp 253 juta</u>
Kerugian diakui tahun 2018	Rp 37 juta

PT A akan mencatat kerugian pada periode 2018 sebagai berikut :

Beban konstruksi
Konstruksi dalam proses (kerugian)
Pendapatan

Kerugian di kontrak merugikan – prosentase penyelesaian

Pada contoh soal sebelumnya, asumsikan PT A memperkirakan biaya untuk menyelesaikan gedung pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 319.5 juta *instead of* Rp 142 juta

Biaya yang telah dikeluarkan (31/12/18)	Rp 568,0 juta
Perkiraan biaya penyelesaian (revisi)	Rp 319,5 juta
Perkiraan total biaya	Rp 887,5 juta
Perkiraan total kerugian (887.5jt – 800jt)	Rp 87,5 juta
Prosentase penyelesaian (568jt/887.5jt)	64%
Penerimaan diakui tahun 2018 (800jt x 64%) – 360jt	Rp 152,0 juta
Kerugian diakui tahun 2018	
Pembalikan laba kotor 2017	Rp 45,0 juta
Perkiraan total kerugian kontrak	Rp 87,5 juta
Beban kerugian tahun 2018	Rp 284,5 juta

PT A akan mencatat pendapatan, beban, dan kerugian tahun 2018 sebagai berikut :

Metode prosentase penyelesaian

Beban konstruksi Konstruksi dalam proses (kerugian) Pendapatan
--

Pengungkapan di Laporan Keuangan

Kontraktor konstruksi harus mengungkapkan:

1. Pendapatan yang diakui selama periode dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tingkat penyelesaian.
2. Untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan harus mengungkapkan jumlah agregat biaya yang dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang muka, dan jumlah *retention*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Trisnawati, S.A.E. 2012. *Akuntansi Perpajakan..*
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan.* 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Yusuf, F.A.B.A.A. 2000a. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia Buku Dua.* Edited by Salemba Empat.
- Yusuf, F.A.B.A.A. 2000b. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia Buku satu.* Edited by Salemba Empat.

BAB 8

PERHITUNGAN DALAM PAJAK PENGHASILAN

Oleh Galih Wicaksono

8.1 Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, akuntansi dan perpajakan merupakan hal yang berkaitan satu sama lain, dimana dalam setiap transaksi bisnis perlu diperhatikan aspek akuntansi dan perpajakannya. Aspek akuntansi dalam artian yaitu bagaimana pencatatan transaksi dalam bentuk penjurnalan yang muaranya pada laporan keuangan. Sedangkan aspek perpajakan dengan memperhatikan apakah pada transaksi tersebut merupakan objek pajak menurut peraturan perpajakan, objek pajak disini dalam arti luas yaitu apakah objek pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau merupakan objek pajak daerah. Apabila sudah diketahui objek pajaknya, maka perlu dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak dan dibuat penjurnalannya.

Pajak merupakan hal yang urgen bagi negara, mengingat bahwa sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak, serta menurut penelitian Asmandani dkk (2020) yang menyatakan bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat, serta pemerintah daerah juga membutuhkan penerimaan pajak untuk pembangunan (Wicaksono dkk, 2022). Hal ini cukup wajar, sebagaimana disampaikan Boedijono dkk (2019) bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan pajak dan keuangan, sebagaimana diungkapkan oleh Wicaksono dan Puspita (2020) bahwa pelaku usaha juga perlu memperhatikan modal kerja, yaitu adanya keseimbangan antara aset dengan hutang yang berkaitan dengan permodalan usaha.

Pada pembahasan bab ini akan difokuskan pada aspek pajak penghasilan, meskipun terdapat pembahasan pajak pertambahan nilai juga, bergantung pada jenis transaksinya. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pembahasan pertama mengenai PPh 21 yang berisi mengenai hubungan antara perusahaan dengan karyawannya. Kemudian diikuti dengan pembahasan PPh 22 dengan dua transaksi yaitu transaksi dengan bendaharawan pemerintah dan transaksi berupa impor. Lebih lanjut pembahasan PPh 23 dengan dua transaksi juga yaitu transaksi sewa dan jasa, dimana objek jasa dipilih karena sering terjadi dalam praktik bisnis. Terakhir, pembahasan mengenai PPh 4 (2) Final, dengan dua transaksi juga yaitu sewa gedung dan hadiah undian.

8.2 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima. Penghasilan ini sendiri secara umum dapat dibagi pada beberapa pasal, yang penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

8.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan yang paling populer dihadapi oleh masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), mengingat objek pajaknya berkaitan dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, dan berbagai item lainnya yang pada intinya berkaitan hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja atau antara perusahaan dengan karyawannya baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

Ketentuan mengenai PPh 21 terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan untuk teknis perhitungan PPh 21 terdapat pada PER-16/PJ/2016. Meskipun PPh 21 sangat populer penerapannya di masyarakat, namun aturannya sangat kompleks dan terdiri dari berbagai rumus yang beragam. Sehingga membutuhkan kejelian dan

kecermatan dalam mengikuti peraturan perpajakan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan perpajakannya. Berikut contoh perhitungan dan pencatatan penjurnalan PPh 21 terkait gaji karyawan :

1. Andriansyah, manajer keuangan PT Wicaksana, status kawin / 2 anak, dalam sebulan memperoleh gaji pokok sebesar Rp 7.000.000,-, tunjangan transport Rp 600.000,-
2. Bambang Setiawan, staf keuangan PT Wicaksana, status kawin / 1 anak, dalam sebulan memperoleh gaji pokok sebesar Rp 5.000.000,-, tunjangan transport 10 % dari gaji pokok.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan sebagai berikut :

1. Andriansyah

Gaji pokok	= 7.000.000
Tunjangan	= <u>600.000</u>
Total penghasilan bruto sebulan	= 7.600.000
Biaya jabatan 5 % x 7.600.000	= <u>380.000</u>
Penghasilan netto sebulan	7.220.000
Penghasilan netto setahun	
12 x 7.220.000	86.640.000
PTKP setahun :	
WP sendiri	= 54.000.000
Status kawin	= 4.500.000
<u>2 tanggungan</u>	<u>= 9.000.000</u>
Total PTKP	<u>67.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	19.140.000

PPh 21 per tahun 5 % x 19.140.000 = 957.000

PPh 21 per bulan 957.000 : 12 = 79.750

2. Bambang Setiawan

Gaji pokok	= 5.000.000
Tunjangan	= <u>500.000</u>
Total penghasilan bruto sebulan	= 5.500.000
Biaya jabatan 5 % x 5.500.000	= <u>275.000</u>
Penghasilan netto sebulan	5.225.000

Penghasilan netto setahun	
12 x 5.225.000	62.700.000
PTKP setahun :	
WP sendiri = 54.000.000	
Status kawin = 4.500.000	
<u>1 tanggungan = 4.500.000</u>	
Total PTKP	<u>63.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	0

Karena PKP 0, maka atas penghasilan Bambang Setiawan tidak dipotong PPh 21. Hal ini dikarenakan penghasilan tidak kena pajak lebih besar dibandingkan penghasilan netto setahun, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 0 dan secara otomatis tidak perlu dipotong PPh 21.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, serta dengan asumsi bahwa pembayaran gaji dibayarkan pada bulan yang sama dengan bulan saat bekerja (misalkan gaji dibayarkan pada akhir bulan), maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

- PT Wicaksana pada saat melakukan pemotongan PPh 21:

Biaya Gaji	7.600.000	
	Kas	7.520.250
	Hutang PPh 21	79.750

- PT Wicaksana pada saat menyetorkan PPh 21 ke kas negara :

Hutang PPh 21	79.750	
	Kas	79.750

- Andriansyah selaku karyawan yang dipotong PPh 21 atas gaji yang diperoleh, akan mencatat sebagai berikut :

Kas	7.520.250	
PPh 21 dibayar dimuka	79.750	
	Pendapatan Gaji	7.600.000

Namun apabila gaji dibayarkan pada bulan yang berbeda, misalkan dibayarkan pada tanggal 1 di awal bulan berikutnya, maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut :

- PT Wicaksana pada akhir bulan mencatat penyesuaian atas pengakuan hutang gaji :

Biaya Gaji	7.600.000	
	Hutang Gaji	7.520.250
	Hutang PPh 21	79.750

- PT Wicaksana mencatat pembayaran gaji :

Hutang Gaji	7.520.250	
	Kas	7.520.250

- PT Wicaksana mencatat pembayaran PPh 21 yang telah dipotong pada akhir bulan :

Hutang PPh 21	79.750	
	Kas	79.750

- Andriansyah selaku karyawan mencatat penyesuaian sebagai berikut :

Piutang pendapatan gaji	7.520.250	
PPh 21 dibayar dimuka	79.750	
	Pendapatan Gaji	7.600.000

- Andriansyah mencatat penerimaan gaji sebagai berikut :

Kas	79.750	
	Piutang pendapatan gaji	79.750

8.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan merupakan jenis pemotongan dan atau pemungutan pajak yang dilakukan atas penyerahan barang. Pemberlakuan PPh Pasal 22 biasanya melekat juga adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila barang yang diserahkan merupakan suatu Barang Kena Pajak (BKP) menurut peraturan PPN. Tarif PPh 22 dan PPN masing-masing terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada pembahasan sub bab ini akan difokuskan pada dua pembahasan yang biasanya terdapat pada kasus praktik perpajakan di lapangan, yaitu PPh 22 atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah serta PPh 22 atas kegiatan impor.

1. PPh 22 transaksi dengan bendaharawan pemerintah

PPh 22 dikenakan atas transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah terhadap rekanannya. Namun dengan asumsi bahwa nilai transaksi (tidak termasuk PPN) lebih dari Rp 2.000.000,-. Apabila transaksi yang dilakukan tidak lebih dari Rp 2.000.000,- maka bendaharawan pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh 22 dan PPN terhadap bendaharawan pemerintah. Sedangkan khusus perlakuan PPN apabila transaksinya dibawah Rp 2.000.000,- maka rekanan harus memungut sendiri atas pengenaan transaksi tersebut.

PT Permata pada tanggal 12 Mei 2022 melakukan penyerahan 10 meja kantor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan nilai Rp 1.110.000,- / meja (harga termasuk PPN).

Sehingga perlakuan pajaknya dijabarkan sebagai berikut:

10 buah meja kantor x Rp 1.110.000,- = Rp 11.100.000,-

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setelah dikurangi PPN = Rp 10.000.000,- (nilai Rp 1.100.000,- merupakan PPN)

PPh 22 = 1,5 % x Rp 10.000.000,- = Rp 150.000,-

- Bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

a. Jurnal pada saat melakukan pembelian barang

Belanja barang 11.110.000

Kas

11.110.000

b. Jurnal pada saat pemungutan PPh 22 dan PPN

Kas

1.250.000

Pemungutan PPh 22 150.000

Pemungutan PPN 1.100.000

c. Jurnal pada saat penyetoran PPh 22 dan PPN		
Pemungutan PPh 22	150.000	
Pemungutan PPN	1.100.000	
Kas		1.250.000

- PT Permata akan menjurnal sebagai berikut :

a. Jurnal pada saat melakukan penjualan		
Kas	11.100.000	
Penjualan		10.000.000
PPN Keluaran		1.100.000
b. Jurnal pada saat pemungutan PPh 22 dan PPN		
PPh 22 dibayar dimuka	150.000	
PPN Keluaran	1.100.000	
Kas		1.250.000

2. PPh 22 atas kegiatan impor

PPh 22 dikenakan atas impor barang yang masuk ke Indonesia dan dipungut PPh 22 dengan tarif sebesar 2,5 % apabila importir memiliki angka pengenalan impor atau biasa disebut dengan API, serta tarif 7,5 % apabila importir tidak memiliki API. Barang impor selain dipungut PPh 22, biasanya terutang juga PPN dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) apabila barang tersebut tergolong barang mewah menurut peraturan pajak. Pelaksanaan perpajakan atas impor dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PT Jembrana, memiliki API, melakukan impor onderdil barang dari Jepang senilai Rp 100.000.000,-, selain itu terdapat pula nilai asuransi sebesar Rp 10.000.000,-, biaya angkut Rp 5.000.000,-, serta adanya bea lainnya senilai Rp 3.000.000,-. Berikut adalah perhitungan PPh 22 dan PPN atas transaksi tersebut :

Nilai Impor = Cost atas barang + biaya asuransi + biaya angkut + bea masuk lainnya
 Sehingga diperoleh nilai impor = 100.000.000,- + 10.000.000,- + 5.000.000,- + 3.000.000,- = 118.000.000,-
 PPh 22 = 2,5 % x 118.000.000,- = 2.950.000,-
 PPN = 10 % x 118.000.000,- = 11.800.000,-

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

- a. Jurnal pada saat pemungutan PPh 22 dan PPN

Kas	14.750.000
Pemungutan PPh 22	2.950.000
Pemungutan PPN	11.800.000

- b. Jurnal pada saat penyetoran PPh 22 dan PPN

Pemungutan PPh 22	2.950.000
Pemungutan PPN	11.800.000
Kas	14.750.000

- PT Jembrana akan menjurnal sebagai berikut :

- a. Jurnal untuk mencatat nilai impor

Pembelian	129.800.000
Kas	129.800.000

- b. Jurnal untuk mencatat pemungutan PPh 22 dan PPN

PPh 22 dibayar dimuka	2.950.000
PPN Keluaran	11.800.000
Kas	14.750.000

8.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pemotongan pajak atas bunga pinjaman, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan, royalti, sewa selain tanah dan atau bangunan, serta atas jasa yang diberikan oleh wajib pajak badan. PPh 23 bersifat pemotongan, karena dipotong atas penghasilan oleh pemberi penghasilan terhadap penerima penghasilan. Pada beberapa kasus tertentu, pengenaan PPh 23 juga berkaitan dengan PPN misalkan atas royalti, sewa, serta jasa. Sehingga perhitungannya dilakukan dalam satu transaksi yang sama. Perbedaannya adalah terkait PPN, justru penerima penghasilan yang akan memungut PPN (pengecualian apabila transaksi dengan bendaharawan pemerintah).

Tarif PPh 23 dan PPN masing-masing terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pada Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada kasus ini akan dibahas 2 transaksi saja yaitu terkait sewa selain tanah dan bangunan, serta transaksi atas jasa.

1. Sewa

Menurut aturan perpajakan, sewa terbagi menjadi 2 yaitu sewa tanah dan atau bangunan yang masuk pada kategori PPh Final Pasal 4 (2) dan sewa selain tanah dan atau bangunan yang masuk pada PPh 23, dimana tarifnya adalah 2 %.

PT. Permata pada tanggal 2 Mei 2022 membayar sewa kendaraan kepada Drs. Budianto atas penyewaan kendaraan dengan nilai sewa sebesar Rp 30.000.000,- per tahunnya, belum termasuk PPN.

Pemotongan PPh 23 = 2 % x 30.000.000,- = 600.000,-

PPN = 10 % x 30.000.000 = 3.000.000,-

- PT. Permata akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

a. Jurnal pengakuan atas biaya sewa

Biaya Sewa Kendaraan	30.000.000
Kas	30.000.000

b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 23 dan PPN

Kas	3.600.000
Hutang PPh 23	600.000
Hutang PPN	3.000.000

c. Jurnal pada saat penyetoran PPh 23 dan PPN

Hutang PPh 23	600.000
Hutang PPN	3.000.000
Kas	3.600.000

- Drs. Budianto akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

a. Jurnal pengakuan atas pendapatan

Kas	30.000.000
Pendapatan Sewa Kendaraan	30.000.000

b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 23 dan PPN	
PPh 23 dibayar dimuka	600.000
PPN	3.000.000
Kas	3.600.000

2. Jasa

Menurut peraturan perpajakan, jasa merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang dikenai PPh 23. Berbagai jenis jasa yang dikenakan PPh 23 tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan. Pada kasus ini, akan diberikan suatu contoh kasus mengenai jasa service mesin.

PT. Indah Raya pada tanggal 2 Juni 2022 membayar kepada CV. Biru Permai atas jasa service mesin dengan nilai penggantian sebesar Rp 3.000.000,-, belum termasuk PPN.

Pemotongan PPh 23 = $2\% \times 3.000.000,- = 60.000,-$

PPN = $10\% \times 3.000.000 = 300.000,-$

- PT. Indah Raya akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

a. Jurnal pengakuan atas biaya service mesin	
Biaya Service Mesin	3.000.000
Kas	3.000.000

b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 23 dan PPN	
Kas	360.000
Hutang PPh 23	60.000
Hutang PPN	300.000

c. Jurnal pada saat penyetoran PPh 23 dan PPN	
Hutang PPh 23	60.000
Hutang PPN	300.000
Kas	360.000

- CV. Biru Permai akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

a. Jurnal pengakuan atas pendapatan	
Kas	3.000.000
Pendapatan Jasa	3.000.000

b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 23 dan PPN	
PPh 23 dibayar dimuka	60.000
PPN Masukan	300.000
Kas	360.000

8.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) / PPh Final

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) / PPh Final, merupakan jenis pajak penghasilan yang pengenaannya dikenakan secara final. Final disini dalam artian bahwa atas penghasilan dan pajak yang telah dipotong, tidak diperhitungkan kembali pajak kurang bayar atau lebih bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan, namun tetap perlu dilaporkan dalam SPT tahunan tersebut. Hal ini berbeda dengan PPh Pasal 21, 22, dan 23, yang sebagian besar (tidak semuanya) merupakan PPh yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dapat menjadi kredit pajak atau pengurang perhitungan pajak lebih bayar atau kurang bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan.

Ketentuan mengenai jenis PPh 4 (2) terdapat pada Pasal 4 (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan untuk teknis perhitungan terdapat pada beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP). Pada kasus ini, akan dicontohkan 2 transaksi yang berkaitan dengan pemotongan PPh Pasal 4 (2), yaitu transaksi sewa tanah dan atau bangunan, serta hadiah undian.

1. Sewa Tanah dan atau Bangunan

Sewa tanah dan atau bangunan diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, dengan tarif 10 %. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa sewa dalam perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu sewa tanah dan atau bangunan serta sewa bukan tanah dan atau bangunan, dimana sewa tanah dan atau bangunan akan dikenai PPh Pasal 4 (2) sebagaimana contoh kasus berikut :

PT. Jaya pada tanggal 6 Juni 2022 membayar sewa gedung kepada Drs. Joko Yanto atas penyewaan gedung kantor dengan nilai sewa sebesar Rp 50.000.000,- per tahunnya, belum termasuk PPN.

Pemotongan PPh 4 (2) = $10\% \times 50.000.000,- = 5.000.000,-$
 PPN = $10\% \times 50.000.000 = 5.000.000,-$

- PT. Jaya akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

- a. Jurnal pengakuan atas biaya sewa

Biaya Sewa Gedung	50.000.000
Kas	50.000.000

- b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 4 (2) dan PPN

Kas	10.000.000
Hutang PPh 4 (2)	5.000.000
Hutang PPN	5.000.000

- c. Jurnal pada saat penyetoran PPh 4 (2) dan PPN

Hutang PPh 4 (2)	5.000.000
Hutang PPN	5.000.000
Kas	10.000.000

- Drs. Joko Yanto akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

- a. Jurnal pengakuan atas pendapatan

Kas	50.000.000
Pendapatan Sewa Gedung	50.000.000

- b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 4 (2) dan PPN

PPh 4 (2)	5.000.000
PPN	5.000.000
Kas	10.000.000

2. Hadiah Undian

Dalam peraturan pajak, terdapat beranekaragam jenis pajak, dimana setiap jenis hadiah bisa berbeda objek pajak dan jenis tarif pajaknya. Salah satu jenis hadiah dalam aturan pajak adalah hadiah undian, yang dikenai

pemotongan PPh Pasal 4 (2). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian, atas hadiah undian dikenakan tarif pajak 25 %. Tarif ini lebih besar dibandingkan dengan jenis hadiah lainnya, mengingat bahwa hadiah undian tidak memerlukan usaha lebih oleh wajib pajak dalam memperolehnya, berbeda dengan hadiah lainnya yang memerlukan usaha berlebih misalkan seperti hadiah kejuaraan dan perlombaan. Berikut adalah contoh kasus perlakuan atas hadiah undian:

Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Ekawati pada tanggal 18 Agustus 2022 memberikan hadiah undian kepada salah satu nasabahnya, Bapak Hafid Alim, yaitu berupa sepeda motor senilai Rp 20.000.000,-.

Pemotongan PPh 4 (2) = 25 % x 20.000.000,- = 5.000.000,-

- Bank Ekawati akan melakukan penjurnalan sebagai berikut :

- a. Jurnal pengakuan atas biaya hadiah undian

Biaya Hadiah	20.000.000
Kas	20.000.000

- b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 4 (2)

Kas	5.000.000
Hutang PPh 4 (2)	5.000.000

- c. Jurnal pada saat penyetoran PPh 4 (2)

Hutang PPh 4 (2)	5.000.000
Kas	5.000.000

- Ekawati melakukan penjurnalan berikut ini :

- a. Jurnal pengakuan atas hadiah undian

Kendaraan	20.000.000
Modal	20.000.000

- b. Jurnal pada saat pemotongan PPh 4 (2)

PPh 4 (2)	5.000.000
Kas	5.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. 2020. Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, 3(4), 619-625.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V. 2019. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 - 20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor [132 Tahun 2000](#) tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wicaksono, G., & Puspita, Y. 2020. The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 3(4), 588-596.
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Asmandani, V., Kusumaningrum, N.D. 2022. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 1,

2022, <http://dx.doi.org/10.46730/jkp.13.1.p.86-92>

BAB 9

PERHITUNGAN DALAM AKUNTANSI SEWA GUNA USAHA UNTUK LESSOR

Oleh Nurchayati

9.1 Akuntansi sewa guna usaha operasi

Akuntansi sewa guna usaha operasi, lessor mengakui pendapatan saat pembayaran diterima. Jika ada variasi signifikan dalam syarat pembayaran, ayat jurnal diperlukan untuk mencerminkan pola garis lurus pengakuan pendapatan. Biaya langsung awal yang dikeluarkan berkaitan dengan sewa guna usaha operasi ditangguhkan dan diamortisasikan dengan dasar garis lurus selama masa sewa guna usaha sehingga dapat dibandingkan dengan pendapatan sewa.

Contoh, peralatan yang disewagunausahakan untuk 5 tahun oleh PT Merdeka kepada PT Cahaya pada 1 Januari 2017 sebesar Rp65.000.000 per tahun termasuk biaya pelaksanaan Rp5.000.000 per tahun, memiliki harga perolehan sebesar Rp400.000.000 bagi lessor, PT Merdeka. Biaya langsung awal Rp15.000.000 dikeluarkan untuk memperoleh dan menyelesaikan sewa guna usaha. Peralatan memiliki perkiraan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Asumsi tidak ada opsi pembelian atau pembaharuan jaminan oleh lessee, sewa guna usaha tidak memenuhi salah satu dari empat klasifikasi umum sewa guna usaha dan akan diperlakukan sebagai sewa guna operasi. Pencatatan untuk pembayaran biaya langsung awal dan penerimaan pembayaran sewa guna usaha oleh PT Merdeka sebagai berikut:

2017 1 Jan	Biaya langsung awal ditangguhkan Kas	15.000.000	15.000.000
	Kas	65.000.000	
	Pendapatan sewa		60.000.000
	Biaya pelaksanaan		5.000.000

Penerimaan dari lessee sebesar Rp5.000.000 untuk membayar biaya pelaksanaan dapat diperlakukan sebagai kredit (pengurangan) pada akun biaya pelaksanaan, atau sebagai kredit pada akun pendapatan yang terpisah yang dapat dibandingkan dengan biaya pelaksanaan.

Asumsikan bahwa lessor menyusutkan peralatan dengan garis lurus sepanjang 10 tahun umur manfaat dan mengamortisasikan biaya awal langsung dengan dasar garis lurus selama 5 tahun masa sewa guna usaha, ayat jurnal untuk penyusutan dan amortisasi pada akhir tahun pertama adalah:

2017 31Des	Amortisasi biaya langsung awal Biaya langsung awal ditangguhkan	3.000.000	3.000.000
	Beban penyusutan peralatan yang disewagunausahakan Akumulasi penyusutan atas peralatan yang disewagunausahakan	40.000.000	40.000.000

Jika periode sewa dan tahun fiskal lessor tidak sama, atau jika lessor menyiapkan laporan interim, penyesuaian diperlukan untuk mencatat pendapatan sewa diterima di muka pada akhir periode akuntansi. Amortisasi biaya langsung awal akan disesuaikan untuk mencerminkan sebagian tahun.

9.2 Akuntansi Sewa Guna Usaha Pembiayaan Langsung

Akuntansi untuk sewa guna usaha pembiayaan langsung lessor hampir sama dengan sewa guna usaha modal untuk lessee, namun ayat jurnal yang dibalik untuk menyediakan pendapatan bunga dan bukan beban bunga dan pengurangan untuk piutang pembayaran sewa guna usaha dan bukan kewajiban sewa guna usaha.

Mengacu contoh sebelumnya bahwa harga perolehan peralatan PT Merdeka sama dengan nilai pasar wajar Rp250.192.000 dan pembelian oleh lessor telah dimasukkan dalam akun peralatan yang dibeli untuk sewa guna usaha. Pencatatan sewa guna usaha awal adalah :

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Peralatan yang dibeli untuk sewa guna usaha	250.192.000	250.192.000
---------------	---	-------------	-------------

Atau jika piutang pembayaran sewa guna usaha dicatat pada jumlah kotornya

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Peralatan yang dibeli untuk sewa guna usaha Pendapatan bunga diterima dimuka	300.000.000	250.192.000 49.808.000
---------------	---	-------------	-------------------------------

Pembayaran pertama akan dicatat sebagai berikut:

2017 1 Jan	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Biaya pelaksanaan	65.000.000	60.000.000 5.000.000
---------------	--	------------	-------------------------

Lessor membayar biaya pelaksanaan tetapi menagihkannya pada lessee. Lessor dapat mencatat penerimaan biaya pelaksanaan dengan mendebit kas dan mengkredit akun biaya beban biaya pelaksanaan. Pada saat lessor membayar biaya, akun beban didebit. Lessor berperan sebagai saluran biaya-biaya ini kepada lessee dan menanggung beban hanya jika lessee gagal melakukan pembayaran. Pendapatan bunga akan dicatat sepanjang masa sewa guna usaha sebagaimana tabel 1. Pada akhir tahun pertama, pencatatan berikut akan dilakukan untuk mencatat pembayaran sewa guna usaha kedua, mengakui pendapatan bunga untuk tahun 2017 dan mengakui pembayaran dimuka untuk biaya pelaksanaan tahun berikutnya sebagai kredit yang ditangguhkan.

2017 1 Jan	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Pendapatan bunga Biaya pelaksanaan ditangguhkan	65.000.000	 40.981.000 19.019.000 5.000.000
---------------	---	------------	---

Tabel 1. Skedul penerimaan sewa guna usaha dan pendapatan bunga (sewa guna usaha lima tahun, pembayaran tahunan Rp60.00.000 diluar biaya pelaksanaan), bunga 10%)

Tanggal	Keterangan	Pendapatan Bunga* (000)	Penerimaan Pembayaran (000)	Pengurangan dalam Piutang (000)	Piutang Pembayaran Sewa Guna Usaha (000)
1/1/17	Saldo awal				Rp250.192
1/1/17	Penerimaan		Rp60.000	Rp60.000	190.192
31/12/17	Penerimaan	Rp19.019	60.000	40.981	149.211
31/12/18	Penerimaan	14.921	60.000	45.079	104.132
31/12/19	Penerimaan	10.413	60.000	49.587	54.545
31/12/20	Penerimaan	5.455	60.000	54.545	0
		Rp49.808	Rp300.000	Rp250.192	

*Piutang pembayaran sewa guna usaha sebelumnya x 10%

Atau jika piutang pembayaran sewa guna usaha dicatat pada jumlah kotornya:

2017 31 Des	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Biaya pelaksanaan ditangguhkan	65.000.000	 60.000.000 5.000.000
2017 31 Des	Pendapatan bunga diterima dimuka Pendapatan bunga	19.019.000	 19.019.000

Dalam sewa guna usaha pembiayaan, tidak ada beban penyusutan tahunan yang dicatat oleh lessor berkaitan dengan aset yang disewagunausahakan pada perjanjian ini karena aset telah dijual kepada lessee dan dipindahkan dari pembukuan lessor. Berdasarkan pencatatan jurnal, bagian aset pada neraca lessor 31 Desember 2017 akan melaporkan piutang sewa guna usaha sebagai berikut:

PT Merdeka Neraca (sebagian) Per 31 Desember 2017	
Aset Lancar	
Piutang pembayaran sewa guna usaha	Rp45.079.000
Aset tidak lancar	
Piutang pembayaran sewa guna usaha (diluar Rp45.079.000 yang termasuk dalam aset lancar)	Rp104.132.000

Jika sewa guna usaha pembiayaan langsung mengandung opsi pembelian maka jumlah opsi ditambahkan ke piutang dan komponen bunga dari jumlah opsi (perbedaan antara jumlah opsi dan nilai sekarang pada tanggal penandatanganan sewa guna usaha) ditambahkan pada akun pendapatan bunga yang diterima dimuka. Ayat jurnal periodik dan perhitungan dilakukan seolah-olah jumlah penawaran pembelian merupakan pembayaran sewa tambahan.

9.2.1 Akuntansi sewa guna usaha pembiayaan langsung dengan nilai residu

Jika properti yang disewagunausahakan diharapkan memiliki nilai sisa, jumlah kotor dari nilai sisa yang diharapkan ditambahkan ke akun piutang. Jika nilai sisa dijamin maka diperlakukan dalam akun yang sama seperti opsi pembelian. Jika nilai sisa tidak dijamin, maka lessor diharapkan memiliki aset yang nilainya sama dengan jumlah sisa pada akhir masa sewa guna usaha.

Contoh PT Merdeka sebelumnya kecuali bahwa aset memiliki nilai sisa pada akhir periode masa sewa guna usaha 5 tahun sebesar Rp75.000.000 (baik dijamin maupun tidak dijamin) daripada opsi pembelian murah, asumsikan bahwa harga perolehan peralatan untuk PT Merdeka sama dengan nilai pasar wajar yaitu Rp296.761.000. Ayat jurnal untuk mencatat sewa guna usaha dan pembayaran pertama sebagai berikut:

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Peralatan yang dibeli untuk sewa guna usaha	296.761.000	296.761.000
	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Biaya pelaksanaan yang ditangguhkan	65.000.000	60.000.000 5.000.000

Penghitungan pendapatan bunga akan identik dengan penghitungan beban bunga yang disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Skedul penerimaan sewa guna usaha dan pendapatan bunga (sewa guna usaha lima tahun, pembayaran tahunan Rp75.000.000 diluar biaya pelaksanaan), bunga 10%)

Tanggal	Keterangan	Penerimaan Pembayaran (000)	Pendapatan Bunga* (000)	Pengurangan dalam Piutang (000)	Piutang Pembayaran Sewa Guna Usaha (000)
1/1/17	Saldo awal				Rp296.761
1/1/17	Penerimaan	Rp60.000		Rp60.000	236.761
31/12/17	Penerimaan	60.000	Rp23.676	36.324	200.437
31/12/18	Penerimaan	60.000	20.044	39.956	160.481
31/12/19	Penerimaan	60.000	16.048	43.952	116.529
31/12/20	Penerimaan	60.000	11.653	48.347	68.182
31/12/21	Penerimaan	75.000	6.818	68.182	0
		Rp375.000	Rp78.239	Rp296.761	

Pada akhir tahun pertama lessor akan mencatat sebagai berikut:

2017	Kas	65.000.000
31	Piutang pembayaran sewa guna usaha	36.324.000
Des	Biaya pelaksanaan yang ditangguhkan	5.000.000
	Pendapatan bunga	23.676.000

Pada akhir periode sewa guna usaha, lessor akan mencatat pengembalian aset yang disewagunausahakan dengan asumsi nilai sisa sama seperti yang diperkirakan awalnya, dengan ayat jurnal sebagai berikut:

2021	Peralatan	75.000.000	
31	Piutang pembayaran sewa guna		68.182.000
Des	usaha		6.818.000
	Pendapatan bunga		

9.2.2 Biaya langsung awal berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan langsung

Jika lessor mengeluarkan biaya langsung awal dalam hubungannya dengan sewa guna usaha pembiayaan langsung, biaya tersebut dicatat sebagai aset yang terpisah, meningkatkan investasi sewa guna usaha bersih karena investasi sewa guna usaha bersih awal meningkat tetapi pembayaran sewa guna usaha tetap sama, adanya biaya langsung awal mengakibatkan perolehan tingkat bunga implisit yang lebih rendah oleh lessor. Memasukkan biaya langsung awal sebagai bagian dari investasi sewa guna usaha bersih awal berarti menyebarkan biaya awal sepanjang masa sewa guna usaha dan mengurangi jumlah pendapatan bunga yang akan diakui.

9.3 Akuntansi sewa guna usaha jenis penjualan

Sewa guna usaha jenis penjualan, lessor mencatat harga jual aset terkait, biaya barang yang terjual dan pengurangan persediaan yang terkait, serta piutang sewa guna usaha. Informasi yang dibutuhkan untuk mencatat sewa guna usaha jenis penjualan adalah sebagai berikut:

1. Piutang sewa guna usaha atau investasi bersih yaitu nilai sekarang pembayaran sewa guna usaha minimum ditambah residu yang tidak dijamin. Piutang pembayaran sewa guna usaha menyertakan nilai sekarang dari nilai residu, baik dijamin ataupun tidak.
2. Harga jual aktiva yaitu nilai sekarang dari pembayaran sewa guna usaha minimum.
3. Harga pokok penjualan yaitu biaya perolehan aset bagi lessor dikurangi nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin.

Ketika mencatat pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan, ada perbedaan antara akuntansi untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Nilai residu yang dijamin dapat dianggap sebagai bagian dan pendapatan penjualan karena lessor mengetahui bahwa seluruh aset telah terjual. Terdapat kepastian yang kecil bahwa bagian nilai residu yang tidak

dijamin dari aset telah terjual, oleh karena itu penjualan dan harga pokok penjualan hanya diakui untuk bagian aset yang realisasinya terjamin. Akan tetapi, jumlah laba kotor dari penjualan aset adalah sama apakah nilai residu yang digunakan dijamin atau tidak dijamin.

Contoh: Asumsikan lessor untuk peralatan adalah PT Abadi bukan PT Merdeka, nilai pasar wajar pada peralatan sama dengan nilai sekarang (pembayaran sewa guna usaha masa depan didiskontokan pada 10%), atau Rp250.192.000. Perhitungan ini kebalikan daripada apa yang akan terjadi dalam praktik; normalnya, nilai pasar wajar diketahui, dan pembayaran minimum sewa guna usaha ditetapkan pada jumlah yang akan menghasilkan tingkat pengembalian yang diinginkan lessor.

Asumsikan harga perolehan peralatan PT Abadi Rp160.000.000 dan terjadi biaya langsung awal sebesar Rp15.000.000. Tiga nilai tersebut dan jumlah pendapatan yang terkait diperlihatkan berikut ini:

(1) Pembayaran minimum sewa guna usaha (Rp65.000.000 – Rp5.000.000) x 5	Rp300.000.000
(2) Nilai pasar wajar aset yang disewagunausahakan peralatan	Rp250.192.000
(3) Harga perolehan aset yang disewagunausahakan bagi lessor; ditambah biaya langsung awal	Rp175.000.000

Pembayaran minimum sewa guna usaha	Rp300.000.000
Nilai pasar wajar aset yang disewagunausahakan	Rp250.192.000
Pendapatan bunga	Rp49.808.000

Nilai pasar wajar aset yang disewagunausahakan	Rp250.192.000
Harga perolehan aset yang disewagunausahakan bagi lessor; ditambah biaya langsung awal	Rp175.000.000
Keuntungan perusahaan manufaktur	Rp75.192.000

Pendapatan bunga Rp49.808.000 adalah sama dengan yang dicontohkan untuk sewa guna usaha pembiayaan langsung sebelumnya, dan diakui sepanjang masa sewa guna usaha dengan pencatatan yang sama dan sesuai Tabel 1. Keuntungan perusahaan manufaktur diakui sebagai pendapatan langsung dalam periode tersebut dengan memasukkan nilai pasar wajar dari aset sebagai suatu penjualan dan mendebit harga perolehan peralatan yang dicatat dalam persediaan barang jadi pada harga pokok penjualan. Biaya langsung yang sebelumnya dicicil diakui sebagai biaya langsung dengan meningkatkan harga pokok penjualan pada jumlah yang dikeluarkan untuk biaya-biaya ini. Hal ini mengurangi jumlah keuntungan langsung yang dicatat. Pembayaran biaya pelaksanaan diperlakukan dengan cara yang sama seperti pada sewa guna usaha pembiayaan langsung.

Ayat jurnal untuk mencatat informasi ini pada pembukuan PT Abadi pada awal periode sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Penjualan	250.192.000	250.192.000
	Harga Pokok Penjualan Persediaan barang jadi Biaya langsung awal ditangguhkan	175.000.000	160.000.000 15.000.000
	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Biaya pelaksanaan	65.000.000	60.000.000 5.000.000

Ayat jurnal pertama mencatat penjualan dan mengakui adanya piutang yang dilaporkan pada nilai sekarang. Ayat jurnal kedua, memindahkan persediaan dan menangguhkan biaya langsung dari buku lessor dan mengakui harga pokok penjualan. Ayat jurnal ketiga, mencatat pembayaran pertama. Contoh tersebut tidak menunjukkan pembayaran biaya langsung awal. Akun biaya langsung awal yang ditangguhkan akan dibebankan pada saat biaya tersebut dibayar.

Laporan laba rugi tahun 2017 akan memasukkan jumlah penjualan dan harga pokok penjualan sehingga menghasilkan keuntungan perusahaan manufaktur sebesar Rp75.192.000 dan pendapatan bunga Rp19.019.000.

9.3.1 Akuntansi untuk sewa guna tipe penjualan dengan penawaran opsi pembelian atau jaminan nilai sisa

Jika perjanjian sewa guna usaha mengharuskan lessor untuk menerima sejumlah pembayaran pada akhir masa sewa guna usaha dalam bentuk opsi pembelian atau jaminan nilai sisa, pembayaran minimum sewa guna usaha akan memasukkan jumlah ini. Piutang kemudian ditingkatkan dengan nilai sekarang pembayaran masa depan, dan penjualan ditingkatkan dengan nilai sekarang jumlah tambahan.

Contoh, asumsikan PT Abadi sebagai lessor pada sewa guna usaha yang disajikan pada tabel 2.

Ayat jurnal awal ketika opsi pembelian atau penjaminan nilai sisa sebesar Rp75.000.000 terutang pada akhir lima tahun masa sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Penjualan	296.761.000	296.761.000
	Harga Pokok Penjualan Persediaan barang jadi Biaya langsung awal ditangguhkan	175.000.000	160.000.000 15.000.000
	Kas Piutang pembayaran sewa guna usaha Biaya pelaksanaan	65.000.000	60.000.000 5.000.000

Karena sewa guna usaha sekarang memasukkan opsi pembelian murah, penjualan meningkat sebesar Rp45.569.000 (nilai sekarang dari jumlah penawaran pembelian) melebihi jumlah yang dicatat pada contoh sebelumnya dan keuntungan perusahaan manufaktur juga meningkat sejumlah ini.

9.3.2 Akuntansi untuk sewa guna usaha tipe penjualan dengan nilai sisa yang tidak dijamin

Ketika perjanjian sewa guna usaha tipe penjualan tidak berisi opsi pembelian atau penjaminan nilai sisa, tetapi umur ekonomi aset yang disewagunausahakan melebihi masa sewa guna usaha, nilai sisa dari properti akan tetap untuk lessor, hal ini disebut nilai sisa yang tidak dijamin. Nilai sisa yang tidak dijamin tidak akan dimasukkan dalam akun penjualan karena akun penjualan menggambarkan nilai sekarang dari pembayaran minimum sewa guna usaha, tetapi harga pokok penjualan akan dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin untuk mengakui bahwa lessor akan menerima kembali aset yang disewagunausahakan sebesar Rp75.000.000 (sama dengan nilai sekarang sebesar Rp46.569.000) pada akhir masa sewa guna usaha. Ayat jurnal untuk mencatat sewa guna usaha dengan nilai sisa yang tidak diajamin adalah:

2017 1 Jan	Piutang pembayaran sewa guna usaha Penjualan	250.192.000	250.192.000
	Harga Pokok Penjualan (Rp175.000.000 - Rp46.569.000)	128.431.000	
	Persediaan barang jadi (Rp160.000.000 - Rp46.569.000)		113.431.000
	Biaya langsung awal ditangguhkan		15.000.000
	Piutang pembayaran sewa guna usaha Persediaan barang jadi	46.569.000	46.569.000

Satu-satunya perbedaan antara akuntansi untuk nilai sisa yang dijamin dan tidak dijamin atau opsi pembelian adalah nilai sekarang yang tidak dijamin dikurangkan dari harga perolehan peralatan yang disewagunausahakan yang terjual. Pengurangan terjadi karena bagian dari aset yang disewagunausahakan yang digambarkan oleh nilai sisa yang tidak dijamin akan dikembalikan pada akhir masa sewa guna usaha dan karena tidak terjual pada masa penandatanganan sewa guna usaha. Nilai persediaan sebesar Rp46.569.000 yang digambarkan dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak

dijamin belum dijual melainkan telah ditukar dengan suatu piutang dengan jumlah yang sama.

Laba kotor transaksi adalah sama, baik pada nilai sisa yang dijamin maupun yang tidak dijamin.

	Nilai sisa yang dijamin	Nilai sisa yang tidak dijamin
Penjualan	Rp296.761.000	Rp250.192.000
Harga Pokok Penjualan	175.000.000	128.431.000
Laba kotor	Rp121.761.000	Rp121.761.000

9.4 Penjualan aset selama masa sewa guna usaha

Jika lessor menjual suatu aset kepada lessee selama masa sewa guna usaha, suatu keuntungan atau kerugian diakui atas selisih antara saldo piutang dan harga jual aset tersebut. Jika aset yang disewagunausahakan seperti yang disajikan pada tabel 1 dijual pada tanggal 31 Desember 2019 dengan harga Rp140.000.000 sebelum pembayaran sewa sebesar Rp60.000.000 dilakukan, suatu keuntungan sebesar Rp25.455.000 akan dilaporkan. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan sebagai berikut:

2019	Kas	140.000.000	
31	Pendapatan bunga		10.413.000
Des	Piutang pembayaran sewa guna usaha		104.132.000
	Keuntungan dari penjualan aset yang disewagunausahakan		25.455.000

Lessor mengakui suatu keuntungan atau kerugian dari penjualan, namun lessee mencatat transaksi tersebut sebagai suatu pertukaran aset sejenis dan menunda keuntungan atau kerugian melalui suatu penyesuaian dalam nilai aset yang dibeli.

9.5 Perlakuan sewa guna usaha pada laporan arus kas lessor

Sewa guna usaha operasi tidak menimbulkan masalah khusus bagi lessor dalam menyusun suatu laporan arus kas, kecuali untuk biaya langsung awal karena biaya langsung awal diakui sebagai suatu aset pada sewa guna usaha operasi, pembayaran biaya tersebut akan dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Pada metode tidak langsung, amortisasi biaya langsung awal akan ditambahkan pada laba bersih dengan cara yang sama laba disesuaikan untuk penyesuaian, sedangkan penerimaan pembayaran sewa guna usaha akan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih dan tidak memerlukan penyesuaian. Pada metode langsung, amortisasi akan diabaikan, sedangkan penerimaan pembayaran sewa guna usaha akan dilaporkan sebagai bagian dari penerimaan pendapatan.

Sewa guna usaha pembiayaan langsung bagi lessor, transaksi tersebut dipandang sebagai suatu aktivitas investasi daripada aktivitas pendanaan. Bagian dari penerimaan yang mewakili bunga akan disertakan dalam laba bersih dan tidak memerlukan penyesuaian pada metode tidak langsung. Penyertaan ini akan menjadi bagian arus kas masuk dari bunga pada metode langsung. Bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang mewakili pokok kewajiban akan dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi.

Pada sewa guna jenis penjualan, keuntungan perusahaan manufaktur dikurangi biaya langsung awal dilaporkan dalam laba bersih, tetapi arus kas yang masuk saat pembayaran sewa guna usaha diterima. Pada metode tidak langsung diperlukan pengurangan dari laba bersih untuk keuntungan perusahaan manufaktur pada tanggal penyerahan sewa guna usaha. Pengurangan ini akan secara otomatis terjadi seiring dengan perubahan pada persediaan biaya awal yang ditangguhkan, dan piutang pembayaran sewa guna usaha bersih tercermin dalam bagian operasi pada laporan arus kas. Transaksi dibukukan sebagai suatu penjualan, semua penerimaan setelahnya pada metode tidak langsung dilaporkan sebagai arus kas masuk

aktivitas operasi, baik sebagai pendapatan bunga atau sebagai pengurang dalam piutang pembayaran sewa guna usaha bersih. Pada metode langsung semua penerimaan sewa guna usaha akan disertakan dalam aktivitas operasi. Ringkasan perlakuan pengaruh sewa guna usaha pada laporan arus kas disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan pengaruh sewa guna usaha pada laporan arus kas

	Aktivitas operasi		Aktivitas Investasi
	Metode tidak langsung	Metode langsung	
Sewa guna usaha operasi:			
Biaya langsung awal			-Kas
Amortisasi biaya langsung awal	+LB	Tidak ada pengaruh	
Penerimaan sewa guna usaha:	LB	+Kas	
Sewa guna usaha pembiayaan langsung:			-Kas
Biaya langsung awal	+LB	Tidak ada pengaruh	
Amortisasi biaya langsung awal	LB	+Kas	
Penerimaan sewa guna usaha-bunga			+Kas
Penerimaan sewa guna usaha-pokok	-LB	Tidak ada pengaruh	-Kas
Sewa guna penjualan:			
Biaya langsung awal	LB	+Kas	
Keuntungan perusahaan manufaktur	LB	+Kas	
Penerimaan sewa guna usaha-bunga			
Penerimaan sewa guna usaha-pokok			

Keterangan:

LB = dimasukkan dalam laba bersih

+LB = ditambahkan sebagai suatu penyesuaian pada laba bersih

- LB = dikurangkan sebagai suatu penyesuaian terhadap laba bersih
- +Kas = dilaporkan sebagai suatu penerimaan kas
- Kas = dilaporkan sebagai suatu pembayaran kas

DAFTAR PUSTAKA

- Kieso, Weygandt & Warfield. 2007. *Akuntansi Intermediate, edisi kedua belas, jilid 3*. PT Gelora Aksara Pratama
- Martani, Siregar, Wargani, Farahmita, Tanujaya & Hidayat. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Penerbit Salemba Empat.
- Stice, Stice & Skousen. 2007. *Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting*, Penerbit Salemba Empat.

BAB 10

PERUBAHAN AKUNTANSI DALAM PERUSAHAAN SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU

Oleh Aprih Santoso

10.1 Pendahuluan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

10.2 Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku

Dalam proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankannya sesuai standar yang berlaku. Menurut Abubakar & Wibowo (2004) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan. Disisi lain, Menurut Ridwan & Inge (2003) Keuangan Merupakan Ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan bisnis. Bagi

seorang akuntan, akuntansi keuangan adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, hingga menyajikan sebuah laporan keuangan. Menurut Surya (2012), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan.

Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penerapan prospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi, masing-masing adalah:

1. Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut;
2. Pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi.

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau laibilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini dari, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan, aset dan laibilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan, sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan.

Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut:

1. Dipersyaratkan oleh suatu PSAK; atau
2. Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya

terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas.

Adapun penerapan perubahan kebijakan akuntansinya yaitu :

1. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada.
2. jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Sementara itu, dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi, pada saat:

1. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
2. Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.

10.3 Perubahan dalam Prinsip Akuntansi

Perubahan dalam prinsip akuntansi adalah penggunaan suatu prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam periode sebelumnya. Perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip ekonomi yang berlaku umum ke yang lainnya. Pengujian yang seksama harus dilaksanakan dalam setiap situasi untuk memastikan bahwa perubahan prinsip memang telah terjadi. Akhirnya, jika prinsip akuntansi yang sebelumnya diikuti tidak dapat diterima atau jika prinsip itu diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi yang berlaku umum dianggap sebagai koreksi kesalahan Perpindahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual dianggap juga sebagai koreksi kesalahan.

Perubahan dalam penggunaan prinsip akuntansi ini bisa diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : perubahan prinsip akuntansi yang mempunyai akibat kumulatif, perubahan prinsip akuntansi yang mempunyai akibat retroaktif, dan perubahan metode penentuan penentuan harga pokok persediaan ke LIFO.

Dampak perubahan dari satu prinsip akuntansi yang diterima ke prinsip akuntansi lainnya dicerminkan oleh pelaporan efek kumulatif dari perubahan tersebut dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Ketika suatu perubahan prinsip akuntansi terjadi, laporan keuangan untuk seluruh periode laporan sebelumnya, guna kepentingan komparatif dengan laporan keuangan tahun berjalan, disajikan seperti yang dilaporkan sebelumnya.

10.4 Perubahan dalam Taksiran-taksiran Akuntansi

Banyak alokasi atau pembebanan biaya didasarkan pada taksiran-taksiran dimana taksiran ini dibuat dengan suatu kebijaksanaan. Misalnya pembebanan kerugian piutang, taksiran umur dalam perhitungan depresiasi, dan

taksiran jumlah garansi yang akan dibayar. Pada periode-periode berikutnya mungkin dapat diketahui bahwa taksiran-taksiran yang sudah dibuat adalah tidak benar sehingga perlu direvisi.

Bila taksiran sudah dibuat dengan sebaik-baiknya tapi ternyata tidak tepat, maka perubahan-perubahan yang dibuat sebaiknya dibebankan pada periode berjalan dan periode-periode yang akan datang. Periode-periode yang lalu sudah tidak perlu diubah karena perubahan taksiran ini baru diketahui pada periode berjalan.

10.5 Perubahan Kesatuan Usaha

Laporan keuangan bisa berubah karena adanya perubahan kesatuan usaha. Perubahan kesatuan usaha ini terjadi dalam hal disusunnya laporan keuangan konsolidasi sebagai ganti laporan keuangan masing-masing perusahaan, perubahan-perubahan dalam anak perusahaan yang laporan-laporannya dikonsolidasikan, atau terjadinya penggabungan-penggabungan baru. Bila terjadi perubahan kesatuan usaha maka laporan keuangan tahun berjalan harus menjelaskan sifat-sifat dan sebab-sebab perubahan itu.

Di samping itu akibat-akibat perubahan terhadap laba rugi juga harus dicantumkan dalam laporan laba rugi sebelum elemen-elemen luar biasa, begitu juga laba bersih dan jumlah pendapatan per lembar saham (EPS). Laporan keuangan tahun berikutnya tidak perlu lagi mencantumkan penjelasan seperti laporan tahun berjalan. Agar laporan keuangan tahun berjalan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, laporan keuangan tahun sebelumnya harus disusun dengan anggapan jika seandainya sudah terjadi perubahan kesatuan usaha.

Agar Laporan Keuangan yang kita susun selalu *update* dan benar-benar menggambarkan kondisi riil perusahaan maka kita perlu memperhatikan segala perubahan yang terjadi. Kemudian membuat koreksi dan

penyesuaian terhadap perubahan-perubahan itu. Tanpa memperhatikan itu, maka laporan keuangan yang kita buat hanya menjadi seonggok kertas tanpa arti dan makna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Wibowo. 2004. *Akuntansi Untuk Bisnis: Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Baridwan, Z. 2012. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE.
- Hanafi, M. M., 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi 5, Penerbit: UPP STIM YKPN
- Harahap, S. S., 2010. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2010. Jakana: Rajawali Pers.
- Surya, R. A. S. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sundjaja, R.S. & Berlian, I.. 2003. *Manajemen Keuangan*. Edisi 5. Jakarta: Literata.

BIODATA PENULIS



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA
Dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai Junior Accountant Staff selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan resign dari Bank Mandiri.

Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik.

Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang.

Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com

BIODATA PENULIS



Amelia Rizky Alamanda, S.E., M.M.

Dosen tetap di Universitas Padjadjaran Program Studi
Akuntansi

Penulis lahir di Denpasar pada tanggal 14 Mei 1990. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Padjadjaran Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran.

BIODATA PENULIS



Fice Handayani, SE, Ak, MM

Staf Dosen STIE Balikpapan Jurusan Akuntansi

Penulis lahir di Padang tanggal 21 Agustus 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN). Bergabung menjadi dosen STIEPAN pada tahun 2009. Menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi pada Universitas Andalas (UNAND) tahun 2002. Dan melanjutkan pendidikan Magister Manajemen (S2) konsentrasi Manajemen Keuangan tahun 2010 dan lulus tahun 2012 pada Universitas Mulawarman (UNMUL).

BIODATA PENULIS



Neks Triani, SE., M.Si.

Dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 15 Februari 1987. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Menyelesaikan pendidikan S1 program studi Akuntansi pada Universitas 45 Makassar dan melanjutkan S2 program studi Magister Akuntansi pada Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan.

BIODATA PENULIS



Parju

Staf Dosen Program Studi Akuntansi UNTAG Semarang

Penulis lahir di Sragen Tanggal 21 Oktober 1963. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di UNTAG Semarang tahun 1989, S1 Akuntansi di UNTAG Semarang tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan Di Universitas Hasanudin Tahun 1998

BIODATA PENULIS



Yenny Wati

Staf Dosen Jurusan Akuntansi

Yenny Wati adalah dosen di Fakultas Bisnis, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Akuntansi di Politeknik Caltex Riau, S-1 Akuntansi di Universitas Riau dan S-2 Magister Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Riau. Penulis juga aktif memublikasikan hasil penelitiannya di berbagai seminar dan jurnal baik nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Sri Suyati

Dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17
Agustus 1945 Semarang Program Studi Akuntansi

Penulis Lahir di Semarang, Dosen tetap Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Program Studi
Akuntansi, Menyelesaikan S1 Manajemen dan S1 Akuntansi dan
S2 pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Magister
Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, saat ini
sedang Studi Lanjut S3 di Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga Tahap Akhir

BIODATA PENULIS



**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA.,
CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CTA., CADE.**

Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember

Penulis adalah Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Penulis juga seorang praktisi dan aktif menjadi peneliti/narasumber/*trainer* pelatihan dan riset di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis berpengalaman dalam hibah penelitian dan pengabdian kompetitif nasional, hibah penelitian dari *Islamic Development Bank* (IsDB), serta hibah internal Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 19 buah buku.

email : galih.fisip@unej.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Nurchayati, SE, MSi, Ak
Staf Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1963. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen, S2 Akuntansi dan Program Pendidikan Profesi Akuntan pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Aprih Santoso

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

Penulis lahir di Semarang, menghabiskan masa studi SD, SMP dan SMEA di Semarang, mulai tahun 1970 s/d 1983. Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi (S1) dan Magister Manajemen UNSOED Purwokerto (S2). Saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM). Selain itu, juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, serta aktif sebagai reviewer jurnal bersinta maupun jurnal belum bersinta baik di jurnal Penelitian maupun di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Email: aprihsantoso@usm.ac.id dan Hp. 08132577397